



Oleh:
Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si



UPETI
dalam Perspektif teori Hegemoni
© Penerbitan & Percetakan Calina Media, 2017
All right reserved

146 hlm; 16 x 23,5
Cetakan I Juni 2017
ISBN: 978-602-61258-2-8

Penulis:
Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Layout:
Rusta Eka Nurgraha, S.Pd.

Desain Sampul :
Sigit Dwi Laksana, M.Pd.I

Copyright © 2017
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang
Memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apapun, baik secara elektronik maupun mekanis termasuk
memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan
lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:
Penerbitan & Percetakan Calina Media
Perum Puspaasri Mangunsuman B. 13 Ponorogo 63471
HP. 085736156324
email: calinamedia1@gmail.com



KATA PENGANTAR

Rahmat yang di limpahkan oleh Allah Subhanawa ta'ala kepada penulis, merupakan bentuk curahan karunia yang tidak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pembuatan karya tulis ini. Karya tulis ini, merupakan analisis *library research* yang kemudian diolah sedemikian rupa, dengan menggunakan analisis sosiologis historis, sebagai *tool analized* untuk memahami fenomena *upeti* yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia. dalam buku ini, penulis coba memaparkan serta melakukan proses identifikasi, untuk memberikan pemahaman bagi khalayak agar bisa memahami konsep *upeti* dengan gampang dan jelas.

Proses ilmiah yang dilakukan oleh penulis, kemudian mendorong kami untuk membakukan ide serta gagasan tersebut dalam sebuah buku, supaya dapat dibaca dan menjadi salah satu referensi keilmuan, sehingga bisa menjadi salah satu mimbar akademik yang dialogis, tanpa ada sekat atau pembatas. Penulis sadar bahwa, kesempurnaan tulisan masih belum diperoleh, oleh sebab itu kami sangat berharap, agar saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa bisa memberikan pencerahan guna memperbaiki karya kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Keluargaku tercinta di Desa Segalamider, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Provinsi Lampung.

Semoga amal baik dari semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dibalas oleh Allah Swt. Semoga buku ini dapat menjadi solusi, inspirasi dalam pengembangan pembelajaran akidah akhlak. Aamiin.

Ponorogo, April 2017

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Realitas Upeti.....	01
Bab II Konsep Pelembagaan Upeti	20
Bab III Pemahaman Konsep Upeti	52
Daftar Pustaka	131
Riwayat Penulis	143
Sinopsis	145







Fase-fase perjalanan dan perkembangan sejarah bangsa Indonesia, bisa dilihat melalui periodisasi jaman, dalam membuat kategorisasi perkembangan jaman, ada beberapa pertimbangan, salah satunya melalui faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial, politik, serta kultural bangsa, seperti periodisasi jaman menurut Sartono Kartodirjo dapat dibagi menjadi berbagai periodisasi seperti berikut ini.

1). Jaman Pra sejarah. 2). Jaman Kuno (Masa kerajaan-kerajaan tertua. Masa Sriwijaya dari abad VII sampai abad XIII atau XIV. Masa Majapahit dari abad ke XIV sampai abad XV. Masa Peralihan abad XV). **3). Jaman Baru** (Masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate/Tidore, sejak abad XVI), Masa perlawanan terhadap imperialisme Barat (abad XIX), Masa Pergerakan Nasional (Abad XX), Masa Republik Indonesia (sejak 1945). (Gazalba, 1966:194)

Bangsa ini memulai kehidupan dari era prasejarah yang menjelaskan tentang pola hidup masyarakatnya, dimana mereka hidup secara berpindah-pindah (*nomaden*) dalam kelompok-kelompok kecil (*small group*) serta mengandalkan alam sebagai penopang hidup dengan cara berburu, dalam melakukan kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara tukar – menukar (*barter*), sedangkan sistem religius masyarakatnya juga memiliki karakteristik yang unik, hal itu ditandai dengan tradisi-tradisi yang berbentuk kepercayaan *animisme*, *dinamisme*, serta *monoteisme* yang berkembang pada masyarakat kita.

Suku Toraja memiliki kekhasan dan keunikan dalam tradisi pemakaman yang biasa disebut "rambu tuka". Di tanah Toraja mayat tidak dikubur melainkan diletakan dalam tongkonan untuk beberapa waktu. Jangka waktu peletakan ini bisa lebih dari 10 tahun sampai keluarganya memiliki cukup uang untuk melakukan upacara yang pantas bagi si mayat. Setelah upacara mayatnya dibawa keperistirahatan terakhir didalam gua atau dinding gunung. (Arini dkk, 2008: 7)

Manumbai Ini merupakan upacara budaya mengumpulkan madu dari pohon. Bagi masyarakat Petalangan, upacara Manumbai adalah suatu upacara sakral yang dipimpin oleh Juragan Muo dan tukang sambut. Upacara ini berlangsung semalam suntuk hingga matahari terbit di timur. (Krismo, 2010)

Periodisasi perkembangan jaman kemudian berlanjut memasuki era kerajaan-kerajaan nusantara, Sriwijaya dan Majapahit adalah contohnya. Kerajaan Sriwijaya, merupakan salah satu kerajaan



tertua di Indonesia, yang memiliki corak dan model khas, sebagai kerajaan yang bercorak bahari, menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai penguasa laut selama berabad-abad, dengan dominasi perdagangan didaerah laut semenanjung Asia. Kehidupan perekonomian melalui jalur perdagangan, dipercaya sebagai salah satu faktor utama yang membuat kerajaan di Nusantara menjadi makmur, karena bisa memonopoli kehidupan ekonomi, daerah pesisir pantai yang mendominasi kekuasaan Sriwijaya berkembang sangat maju, hal tersebut kemudian memberikan keuntungan, karena negara dalam hal ini kerajaan akan mendapatkan upeti serta pajak dari kapal - kapal lokal maupun asing yang merapat di bumi nusantara. Upeti jika kita lihat secara lebih dalam, menjelaskan bahwa motif pemberiannya ditujukan untuk melancarkan arus perdagangan di wilayah tersebut. Kemajuan Sriwijaya dalam bidang perdagangan melalui jalur laut, ternyata telah banyak menyita perhatian kerajaan - kerajaan lainnya, hal ini tersebut membuktikan bahwa Sriwijaya terlalu memprioritaskan kehidupan lautnya sehingga melupakan kehidupan agrarisnya, yang seharusnya bisa mendukung arus perdagangan, sehingga perlahan - lahan jalur laut mulai terlupakan karena tidak mampu berdiri sendiri.

Mulai muncul dari panggung sejarah Indonesia dalam abad ke-6, ialah suatu negara yang terletak mungkin di Palembang, tetapi mungkin juga terletak di pertengahan sungai kampar di Sumatra Tengah, atau di daerah kota Jambi sekarang. Negri itu bernama Sriwijaya, untuk beberapa lamanya menguasai perdagangan di laut-laut Indonesia bagian barat. Kebudayaan-kebudayaan Hindu mempengaruhi masyarakat lapisan istanya dari kerajaan Sriwijaya ... segala potensi dan kekuatan rakyat dapat diarahkan ke arah teknologi pembangunan perahu-perahu untuk armada perdagangan serta perahu-perahu perang untuk melindungi armada itu. Adapun rumah-rumah tinggal orang, tidak hanya rakyat kecil, budak, buruh dan tukang-tukang dikota, tetapi juga orang-orang kaya, bahkan istana raja-raja dibangun dari kayu, walaupun rumah orang kaya dan istana-istana sudah tentu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Bangunan-bangunan kayu itu sekarang sudah hilang tak berbekas. (Kontjaraningrat, 1970: 22-23)

Kejayaan Sriwijaya yang berlangsung cukup lama akhirnya mengalami kemuduran, hal ini disebabkan, karena sebagai kerajaan yang hidup dari kehidupan perdagangan laut, corak dari sistem ketatanegaraanya tidak tertata dengan baik, karena kesibukan dalam mengembangkan perdagangan melalui jalur laut, akhirnya membuat kondisi Sriwijaya kurang begitu stabil dan akhirnya runtuh. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya, memberikan ruang baru tentang kekosongan kekuasaan yang harus segera diisi atau dikuasai, karena dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan merupakan prospek yang baik, untuk mengembangkan sebuah kerajaan yang kuat dan makmur.



Kondisi ini kemudian memunculkan kekuatan-kekuatan baru dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa seperti Mataram kuno, Kediri, Shingasari dan Majapahit, yang terdapat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki corak Hindu dan Budha yang mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Dari beberapa kerajaan inilah, Majapahit muncul sebagai kerajaan yang besar, dengan para adipati-adipati yang dipimpin oleh seorang patih ternama yang memiliki gagasan luhur dan agung. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Majapahit diawali dengan melakukan ekspansi kedaerah-daerah baru untuk melakukan penaklukan atau penguasaan-penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang lain. Beragam cara dilakukan baik secara diplomasi ataupun peperangan. Penguasaan-penguasaan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan tersebut memiliki tujuan untuk menguasai pusat-pusat perdagangan, dan meyebarkan agama, serta menjadikan wilayah kerajaan tersebut menjadi bagian integral dari kerajaan Majapahit, Kondisi inilah yang diyakini menjadi awal-mula pelanggaran praktik upeti di tanah air.

Kegiatan ekspansi yang terkenal adalah upaya yang dilakukan oleh Mahapatih Gajah Mada seorang negarawan yang termashur dari kerajaan Majapahit, yang bertujuan untuk mempersatukan Nusantara, kedalam naungan Majapahit, dengan sumpah suci *palapa*, yang berbunyi: *"tidak akan makan buah pala"*, yang diartikan secara harfiah *"tidak akan makan enak serta hidup mewah jika belum bisa mempersatukan Nusantara, kedalam naungan Majapahit"*, upaya yang dilakukan oleh Gajahmada membuahkan hasil, dengan beberapa penaklukan-penaklukan yang berhasil, antara lain beberapa daerah yang dianggap strategis dipenjuru Nusantara, dan berapa wilayah seperti Vietnam dan Irian Jaya.

Majapahitlah yang dapat mencapai puncak kejayaan dalam pertengahan abad ke-14. Waktu itu produksi pertanian surplus, sehingga dapat dialihkan ke sektor perdagangan dan menyebabkan ekspansi ke tempat-tempat pantai yang strategis diseluruh Nusantara dan lebih dari itu, ke arah barat sampai beberapa tempat di Vietnam Selatan dan kearah timur sampai di berapa tempat dari Irian Jaya. (Kontjaraningrat, 1970: 23)

Dengan timbulnya Patih Gajah Mada melakukan ekspedisi ke pulau-pulau luar Jawa yang biasa disebut Nusantara. Dengan integrasi pelbagai pulau nusantara sesudah tahun 1334 wilayah kerajaan Majapahit bertambah luas meliputi dari pantai barat Irian sampai Langkasuka di Semenanjung Tanah Melayu (Slamet Mulyono, 1979). Seluas itulah wilayah kerajaan Majapahit pada zaman pemerintahan Prabu Hayamwuruk. Pulau-pulau nusantara yang tunduk pada Majapahit, menjadi bawahan kerajaan Majapahit. (Purwadi, 2007: 46)



Kejayaan Majapahit, berbarengan dengan mulai tumbuhnya potensi alam, sumberdaya manusia, kekuatan armada perang, serta ajaran Hindu yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, serta tata pemerintahan, hal itu ditambah dengan adanya sumber – sumber upeti serta pajak yang diperoleh oleh pihak kerajaan dari kerajaan-kerajaan yang telah ditaklukan, penguasaan-penguasaan tersebut telah membawa kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar yang disegani di semenanjung Asia. Konsep penyatuan Nusantara merupakan gagasan sang maha patih Gajahmada dalam upayanya untuk mempersatukan daerah-daerah sekitar Asia dalam naungan Nusantara. Penggunaan istilah Nusantara sendiri memiliki beberapa relevansi historis tentang bagaimana nusantara itu berasal dan terbentuk, sebagai manifesto cita-cita luhur dari sang patih.

Sumpah palapa Gajah Mada tertulis "*Lamun huwus nusantara, Isun amukti Palapa*" (jika sudah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat). Oleh Dr. Setiabudi Nusantara Istilah Nusantara pada jaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. dengan mengambil istilah melayu asli, antara makna nusantara kini, memiliki arti yang baru yaitu "*nusa diantara dua benua dan dua samudra*", sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern ... sampai hari ini istilah Nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari sabang sampai merauke. (Hasibuan, 2009: 4)

Konsepsi-konsepsi dari hasil pemikiran Gajah Mada, tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama Hindu dan Budha yang masuk dan dibawa oleh para pedagang dari India, konsep tersebut membentuk masyarakat kedalam sebuah sistem kelas, yang membentuk lapisan masyarakat secara bertingkat. Disini bisa kita lihat adanya kaum Raja, Bangsawan, serta Rakyat Jelata. Kondisi tersebut tereduksi dalam sistem pemerintahan kerajaan yang kemudian terlembaga.

Daftar nama itu hampir serupa dengan nama-nama yang disebut tentang tamu-tamu asing yang sering berkunjung ke Majapahit, terutama parapedagang dan para pendeta. Banyak diantara para pendeta asing yang menetap di Majapahit berkat pelayanan yang baik. Mereka itu adalah penyebar kebudayaan india. Berkat usahanya hinduisme di Majapahit bertambah kuat. (Purwadi, 2007: 45)

Tanggung jawab negara sepenuhnya ada di tangan raja. Dalam melaksanakan pemerintahan raja dibantu oleh berbagai pejabat berbagai bidang, yang diangkat oleh Ingkang Sinuwun Prabu. Dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah dan mengambil keputusan yang penting seperti misalnya pengangkatan patih amangkubumi atau pejabat penting lainnya raja dibantu oleh para kerabat, karena urusan negara dalam kerajaan adalah urusan kerabat raja. (Ibid, 2007: 50)



Pada zaman Majapahit para pegawai pemerintahan disebut tanda, masing-masing diberi sebutan atau gelar sesuai dengan jabatan yang dipangkunya ... Ditinjau dari gelar sebutannya seperti yang didapatkan dengan berbagai Prasasti, para tanda Majapahit dapat di bagi atas 3 golongan yakni: I. Golongan rakryan; II. Golongan arya; III. Golongan dang acarya. (Op cit. 2007: 51)

Penempatan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam sistem pemerintahan, telah menjelaskan tentang bagaimana sistem kelas tersebut terbentuk, dan akhirnya memberikan pembeda bagi status sosial seseorang, yang menyangkut peranan dan fungsi yang dia miliki di Kerajaan, disitu terdapat dominasi oleh kalangan dari garis keturunan bangsawan, hal ini jika kita lihat kemudian menimbulkan persepsi terhadap ras-ras unggul dari keturunan raja - raja yang ada di tanah Jawa. Ajaran agama Hindu yang begitu kental dalam kehidupan masyarakat di pulau Jawa, khususnya ketika era kerajaan Majapahit, menjelaskan tentang ada nya kelas-kelas di dalam kehidupan masyarakatnya, yang sebenarnya telah ada ketika era kerajaan Mataram Kuno, yang sudah ada terlebih dahulu.

Konstruksi kelas dari kedua Kerajaan tersebut sama-sama bercorak Hindu dan Budha. Konstruksi kelas ini akhirnya menciptakan kelas bangsawan atau priyayi dengan kelas rakyat jelata, konstruksi ajaran agama Hindu pada saat itu terlihat lebih condong untuk mempertahankan konstruksi kelas, sehingga dalam kehidupan masyarakat Jawa yang tampak pada sistem pemerintahan kerajaan, menyebabkan rakyat jelata harus tunduk dan menghormati kelas sosial yang ada di atasnya, sehingga kecenderungan yang terjadi mengharuskan rakyat jelata untuk mengabdikan dirinya kepada kaum bangsawan atau raja - raja tersebut, realitas sosial ini memberikan gambaran jika pengabsahan kekuasaan raja-raja di pulau Jawa sangat kuat karena terlembaga dan memasuki berbagai dimensi kehidupan. Konsep yang paling terkenal adalah konsep Jawa tentang wahyu yang memposisikan raja atau bangsawan sebagai orang atau status yang diperoleh atas restu Tuhan Yang Maha Esa atau Pencipta.

Kekuasaan dalam pandangan budaya Jawa diperoleh melalui proses turunnya *wahyu*, *pulung* atau *ndaru* ... Dalam birokrasi kraton Jawa dikenal istilah *Ratu-binathara* memiliki tiga macam *wahyu*, yaitu *wahyu nubuawah*, *wahyu hukumah*, dan *wahyu wilayah*. Yang dimaksud dengan *wahyu nubuawah* adalah wahyu yang mendudukkan raja sebagai wakil Tuhan. *Wahyu hukumah* menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wewenang *murbamisesa*, kedudukannya sebagai Sang Murbawisesa, atau Penguasa Tertinggi ini, mengakibatkan raja memiliki kekuasaan tidak terbatas dan segala keputusannya tidak boleh ditentang, sebab dianggap sebagai kehendak Tuhan. *Wahyu wilayah*, yang melengkapi dua macam *wahyu* yang telah disebutkan di atas,



mendudukkan raja sebagai yang berkuasa untuk memberi *pandampangauban*, artinya memberi penerangan dan perlindungan kepada rakyatnya. (Purwadi, 2007: 56)

Keyakinan masyarakat tentang bentuk kekuasaan atau model kekuasaan itu, menjadikan masyarakat kita, memahami jika raja adalah Wali Tuhan dimuka bumi yang harus dihormati dan diikuti perintahnya, sehingga apapun kebijakan dari kerajaan atau yang memerintah di suatu wilayah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk dilaksanakan. Termasuk memberikan bukti kesetiannya, melalui berbagai bentuk penghormatan, salah satunya dengan cara memberikan upeti atau pajak kepada raja atau pihak kerajaan, disini ada interaksi tentang bagaimana proses ketertundukan bagi masyarakat, dengan tujuan supaya bisa melayani dan mengabdikan diri kepada raja, sebagai orang – orang pilihan yang telah diutus oleh Tuhan, yang kemudian membenarkan praktik - praktik pemberian upeti ataupun pajak, sebagai sebuah tradisi dan budaya, yang diyakini kebenarannya.

Kejayaan Majapahit setelah beberapa waktu, akhirnya runtuh juga, sebagai sebuah siklus normal, dan juga adanya pengaruh dari perubahan jaman. Kehidupan kalangan bangsawan yang dahulunya bergelimangan harta dan juga bermewah -mewahan, serta banyaknya konflik terkait perebutan kekuasaan membawa Majapahit kedalam kehancurannya, kondisi tersebut diperparah oleh penderitaan rakyat jelata yang terus menerus dikungkung oleh sistem, yang memposisikannya dalam kondisi yang tidak menguntungkan serta sebagai obyek penderitaan, pada akhirnya membawa pergolakan dimana-mana, selain itu masuknya Islam juga disinyalir menjadi penyebab runtuhnya Majapahit, sehingga perlahan-lahan kedaulatan Majapahit, sebagai sebuah kerajaan yang besar dan kuat, di *rongrong* dari berbagai arah.

Kejayaan Majapahit yang rupa-rupanya tinggal terbatas dalam lapisan tertinggi dari masyarakat dan yang menjelama kedalam kehidupan mewah megah dalam upacara-upacara kerajaan yang besar, tidaklah sampai kepada lapisan-lapisan masyarakat bawahan, ialah rakyat petani didesa-desa ... selama abad ke 15 kekuasaan itu dirongrong oleh kekuatan-kekuatan baru yang datang dari kota-kota pelabuhan daerah pesisir. Sekitar tahun 1518 sisa-sisa terakhir dari Negara Majapahit dihancurkan oleh Negara-negara pesisir yang beragama Islam. (Koentjaraningrat, 1970: 24)

Setelah Majapahit hancur memasuki babak baru, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang membawa perubahan pada sistem sosial kemasyarakatan di Nusantara, dengan ajaran-ajaran agama, yang perlahan-lahan mengikis ajaran-ajaran Hindu, akan tetapi praktik-praktik kehidupan masyarakat di Nusantara tetap masih belum bisa terlepas dari pengaruh ajaran Hindu, yang lama tumbuh dan



berkembang di bumi Nusantara. Kerajaan Mataram baru merupakan kerajaan yang terlahir kembali setelah sempat meredup, akan tetapi dia kembali bangkit dengan model baru, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan – kebudayaan ataupun ajaran – ajaran yang ada di agama Hindu.

Mungkin bahwa negara ini merupakan suatu kelahiran kembali dari negara Mataram dari abad ke 19 dulu yang mengalami kemunduran, akan tetapi tetap hidup sebagai suatu negara pinggiran pada abad-abad kejayaan dari negara-negara Indonesia-Hindu di Jawa Timur, ialah abad ke -12, 13, 14, dan 15. Penduduk Mataram pada abad ke 15 dan 16 terpengaruh oleh agama Islam, tetapi mereka tidak melepaskan sifat-sifat Jawa-Hindunya, dan merobah agama Islam menjadi apa yang diatas telah disebut agama *Jawa* atau *Kejawen*. (Ibid, 1970: 27)

Perkembangan Kerajaan - kerajaan Islam, yang ada di Indonesia banyak terdapat di wilayah pesisir pantai, dimana kegiatan di dominasi dengan perdagangan. Expansi yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam, membawa kepada sebuah kejayaan, sehingga terdapat banyak raja – raja yang mulai memeluk Islam, kemudian diikuti oleh masyarakatnya.

Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 M. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja pasai di kampung Geung, Aceh Utara. Makam ini terletak di reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di desa Beuringin, kecamatan Samudra sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe, di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik al-saleh, Raja Pasai pertama. Kerajaan samudera Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pase dan Peurlak, dengan raja pertama Malik al-Saleh pada masa jayanya, Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai Bandar perdagangan yang besar. Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Disamping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. (diakses dari <http://serbasejarah.blogspot.co.id/2012/03/sekilas-tentang-kerajaan-samudera-pasai.html> pada 20 Januari 2017).

Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia terutama di Jawa setelah berakhirnya masa Hindu-Budha yang ditandai dengan kemunduran dan keruntuhan kerajaan Majapahit sebagai salah satu pusat kekuatan dan kekuasaan besar terakhir yang berpusat di Jawa yang bercorak Hindu-Budha. Dengan masuk dan berkembangnya Islam



di Nusantara mendorong tumbuhnya peradaban (*tamaddun*) Islam di Nusantara. (diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/> berita/2015/07/kondisi-nusantara-setelah-kekuasaan-majapahit-runtuh pada 20 Januari 2017).

yang ditandai dengan munculnya tatanan-tatanan baru yang ber-sendikan pada asas dan ajaran Islam. Pengaruh Islam terhadap tumbuh dan berkembangnya pusat kekuasaan Islam di Jawa atau pengaruh Islam terhadap kehidupan politik di Jawa ini pada awalnya telah didahului dengan tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan dan pusat-pusat Islam di kota-kota pesisir. Tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan dan pusat-pusat Islam di kota-kota pesisir yang bercorak Islam merupakan perwujudan integrasi kekuatan Islam sebagai akibat masuknya Agama Islam yang dibawa pada saudagar Islam dalam perdagangan yang menggunakan jalan laut yang melewati wilayah pesisir pantai utara pulau Jawa. (Nugroho, 2004)

Perdagangan yang pesat dari kehidupan perekonomian, ini kemudian memasuki fase-fase baru, tentang dibukanya pelayaran internasional, krisis yang terjadi di Eropa akhirnya membawa modus-modus untuk mendapatkan rempah-rempah untuk dibawa kembali ke negeri Eropa, diawali dari masuknya koloni para pedagang Eropa diawali oleh Kerajaan Belanda.

Tahun 1595, perseroan Amsterdam pertamakali mengirim misi perdana ke Banten dipimpin Cournelis De Haoutman ... keberhasilan Cournelis De Haoutman merancang kongsi dagang Belanda lainnya untuk melakukan hal serupa. Pada 1 Mei 1598, misi pelayaran kedua dipimpin Van Nede, Van Heemserck, dan Van Merwicjk tiba di Maluku untuk membeli rempah-rempah. Karena pedagang Belanda sudah semakin banyak, maka didirikanlah yang terdiri dari 17 kongsi dagang. (Hasibuan, 2007: 5)

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut dipercaya sebagai awal atau cikal bakal munculnya *kolonialisme* di Indonesia, yang kemudian berlangsung selama kurang lebih 300 tahun, dalam masa itu Kerajaan Belanda melakukan aktifitas hegemoni melalui berbagai macam cara, seperti: yang pertama penundukan lewat jalan peperangan yang dimiliki terutama dengan persenjataan militer yang canggih, untuk memaksa masyarakat Nusantara supaya tunduk, yang kedua, dengan membangun asumsi - asumsi mengenai konsep kebudayaan, dengan cara memberikan pemahaman yang salah terhadap sistem kelas sebagai bentuk upaya untuk mengkonstruksi jalan pemikiran rakyat Indonesia, terkait konsep kekuasaan dan legitimasi, hal ini diarahkan agar pemerintah kolonial belanda, dapat memperoleh keuntungan, salah satunya dengan melembagakan praktik pemberian upeti dari masyarakat untuk kaum bangsawan dan kerajaan yang nantinya akan disetorkan ke pemerintah Kolonial.



lapisan atas atau merupakan kelas *elite*, *priyayi luhur*, atau *wong gede*, merupakan kelas yang memerintah. Di strata ini ada raja dan para bangsawan serta pejabat kerajaan. Sebenarnya bila dilihat dalam sistem kategorisasi, kelompok atau golongan ini merupakan kelompok campuran *priyayi* yang berasal dari *darah dalem* dengan *priyayi* yang karena pangkat atau pengabdian. Adapula lapisan bawah atau rakyat biasa, rakyat kecil atau *wong cilik* merupakan mayoritas penduduk kelas yang diperintah, baik penduduk kota maupun yang berada di pedesaan. Mereka adalah para pekerja yang tidak terdidik atau sedikit mendapat latihan kerja di perusahaan kecil. Rakyat kecil ini biasanya bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh perkebunan dan pabrik serta tukang, perajin dan lainnya. (Sutjipto, (tt): 1-2.)

Realitas yang terjadi di pahami sebagai bentuk pelanggaran dari mekanisme sistem kelas, yaitu: pelanggaran sistem kelas yang mengharuskan kelas rendah harus dibawah kelas yang lebih tinggi, atau di hegemoni, sehingga terbentuk sebuah tatanan yang kemudian menghidupkan kembali bentuk – bentuk pemberian upeti setelah sekian lama ditinggalkan, pasca hancurnya kerajaan-kerajaan Hindu. Konsepsi sistem kelas, akhirnya menyebabkan praktik pemberian upeti tumbuh subur, ternyata praktik pemberian upeti juga masuk kedalam sistem pajak yang saat ini kita kenal, sebagai bentuk pemberian sukarela pada awalnya namun dalam perkembangannya, karena beberapa pertimbangan dari penguasa kemudian dilakukan secara paksa.

Pada hakekatnya ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah adasejak zaman dahulu walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak” namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh Negara. dengan kata lain “pajak “ yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib. dengan demikian, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan (Munawir, 1997 : 3)

Perkembangan dari praktik pemberian upeti, semakin marak dan mencuat setelah era kerajaan kehilangan pamornya, dan masuknya bangsa-bangsa kolonial seperti Belanda ke Indonesia untuk melakukan kolonialisasi. Penjajahan tersebut dilakukan secara paksa, dengan jalan kekerasan, agar dapat menguasai kekayaan bangsa ini. Ahli – ahli budaya, pemerintahan dari kerajaan Belanda, sebelum melakukan kolonialisasi, telah sejak lama belajar kebudayaan serta masyarakat Indonesia, sehingga mereka hafal betul corak kebudayaan masyarakat Indonesia, dengan sistem kelas inilah kemudian mereka melakukan hegemoni, dengan memisahkan atau memeperjelas pembagian kelas di



negeri ini, mulai dari kelas apaling tinggi yakni: kalangan bangsawan Eropa, kemudian kelas ras Asia Timur jauh dan yang paling bawah adalah bangsa pribumi, yang kemudian memperkokoh dominasi bangsa asing di tanah Nusantara. Tatanan mengenai pelanggaran sistem kelas antara kaum bangsawan Eropa dengan rakyat jelata, dilakukan oleh Belanda, dengan cara membagi, orang-orang pribumi menjadi priyayi atau bangsawan yang berasal dari keluarga kerajaan dan juga memaksakan rakyat jelata sebagai kelas paling bawah dalam berbagai lini kehidupan, sehingga kondisi tersebut mengokohkan praktik pemberian upeti, sebagai sebuah kewajiban tidak hanya dianggap sebagai tanda kesetiaan terhadap keluarga kerajaan tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat yang harus diberikan atau dibayarkan seperti halnya pajak dan juga upeti.

Dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Para adipati memberikan persembahan kepada raja penakluk. Sebagai imbalannya, raja penakluk memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh para adipati tersebut. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia. (Kumorotomo, 2008 :2).

Hardjowirogo (7989173-74) memberikan tanda deskripsi edan adalah terletak pada sikap masyarakat (Jawa) yang menyenangkan hati atasan. Sikap ini sebagai buntut dari tradisi kekuasaan feodalistik. Hal ini memang pernah (kabarnya) disugestikan oleh R Ng Ranggawarsita bahwa: *"Sing sapa ngerti ng panuju, prasat pagere wesi."* (Barangsiapa yang bagaimana menuju hati seseorang, bagaikan la berpagar besi). Maksud dari sugesti ini, mestinya bagi bawahan yang selalu bisa melegakan atasan, dengan sikap *mundhuk-mundhuk, nun inggih sendika dhawuh*, kalau perlu mengelabui kesalahan atasan, dan sebagainya - ia akan diselamatkan. Hal tersebut pernah dikritik oleh Eki Syahrudin, mantan anggota Komisi VII DPR RI tahun, tanggal 17 Desember 1997 di Taman Mini Indonesia, yang menyatakan bahwa budaya daerah Jawa yang cenderung bersifat kratonik itu sudah kurang layak sebagai modal menyongsong abad XXI nanti. budaya stratifikasi itu harus dirombak, diganti dengan budaya demokratik. Pasalnya, budaya kratonik itu justru menghambat kemajuan dan kreativitas bangsa. budaya semacam ini, sering 'anti kritik', melainkan lebih ke arah ABS (asal bapak senang) dan *watisme*. Implementasi budaya Jawa yang kraton life dan terlalu hirarkhis itu, menghendaki bawahan harus patuh. Bawahan harus bisa *ngapurancang, tutup mulut, sendika dhawuh, dan inggih-inggih*, jika pinjam istilah Darmanta Jatman. budaya ini akan 'mematikan' prestasi.

Kurang memupuk jiwa untuk berkembang secara wajar.(Suwardi, 2005: 3-4)

Pelembagaan dalam praktik pemberian upeti, erat hubungannya dengan konteks kekuasaan negara, mulai dari sistem kelas atau stratafikasi, yaitu: bagaimana kelas borjuis / bangsawan / priyayi, diposisikan sebagai kelas atas yang harus dihormati, kaum proletar / rakyat jelata dapat di hegemoni, dimana praktek tersebut banyak di identikan dengan sistem kerajaan, kekuasaan yang ada disebuah negara bisa dilihat dari bentuk-bentuk otoritas yang dimiliki oleh Negara atau raja terhadap masyarakatnya, dimana otoritas tersebut berkenaan dengan upaya yang dilakukan oleh negara, untuk membuat masyarakatnya tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya, hal tersebut kemudian menjadi dasar dalam mengatur masyarakat agar bersedia untuk menjalankan perintah - perintah negara yang tertuang dalam titah-titah raja.

Praktik kekuasaan, otoritas ataupun kewenangan dalam sebuah negara, bukan hanya menjelaskan tentang bentuk-bentuk aplikatif dari kewenangan itu sendiri, akan tetapi juga memberikan ruang terhadap pelembagaan praktik pemberian upeti, karena dalam praktik tersebut tersisip sistem kelas yang menjadi simbol kehidupan masyarakat, yang dipercaya keberadaannya, secara detail pola otoritas atau kewenangan tersebut bisa dilihat dari konsepsi otoritas Max Weber, yang dibagi kedalam 3 (tiga) jenis.

Max Weber membagi kewenangan dalam berbagai bentuk, diantaranya sebagai berikut : Wewenang kharismatik, Tradisional, dan rasional, perbedaannya terletak pada hubungan antara tindakan-tindakan dan dasar hukum yang berlaku. Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma (daya tarik atau *Mahabbah*), yaitu kemampuan seorang yang dianggap sebagai anugrah Tuhan yang maha kuasa...Wewenang tradisional dapat dipunyai seseorang maupun kelompok orang bersama-sama yang telah lama sekali mempunyai kekuasaan didalam masyarakat tertentu. Titik tekanan wewenang tradisional adalah karena kelompok ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Oleh karena itu, sudah demikian lamanya golongan ini memegang kekuasaan, maka masyarakat percaya dan mengakuinya...Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang sandaranya sistem hukum yang berlaku didalam masyarakat. Sistem hukum yang dimaksud berlaku didalam masyarakat. Sistem hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah hukum formal yang memiliki batasan, ketentuan, prosedur, dan memiliki alat-alat hukum yang jelas, sehingga hukum yang mengikat pada seluruh warga masyarakat ini menjadi referensi dari pengabsahan wewenang yang dijalankan oleh pemegang wewenang ini. (Setiadi & Kolip, 2011: 767-768).



Max Weber menjelaskan bahwa praktik tersebut memiliki dimensi yang melegalkan bentuk – bentuk aplikatif bagi pelaksanaan pelembagaan praktik pemberian upeti, sebagai upaya agar suatu kelas dapat menghegemoni kelas yang lain, dalam hal ini kaum priyayi terhadap rakyat jelata. Jika diuraikan konsep otoritas atau kewenangan menurut Weber memiliki pola serta model yang berbeda antara model yang satu dengan yang lain.

Otoritas yang pertama yaitu bentuk otoritas atau kewenangan kharismatik, dalam kehidupan sosial masyarakat, kewenangan kharismatik memberikan legitimasi pada tokoh atau figur tertentu dalam memimpin masyarakatnya, sehingga ketika masyarakat memiliki urusan dengan tokoh tersebut ada sebuah keharusan dari masyarakat untuk memberikan sebuah penghargaan atau penghormatan berbentuk upeti pemberiannya dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka akan dijumpai sebuah tatanan masyarakat yang seimbang.

Bentuk yang kedua adalah otoritas atau wewenang tradisional, otoritas ini memberikan gambaran tentang bentuk otoritas yang sudah ada dan terbentuk sesuai dengan kultur masyarakat setempat, dan terlegitimasi sehingga keberadaanya sudah terlembaga contoh konkritnya adalah pemerintah desa, asumsi dari masyarakat bahwa pemerintah desa merupakan orang-orang yang memiliki otoritas tidak saja secara lembaga akan tetapi secara kultur juga, sehingga masyarakat ketika berurusan dengan kepala desa atau pak lurah, akan menjadi sebuah keharusan untuk memberikan upeti sebagai tanda kesetiaan sebagai masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud budaya masyarakat yang tersusun berdasarkan kelas, yang mengharuskan pengormatan diberikan kepada strata yang lebih tinggi.

Otoritas atau wewenang yang terakhir adalah otoritas rasional, otoritas ini menekankan pada wewenang rasional atau legal sebagai wewenang yang sandaranya adalah sistem hukum yang berlaku didalam masyarakat. Bentuk konkritnya dapat kita temui dalam sistem birokrasi modern, dimana masyarakat ketika akan mengurus keperluan yang berhubungan dengan ijin atau hal-hal yang berkenaan dengan administratif, memberikan upeti sebagai imbalan atau balas jasa guna mempermudah urusanya, proses yang dilakukan lebih bersifat transaksional, dan banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan.

Transformasi atau perubahan dalam praktik pemberian upeti saat ini berkembang menjadi pajak, suap, serta gratifikasi, Hal ini di pengaruhi oleh sumsi-asumsi yang berkembang dalam masyarakat, tentang konstruksi kelas antara kaum bangsawan dengan rakyat jelata, yang memiliki keterkaitan yaitu antara yang dikuasai dengan yang menguasai. Hubungan antara bentuk otoritas atau kewenangan masyarakat dengan pelembagaan praktik pemberian upeti, merupakan sebuah kesatuan dalam sistem sosial budaya dari sebuah masyarakat,

yang membentuk asumsi - asumsi dari masyarakat tentang keharusan menjalankan kebiasaan yang dipercaya kebenarannya.

Perkembangan yang terjadi dalam pelembagaan praktik pemberian upeti pada masyarakat, menjadi serangkaian perjalanan sejarah, yang akhirnya membawa konsekuensi logis tentang pelanggaran praktik pemberian upeti dalam penyelenggaraan negara, perkembangan tersebut memberikan gambaran tentang motif-motif dibalik tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain: untuk mempermudah urusan-urusan pribadi, untuk menguntungkan suatu pihak, atau motif-motif yang bersifat ekonomi, kekuasaan, serta *prestise* atau harga diri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, hal ini dirasakan agak bergeser dari tujuan awal pemberian upeti sebagai bentuk atau tanda kesetiaan dari masyarakat kepada pemimpinnya yang dianggap sebagai raja atau seseorang yang memiliki kelebihan atau kharisma.

Jakarta, Akbar Tri Kurniawan, 06 Maret 2012-*Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menilai maraknya kasus korupsi pegawai pajak berasal dari sengketa pajak. "Sengketa pajak muncul karena peraturan perpajakan yang multi interpretasi,"* kata Darussalam saat dihubungi Tempo Senin 5 Maret 2012. Banyaknya peraturan pajak yang tidak sinkron membuat despute antara wajib pajak dan pegawai pajak mengenai besaran pajak terutang."Akhirnya muncul negosiasi di antara mereka," ujarnya.Salah satu peraturan yang memberatkan wajib pajak, menurut Darussalam, adalah potensi ongkos yang harus dikeluarkan wajib pajak ketika mengajukan banding di pengadilan pajak.Darussalam mengatakan peraturan itu mewajibkan wajib pajak membayar ongkos 100 persen lebih dari besaran pajaknya jika kalah di pengadilan. Akibatnya wajib pajak akan melakukan segala upaya untuk menang. Ini tidak fair peraturan berlebihan, katanya.Darussalam menilai amandemen peraturan perpajakan segera dilakukan untuk mengurangi banyaknya sengketa pajak.Hingga akhir Oktober kasus keberatan yang ditangani pengadilan pajak mencapai 8.516 keberatan.Jumlah sengketa yang mangkrak setiap tahun meningkat terus.(diakses 20 Maret 2017 dari <http://tempo.com>)

Jakarta, Rabu, 01 Agustus 2012- *Praktik gratifikasi seksual di Indonesia sudah lama terjadi, bahkan sering digunakan untuk menyuap pejabat di daerah.Hal tersebut diutarakan oleh peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Junto."Fenomena ini kan hanya untuk menyuap pejabat dan itu bisa dilakukan salah satunya dengan cara-cara yang pastinya haram dengan segala bentuknya baik bentuk barang maupun jasa,"* ujar Emerson kepada Okezone di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2012).diberbagai kasus, gratifikasi seksual ini juga menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Seperti ketika



melakukan kunjungan kerja di sebuah daerah. Dia menambahkan, gratifikasi seksual juga diberikan untuk melancarkan sebuah proyek yang akan dikerjakan. "Gratifikasi seksual juga sering muncul, itu khususnya untuk melancarkan proyek-proyek itu," jelasnya. Selain itu, lanjutnya, gratifikasi seksual dapat berupa pemberian dalam bentuk tiket, fasilitas hotel berikut pelayanannya, dan wanita. (diakses 20 Maret 2017, dari <http://m.okezone.com>.)

Jakarta, Wiji Nurhayat. 04 Agustus 2012, *Pungli Pelabuhan Tanjung Priok Makin Merajalela, Sopir Truk 'Teriak'*, Merajalelanya pungli yang dilakukan oleh pihak petugas interim Pelindo II membuat beberapa pihak diuntungkan tapi lebih banyak lagi yang dirugikan. Pihak yang dirugikan adalah para sopir yang rutin melakukan bongkar muat di Pelindo II. Saat ditemui **detikFinance** di pos II CTP (Container Terminal Port) beberapa orang supir kontainer mengeluh dengan banyaknya pungli di pelabuhan. Ini jelas menjadi PR besar pihak pelindo untuk melakukan revolusi birokrasi. (diakses 20 Maret 2017 dari <http://detikFinance>)

KabarIndonesia, M. Kohar Cahyo Apriono 02-Sep-2010, *Gegeran Sengketa Tanah Bengkok*- Sengketa tanah kas Desa/Bengkok yang merupakan penghasilan tetap Kepala Desa (Kades), antara Kades terpilih Ibu Suyati dengan mantan Kades H.M Karno di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Jawa Timur karena kurang pahamnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pejabat sementara (Pjs) dari kebiasaan yang salah bertahun. Dalam musyawarah anggota BPD dengan Pjs Kades, tidak berpedoman pada UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 72/2005 yang mengatur tentang desa dan Peraturan Daerah No 8/2006 yang mengatur tentang penghasilan tetap Kades terpilih setelah dilantik, malahan BPD menentukan kebiasaan yang salah yaitu Kades terpilih di haruskan magang satu tahun untuk tidak menerima penghasilan tetap berupa tanah bengkok (kebiasaan yang salah). Itu merupakan musyawarah yang keliru dan ini merupakan awal dari tindakan yang melawan hukum, musyawarah boleh tapi musyawarah itu tidak boleh menyimpang/melanggar hukum dari Undang-Undang yang di atasnya. Kalau musyawarah yang melanggar aturan di atasnya, berarti musyawarah itu merupakan awal dari pada tindakan korupsi. Ini harus dilibas. (diakses 8 oktober 2012 dari <http://kabarindonesia.com/>)

Gorontalo, Sabtu, 18 Agustus 2012. *Kabupaten Gorontalo larang pemberian parsel ke pejabat*- Pejabat pemerintahan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dilarang menerima parsel maupun hadiah lebaran. Bupati David Bobihoe Akib, Sabtu, mengatakan, larangan tersebut berlaku untuk pemberian dalam bentuk parsel, hadiah, uang, fasilitas maupun pemberian lainnya dari bawahan, rekan kerja, dan rekanan maupun pengusaha. "Apalagi mereka yang memiliki hubungan

kerja dengan jabatan yang diemban para pejabat di daerah ini. Sebab parcel dan hadiah lebaran berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, dan menimbulkan korupsi, kolusi maupun nepotism," katanya. Larangan tersebut kata bupati, berlaku untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diminta memantau dan segera melaporkan pejabat di lingkungan kerja masing-masing yang kedapatan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. (diakses 8 oktober 2012 dari m.antaranews.com)

Kondisi tersebut tentunya, akan membahayakan bagi upaya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dikarenakan menjadi sebuah ancaman, dimana perkembangannya praktik pemberian upeti atau hadiah merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena dianggap sebagai praktik kontra prestasi. Salah satu praktik pemberian upeti yang melanggar hukum adalah suap dan gratifikasi, realita yang terjadi pada saat ini sangat mengkhawatirkan, karena akan menjadi permasalahan yang rumit, tidak hanya berkenaan dengan bagaimana perkembangan praktik pemberian upeti itu sendiri, akan tetapi bagaimana memahami model-model, karakter serta motif-motif dibalik tindakan tersebut, selain itu juga akan memberikan efek terhadap sistem sosial, politik, ekonomi, agama dan budaya dalam sebuah negara, karena perkembangan praktik pemberian upeti telah banyak merusak tatanan, sehingga sistem-sistem yang seharusnya berproses secara baik, menjadi tidak berjalan atau seolah-olah berjalan dengan baik, pada akhirnya kondisi tersebut menciptakan ketidakadilan, penyebabnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh diluar sistem (*eksternal*) menjadi lebih dominan daripada faktor-faktor yang ada di dalam (*internal*) sebuah sistem.

Perkembangan dari proses pelembagaan praktik pemberian upeti telah banyak memberikan gambaran tentang praktik pemberian upeti itu sejak awal kelahirannya sampai berkembang seperti sampai saat ini, dan memiliki bentuk-bentuk aplikatif, dimana praktik pemberian upeti di identikan sebagai tindak kejahatan korupsi, atau yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan korupsi. Praktik dari tindakan korupsi memiliki pemahaman yang luas, dengan pembahasan yang lebar, kerana tindakan ini memiliki banyak model dan berbagai macam varian serta bentuk-bentuk yang berbeda seperti yang dijelaskan dalam aturan perundang-undangan, yang secara tegas melarang praktik-praktik seperti korupsi. Praktik-praktik pemberian upeti memiliki kesamaan-kesamaan dengan praktek-praktek korupsi seperti gratifikasi dan suap sehingga terkadang membuat kegamangan, yang berdampak pada semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran tindak pidana korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia, hal inilah yang akan menjadi fokus pengkajian, karena banyak praktik-praktik,



suap dan gratifikasi dianggap sebagai bagian dari praktik pemberian upeti yang mengarah pada perilaku korupsi di Negara Indonesia.

Bentuk-bentuk dari praktik pemberian upeti berubah menjadi tindak kejahatan Korupsi, dengan berbagai macam bentuk seperti yang dijelaskan diatas, Gratifikasi dan suap misalnya, merupakan sebuah tindakan yang sangat menciderai rasa keadilan, bagi masyarakat. Bagaimana tidak, “ ketika banyak masyarakat yang tidak merasakan keadilan dalam pembangunan terutama berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan, seharusnya para pejabat ataupun aparatur pemerintah melakukan tindakan konkrit guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, akan tetapi para pejabat dan aparatur pemerintah, malah terlihat sibuk dengan urusannya pribadinya seperti mempertahankan jabatannya, memperkaya diri dengan menggunakan jabatannya, melakukan praktik korupsi”. Sehingga sangat menciderai sumpah janji sebagai pegawai atau aparatur negara.

Realita mengenai maraknya tindak pidana korupsi saat ini, berkaitan erat dengan kondisi pasca reformasi, ketika itu Indonesia sedang mengalami berbagai goncangan ekonomi, yang bersumber dari perubahan sistem politik. Perubahan tersebut juga menimbulkan paradigma baru tentang seluruh aktivitas pemerintahan dan kebangsaan, Saat ini yang disebut dengan Era Reformasi berusaha keras untuk membuang jauh-jauh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada Orde Baru, yang dianggap telah terlalu banyak merugikan masyarakat. Perjuangan mahasiswa dan masyarakat ke arah perubahan dengan pola pikir paradigma baru, terutama diarahkan pada perubahan sistem ekonomi yang dapat membuat perubahan sikap dan mental, sistem politik yang sesuai dengan keperluan-keperluan mendasar dari hajat hidup sebagian besar masyarakat, dan sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Wahid, 2001:1)

Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi, Ketidakterdayaan pemerintah dalam berlaku adil di ketiga bidang tersebutlah yang menyebabkan timbulnya berbagai bentuk kesengsaraan masyarakat hingga saat ini, Ketimpangan yang terjadi dalam berbagai bidang tersebut sering disebut kapitalisme, yang meletakkan dasar ekonomi sebagai motif utama yang melatarbelakangi setiap aktifitas dalam kehidupan manusia, Hal ini diperparah dengan pemaknaan pasal 33 ayat (3) dalam undang-undang 1945, pada masa orde lama dan baru mengenai penguasaan sumber-sumber alam tanpa ada batasan oleh Negara terhadap kepemilikan pribadi, akhirnya mengokohkan praktek kapitalisme.

Presiden Soeharto telah berkali-kali menegaskan bahwa yang diartikan dengan “dikuasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukannya dimiliki atau dieksploitasi oleh negara sendiri, tetapi dikuasai

harus diartikan sebagai “diatur”. Maka dengan kata “penguasaan” yang ditafsirkan secara operasional menjadi “diatur” , setelah melalui pengaturan oleh pemerintah, “barang dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”, dan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” boleh menjadi milik orang seorang, atau eksploitasinya dikuasakan kepada orang seorang dengan perolehan laba buat orang perorang itu. Maka kita saksikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta sudah berusaha dalam bidang-bidang jalan tol, telekomunikasi, listrik, pengelolaan pelabuhan, perusahaan penerbangan, dan *public utilities* lainnya. Ada pun dalam bidang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kita saksikan adanya kayu, emas, dan pulau-pulau yang pengelolaan atau pemilikannya di tangan swasta. (Gie, 1999: 24)

Kondisi tersebut seolah-olah, bagaikan gayung bersambut, dimana praktik kapitalisme tumbuh dengan subur, akhirnya upaya untuk mendominasi atau menguasai ekonomi dilakukan oleh para pengusaha, untuk merealisasikan hal tersebut pengusaha masuk kedalam sistem pemerintahan dengan melakukan lobi-lobi serta praktik-praktik suap, yang akhirnya menjadi bagian dari tindak pidana korupsi, seperti praktik-praktik Gratifikasi yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara.

Praktik-praktik seperti suap, dan gratifikasi banyak disinyalir sebagai efek domino dari praktik pemberian upeti yang telah mengakar, sehingga sulit sekali untuk di berantas dan dimusnahkan, karena memecahkan permasalahan tersebut harus memerlukan tindakan konkret dan berkesinambungan agar perkembangan dari praktik pemberian upeti dapat dihentikan, sebagai kebiasaan yang tidak sesuai dengan realitas Indonesia kekinian. Beberapa hasil penelitian maupun tulisan-tulisan berkenaan dengan praktik pemberian upeti, antara lain memberikan penjelasan tentang bagaimana praktik pemberian upeti bertransformasi atau berubah bentuk menjadi praktik-praktik pelanggaran hukum yang marak keberadaannya di Indonesia.

Permasalahannya, korupsi bukan hanya praktik politik atau praktik sosial, tetapi sudah menjadi praktik budaya di Indonesia. Pramoedya Ananta Toer pernah menyatakan para pejabat yang merupakan kepanjangan dari praktik para raja zaman feodal memang merasa berhak untuk mendapatkan upeti dari bawahannya dan sekaligus berkewajiban memberikan perintah. Oleh karena itu, para pejabat (dari struktur tertinggi hingga terendah) tidak pernah memiliki “*sense*” melayani dan sebaliknya, mereka merasa berkuasa untuk memerintah. Oleh karena itu, kata *government* diindonesiakan menjadi pemerintah, orang yang kerjanya hanya memberi perintah dan terima upeti. (Nurhadi, 2005: 1-3).



Sebagai gejala sosial korupsi merupakan masalah yang kompleks yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi dan budaya. Korupsi dipandang sebagai penyakit sosial, mengingat dampak korupsi ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Akan tetapi, sebagai penyakit sosial, permasalahannya tidak dapat disejajarkan dengan penyakit sosial lainnya seperti perjudian, prostitusi, narkoba dan kriminalitas. Berbeda halnya dengan penyakit sosial lainnya, korupsi merupakan penyakit sosial yang dengan mudah “menular” sebagai penyakit endemi. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, korupsi digambarkan seolah-olah sebagai penyakit sosial yang menyebar luas dimana-mana sehingga timbul anggapan telah membudaya. (Demartoto.2007: 89-102)

Kebobrokan birokrasi di republik kita sudah jamak dirasakan, telah mendarah daging dan beruratakar. Bagaimana mungkin birokrasi bisa mengurus keperluan publik jika mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu? KKN, struktur yang gemuk dan tidak efisien, profesionalisme rendah, minimnya gaji, dan cara pandang feodal merupakan wajah publik birokrasi kita, apa pun bidangnya. Reformasi birokrasi punkemudian menjadi soal mendesak yang banyak dibahas serta menjadi salah satu program pemerintah. (Werela, 2008: 1).

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sangat banyak yaitu kurangnya gaji, kultur tertentu, organisasi, pengawasan yang kurang baik, kelemahan ajaran agama dan etika, tiadanya penegakan hukuman yang keras, kurangnya pendidikan, kolonialisme dan sebagainya dari sebab – sebab ini. Ada tiga faktor yang dominan terjadinya korupsi yaitu: Faktor Sosial Budaya, Faktor Sosial Ekonomi dan Faktor Moral. (Salim, 2010:1)

Perilaku wartawan dalam menerima suap dari dua informan yang telah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yakni bahwa suap yang mereka terima pada prinsipnya karena ada tendensi tertentu. Sementara motif yang melatari terjadinya tindakan/praktik suap oleh keduanya adalah faktor ekonomi dan sosial. Mereka terdesak oleh suatu kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan lingkungan sosial yang turut mengamini perilaku tersebut. (Sari, 2011: 82-83)

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya, kedua adalah korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa (Revida, 2003: 1-6).

Kasus-kasus tersebut sebenarnya menimbulkan berbagai macam asumsi terhadap relefansi atau hubungan kondisi nyata saat ini dengan kondisi historis pada masa lampau, dimana terjadi pertarungan

kelas antara bangsawan dan rakyat, jelata, yang akhirnya mengantarkan dominasi kelas penguasa, hal tersebut akhirnya menimbulkan hegemoni dengan berbagai cara untuk membuat masyarakat jelata tunduk serta patuh pada kekuasaan, melalui paksaan atau konsensus, yang akhirnya melahirkan keteraturan yang diyakini kebenarannya.

Perkembangan dari proses pelembagaan praktik pemberian upeti di Indonesia telah berubah menjadi sebuah kebiasaan, sehingga dalam praktiknya sangat sulit untuk dipahami, yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi yang melahirkan tindakan melanggar hukum yang disebut korupsi dengan berbagai macam model, seperti suap dan gratifikasi. Pemahaman ini memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak seperti masyarakat, pejabat pemerintah, ataupun lembaga-lembaga sosial, organisasi masyarakat, agar memahami tindakan yang melanggar hukum sebagai sebuah tindakan yang tidak boleh dijalankan karena akan merugikan banyak orang, termasuk diri kita, bangsa kita dan kepentingan bersama. Ilustrasi diatas memberikan gambaran bahwa Perlu kajian lebih mendalam mengenai pelembagaan praktik pemberian upeti.





Memahami Praktik pemberian Upeti di Indonesia, dalam tulisan ini akan membawa kita kedalam pemetaan periodisasi era atau zaman, sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang mendetail terkait dengan pola ataupun bentuk kemunculan Upeti di Indonesia. Pembatasan istilah ini dibuat agar kita tidak terhanyut dalam kajian – kajian yang berada di luar konsep Upeti, sehingga kita dapat memahami Upeti secara konkrit dan juga fokus.

A. Batasan Istilah

1. Pelembagaan

Istilah pelembagaan merupakan serapan dari bahasa asing Institutionalized merupakan kata dari bahasa Inggris, ata-kata tersebut memiliki beberapa pengertian, untuk memperjelas arti atau makna dari sesuai dengan arti pelembagaan akan saya uraikan, dalam penjelasan dibawah ini :

Kata transformasi merupakan serapan *transform /traens'fam/ kb.* Perubahan/pergantian bentuk.-kk. 1. Mengubah (bentuk), menjelmakan. *The New clothes transfrmedhim intoa handsome man.* Pakaian-pakaian yang baru itu mengubahnya menjadi seorang yang tampan. 2. Merobah. *To theat into energy* merobah panas menjadi tenaga. *Transformation /'traensfer'meisyen/ kb.* Perubahan (bentuk), transformasi (**into** menjadi). (Echols & Shadily, 1996 : 323

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman tentang makna pelembagaan, sebagai sebuah proses kebiasaan atau pembiasaan, dalam hal ini terkait dengan praktik pemberian upeti, yaitu adanya hubungan antara rakyat dengan negara ataupun aparaturnegara, dalam perspektif ilmu sosial akan tampak sebuah proes dimana kebiasaan memberikan upeti menjadi sebuah kebiasaan yang terlembaga, konsep pelembagaan jika kita uraikan secara lebih rinci, maka akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya pelembagaan upeti di Indonesia.

2. Upeti

Upeti merupakan corak yang khas dari kebudayaan masyarakat jaman kerajaan, dalam praktiknya istilah upeti, tidak digunakan dalam sistem pemerintahan modern, sehingga

istilah upeti tidak dikenal saat ini, akan tetapi dalam perkembangannya banyak sekali asumsi-asumsi yang berbeda-beda tentang konsep upeti, oleh karena itu penulis perlu menjelaskan apa sebenarnya praktik pemberian upeti itu.

Kosa kata yang menunjukkan praktik penyuapan sangat banyak. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *bribe* (suap), *graft* (pelicin), *embezzlement* (sogok), atau *fraud* (penggelapan). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa masalah suap bukan hanya di Indonesia atau di negara-negara berkembang, tetapi juga terdapat di negara-negara maju. Yang menjadi masalah ialah bahwa suap di Indonesia sudah memiliki akar budaya yang demikian dalam. Di dalam bahasa Indonesia, kosakata selain suap sangat banyak. Tetapi yang tampaknya paling memiliki akar budaya adalah istilah upeti, berasal dari kata *utpatti* dalam bahasa Sansekerta yang kurang-lebih berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk. (Kumorotomo, 2008: 1-2)

Upeti berarti 1). uang (emas dsb.) yang wajib dibayarkan (dipersembahkan) oleh Negara (-negara) kecil kepada raja atau negara yang berkuasa atau yang menaklukkan. 2). uang dsb. yang diberikan (diantarkan) kepada seorang pejabat dsb. dengan maksud menyuap. (Departemen pendidikan Nasional. 2008)

Penjelasan istilah upeti menurut Wahyudi Kumorotomo dan kamus besar bahasa Indonesia, memberikan gambaran yang sama terkait pemahaman istilah upeti, sehingga dapat diringkas bahwa upeti merupakan sebuah pemberian bisa berupa uang atau emas, yang dulu diberikan kepada raja atau kerajaan, serta diberikan kepada pejabat ataupun kepada aparat pemerintah dengan tujuan tertentu, tujuannya sendiri yakni sebagai simbol dari sebuah kapatuhan rakyat jelata terhadap raja atau kerajaan, dalam tataran praktisnya upeti juga dapat diartikan sebagai suap, serta pelicin yang dikhususkan kepada para pejabat atau aparat pemerintah.

Penjabaran mengenai konsep pelembagaan upeti, menerangkan perihal terkait bagaimana proses pelembagaan praktik pemberian upeti, dari dahulu hingga saat ini, dalam bentuk praktisnya, sehingga akan diketahui secara sistematis atau runut. Supaya mendapatkan penjelasan yang komplit, maka perlu kita periodisasi era atau zaman, agar upeti bisa dipotret secara utuh, dan menemukan pola – pola serta bentuk yang bisa menjelaskan proses terbentuknya.



3. Periode sejarah

Periodisasi era akan memberikan kita gambaran tentang perjalanan dan perkembangan sejarah bangsa Indonesia, didalam pembabakan nantinya akan di buat, kategorisasi perkembangan jaman, diantaranya melalui faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial, politik, serta kultural bangsa, seperti periodisasi jaman menurut Sartono Kartodirjo dapat dibagi menjadi berbagai periodisasi seperti berikut ini.

1). Jaman Pra sejarah. 2). Jaman Kuno (Masa kerajaan-kerajaan tertua.Masa Sriwijaya dari abadVII sampai abad XIII atau XIV. Masa Majapahit dari abad ke XIV sampai abad XV. Masa Peralihan abad XV). **3). Jaman Baru** (Masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate/Tidore, sejak abad XVI), Masa perlawanan terhadap imperialisme Barat (abad XIX), Masa Pergerakan Nasional (Abad XX), Masa Republik Indonesia (sejak 1945). (Gazalba, 1966:194)

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia seperti yang dipaparkan diatas, bisa diawali dari era prasejarah, yang memberikan gambaran terkait pola kehidupan masyarakat di waktu itu, dimasa itu konsep *nomaden* atau pindah – pindah menjadi cirri utama, alam memeberikan segalanya, makanan, tempat tinggal dan juga kehidupan, serta kehidupan religius, mereka tinggal secara berkelompok dengan ukuran atau skala kecil, berburu merupakan cara mereka memepertahankan hidup, praktik religius sangat lekat dengan menyembah pohon dan batu sebagai model *animism* dan *dinamisme*.

Pembabakan yang kedua adalah era sejarah dimana jaman ini kehidupan didominasi oleh kerajaan – kerajaan yang sangat lekat dengan kultur agama Budha, Hindu dan Islam, selain itu karakteristik lokal juga menjadi ciri khas kehidupan masyarakat kita. Peralihan masa dari kerajaan – kerajaan Budha ke Hindu ditandai dengan adanya peperangan antar kerajaan, dan masuknya suku – suku bangsa dari India dan Cina, yang menyebarkan ajaran agama tersebut, sehingga ada masa peralihan atau pergantian kepercayaan. setelah sekian lama kemudian Ajaran Islam mulai masuk ke bumi nusantara melalui jalur – jalur perdagangan laut, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India, yang kemudian banyak merubah tatanan kehidupan raja – raja di Pulau Jawa.

Sementara itu arus kolonialisasi mulai merebak ke seantero dunia, kaetika di Eropa mengalami krisis finansial, beberapa ahli diutus oleh para saudagar dan kerajaan di Eropa untuk mencari sumber – sumber alam baru di luar daratan Biru,



Islam yang datang lebih dahulu yang mulai banyak merubah kehidupan masyarakat Nusantara, kemudian memasuki era di mata para pedagang dan Ilmuan mulai mendarat di berbagai pulau di pesisir Nusantara, alhasil mereka setelah kembali ke negaranya menarik beberapa ekspansi besar – besaran bangsa Eropa ke Nusantara, disinilah kemudian dimulai kolonialisasi, yang diawali oleh bangsa Portugis, kemudian dilanjutkan oleh bangsa – bangsa Belanda dan Inggris. Tidak hanya sampai distu, bangsa Asia timur juga mulai melakukan ekspansi setelah sekian lama nusantara dikuasai oleh kerajaan Hindia Belanda, diantaranya kekaisaran Jepang, yang membutuhkan sumber kekayaan baru untuk emmbiayai perang yang sedang dilakukan di dunia.

Masa kolonialisasi merupakan masa – masa paling berat bangsa ini, masa – masa perjuangan di daerah yang sangat menguras tenaga dan juga pikiran, di era ini juga kemudian muncula tokoh – tokoh nasional yang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajahan. Perjuangan memperoleh kemerdekaan kemudian telah tercapai, disinilah kemudian bangsa Indonesia terbentuk dan menyempurnakan bentuk dan dasar Negara, di era ini pergolakan juga terjadi ketika berbagai elit mulai melakukan perang ideology guna menancapkan pengaruhnya masing – masing. Berbagai pemberontakan juga terjadi ideology, nasionalis, komunis dan agamis berkompetisi untuk menjadi pemenang, berbagai peristiwa pun terjadi Pemberontakan Permesta, G30S – PKI, dan berbagai kudeta coba dilakukan dan peristiwa historis mulai bergulir dan silih berganti. Era kemerdekaan kemudian beralih ke zaman dimana kalangan Nasionalis mulai menguasai, di era ini lebih dikenal dengan masa pemerintahan orde baru dan orde lama dibawah pimpinan Jendras Soeharto yang melakukan gerakan Pancasila, dengan karakteristik kepemimpinan Militer yang menjadi cirri khasnya.

Seiring dengan perjalanan sejarah, pemerintahan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 Tahun dimasa itu, pemerintahan dijalankan secara sentralistik dan militerisme, kondisi tersebut pada ujung ekepemimpinannya memabawa pada kondisi perekonomian yang sulit, kemudian berbagai lini atau elemen masyarakat sudah mulai muak dan juga tidak lagi percaya sehingga terjadi aksi besar – besaran pada tahun 1998 untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa, kemudian setelah lengsernya Presiden Soeharto akhirnya bangsa ini memasuki era reformasi, dimana terjadi perombakan besar – besaran dalam sistem pemerintahan Indonesia, namun kondisi tersebut masih tidak stabil, hingga terjadi pemilihan presiden hingga berkali –



kali, belum juga merasakan efek kesejahteraan. Fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme dirasakan malah semakin tidak terkontrol, alhasil banyak kepala daerah dan pejabat tinggi yang terkena kasus, hingga birokrasi dan aparatur pemerintah menjadi sorotan yang paling utama, ketika kondisi Negara terpuruk karena praktik – praktik KKN.

4. Identifikasi Pelembagaan Upeti, menjadi Suap dan Gratifikasi

Praktik Upeti yang telah dijumpai pada era kerajaan – kerajaan Nusantara, kemudian dalam perkembangannya ada indikasi menjadi terlembaga, melalui praktik – praktik yang selaras dengan perubahan jaman, dengan berbagai bentuk dan versi, namun disitu bisa kita lihat karakteristik, pola – pola, motif dibalik itu, seolah meengaskan bahwa upeti kemudian berkembang dengan berbagai bentuk dan model, seperti suap, gratifikasi ataupun melahirkan model – model baru yang tidak ada penamaannya. Pemaparan tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan dari perkembangan serta pelembagaan upeti, dari dahulu hingga saat ini. Fenomena itu Nampak jelas dalam kehidupan pemerintahan Indonesia, yang mana hal – hal tersebut hingga kini masih tetap lestari, dan diyakini bahwa itu sesuatu yang benar dan lumrah di kalangan masyarakat.

Dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisma. Para adipati memberikan persembahan kepada raja penakluk. Sebagai imbalannya, raja penakluk memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh para adipati tersebut. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia. Dalam disertasi klasiknya yang berjudul *The Making of A Bureaucratic Elite* (1979), Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola *patron-client* di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau *pamong-praja* di Indonesia. (Kumorotomo, 2008 : 2)

Upeti dari penjelasan diatas, merupakan sebuah persembahan yang diberikan oleh rakyat kepada raja atau kerajaan penakluk, sebagai bentuk atau tanda penaklukan yang

dilakukan oleh kerajaan terhadap daerah yang telah di taklukan. Tidak hanya itu Upeti terkadang dijadikan sebagai instrument kesetiaan sebuah wilayah terhadap rajanya, bentuknya bisa berupa uang atau pun hasil panen yang dimiliki. Dalam literature sejarah Upeti juga dijadikan sebagai symbol pemberian perlindungan raja terhadap rakyat, misalnya seorang adipati, kemudian rakyat memberikan hasil panen atau simpanan uang yang dimilikinya. Jika diuraikan tindakan tersebut memiliki beberapa alasan, diantaranya, sebagai berikut:

Upeti terjadi karena beberapa faktor: pertama, si pemberi (rakyat) merasa takut terhadap penguasa; atau adanya suatu harapan tertentu dari si pemberi terhadap penguasa, misalnya ingin memperoleh nama, ingin memperoleh “ganjaran” dari penguasa misalkan pangkat atau “hadiah” lainnya; pemberian upeti ditujukan kepada raja bukan kerajaan (sifatnya perorangan, bukan bersifat institusional); upeti tidak ditentukan besarnya maupun waktunya seperti halnya pajak; upeti pada umumnya berupa barang-barang pilihan, sedang pajak tidaklah demikian. kalau pajak merupakan hubungan formal antar perorangan/kelembagaan dengan kerajaan, maka upeti merupakan hubungan informal antar perorangan yaitu pemberi dengan yang diberi yang mempunyai kekuasaan. (Shindudharmoko, 2001:1-2)

Munculnya Upeti dari berbagai latarbelakang kondisi sejarah, pada akhirnya melahirkan pemaknaan yang ebrbeda – beda, yang kemudian menghasilkan bentuk pelembagaan upeti yang beraneka ragam, mialnya adanya suap, gratifikasi, namun dalam perjalananya tetap ada karakteristik serta pola – pola tertentu yang sama ataupun mirip, dari hal tersebut. Suap sebagai salah satu bentuknya, yang banyak berkembang di Indonesiamemiliki motif yang bergaam, ekonomi, tendensi jabatan atau kekuasaan, dan lain sebagainya.

Muladi (Alkostar, 2008 :10) menjelaskan, suap (*bribery*) bermula dari kata *briberie* (Prancis) yang artinya *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandang). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya ‘*a piece of bread given to beggar*’ (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Seiring dengan berjalannya waktu, *bribe* bermakna “sedekah’ (*alms*), *blackmail* atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup.



Tidak jauh berbeda, Campbell (Alkostar, 2008: 10) *bribery* juga bisa berarti *the offering, giving, receiving or soliciting of something of value for the purpose of influence the action an official in the discharge of his of her public or legal duties*. Penawaran, pemberian, penerimaan atau pengumpulan sesuatu yang berharga dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya secara umum atau legal.

Praktik suap yang dijelaskan di atas, memberikan pemahaman tentang sebuah perbuatan terkait dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan dengan maksud atau tujuan untuk mempengaruhi secara jahat dan korup atau juga bentuk penawaran, pemberian, penerimaan atau pengumpulan sesuatu yang berharga dnegan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya secara umum atau legal.

Negara Indonesia mengatur suap sebagai salah satu bentuk kejahatan korupsi, seperti yang di jelaskan dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan kedalam 30 jenis tidak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara gamblang mengenai perbuatan yang bisa dikenalkan sanksi pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi itu dikelompokan menjadi tujuh: 1). Kerugian keuangan negara, 2). Suap menyuap, 3). Penggelapan dalam jabatan, 4). Pemerasan, 5). Perbuatan curang, 6). Benturan dalam pengadaan, 7). Gratifikasi.

Seperti penjelasan di atas, suap merupakan tindak pidana korupsi dengan berbagai macam bentuk seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang no 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibanya. b). Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (KPK. 2006:31-33).

Penjelasan tentang suap sebagai tindak pidana korupsi, yakni bentuk suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara Negara (*aparatur pemerintah*) supaya pegawai tersebut melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya.

Selain bentuk tersebut ada juga beberapa bentuk tindak pidana suap, seperti yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf a dan b Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang no 20 Tahun 2001, seperti berikut: a). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentang dengan kewajibannya. b). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penjelasan mengenai tindak pidana suap, juga terdapat dalam pasal 11 Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang no 20 Tahun 2001, seperti berikut: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Tindak pidana suap yang berikutnya berkenaan dengan penegak hukum atau hakim dan advokat, yang diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang Undang- undang no. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang no 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b: a). member atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili. b). memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan yang berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk di adili. Pasal 6 ayat (2). Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau avokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana ayat 1 huruf b. Pasal 12 huruf c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui, atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 12 huruf d. seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang



pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (KPK. 2006:45-54).

Dari kesemua tindak pidana suap yang dijelaskan berdasarkan undang-undang merupakan bentuk-bentuk suap yang pertama pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b tentang (menyuap pegawai negeri adalah korupsi), pasal 13 tentang (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi), pasal 5 Ayat (2) tentang (pegawai negeri menerima suap adalah korupsi), pasal 12 huruf a tentang dan b tentang (pegawai negeri menerima suap adalah korupsi), pasal 11 tentang (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi) Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang (menyuap hakim adalah korupsi) dan b tentang (menyuap advokat adalah korupsi), Pasal 6 ayat (2) tentang (hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi), Pasal 12 huruf c tentang (hakim menerima suap adalah korupsi), pasal 12 huruf d tentang (Advokat menerima suap adalah korupsi).

Banyak diantara kita yang belum pernah mendengar istilah Gratifikasi, atau bahkan lebih populer Istilah Korupsi ketimbang Gratifikasi, sebenarnya gratifikasi merupakan sebuah contoh kecil dari praktek korupsi, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dari dampak yang telah ditimbulkan dari tindakan gratifikasi, apa sebenarnya yang disebut gratifikasi, akan kita paparkan dibawah ini.

Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan pasal 12b ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001, bahwa: *"yang dimaksud dengan " gratifikasi " dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".* (Muhardiansyah dkk, 2010: 3)

Istilah gratifikasi yang dimaksud dalam penegasan istilah ini merupakan penjabaran, dari tindakan seseorang, kelompok ataupun komunitas dengan wujud memberikan sesuatu yang sifatnya luas atau lebar dalam pengertiannya. Pemberian tersebut



bisa berupa uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Makna gratifikasi ini, menjadi sangat jelas arahnya ketika, siapa yang memberi dan apa yang diberikan serta tujuan diberikannya untuk apa dapat terjawab, maka gratifikasi ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tidak. Definisi tersebut, telah memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya gratifikasi itu sendiri, dan apa saja jenis-jenisnya serta motif-motif yang melatarbelakangi pemberian gratifikasi. Selengkapnya mengenai perbedaan karakteristik antara hadiah yang legal dan ilegal dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Perbedaan hadiah legal dan ilegal

Karakteristik	Hadiah Legal	Hadiah Ilegal
Tujuan / Motif Pemberian	Dilakukan untuk menjalankan hubungan baik, menghormati martabat seseorang, memenuhi tuntutan agama, dan mengembangkan berbagai bentuk perilaku simbolis (diberikan karena alasan yang dibenarkan secara sosial)	Ditujukan untuk mempengaruhi keputusan dan diberikan karena apa yang dikendalikan / dikuasai oleh penerima (wewenang yang melekat pada jabatan, dan sumber lainnya).
Hubungan antara pemberi dan penerima *	Setara	Timpang
Hubungan yang bersifat strategis**	Umumnya tidak ada	Pasti ada
Timbulnya konflik kepentingan	Umumnya tidak ada	Pasti ada
Situasi pemberian	Acara – acara yang bersifat sosial berakar pada adat istiadat dan peristiwa kolektif	Bukan merupakan peristiwa kolektif meski bisa saja pemberiannya diberikan pada acara sosial.



Karakteristik	Hadiah Legal	Hadiah Ilegal
Resiprositas (sifat timbal balik)	Bersifat ambigu dalam perspektif bisa resiprokal dan kadang – kadang tidak resiprokal.	Resiprokal secara alami
Kesenjangan waktu	Memungkinkan kesenjangan waktu yang panjang pada saat pemberian kembali.	Tidak memungkinkan adanya kesenjangan waktu yang panjang
Sifat Hubungan	Aliansi sosial untuk pengakuan sosial.	Patronase dan seringkali nepotisme dan ikatan serupa ini penting untuk mencapai tujuan.
Ikatan yang terbentuk	Sifatnya jangka panjang dan emosional.	Sifatnya jangka pendek dan transaksional.
Kecenderungan adanya sirkulasi barang dan produk	Terjadi sirkulasi barang dan produk.	Tidak terjadi sirkulasi barang dan produk.
Nilai atau harga dari pemberian	Menitikberatkan pada nilai intrinsik sosial.	Menekankan pada nilai moneter.
Metode pemberian	Umumnya langsung dan bersifat terbuka.	Umumnya tidak langsung (melalui agen atau perantara) dan (bersifat tertutup dan rahasia)
Mekanisme penentuan nilai dan harga	Berdasarkan kewajaran / kepatutan secara sosial (masyarakat)	Ditentukan oleh pihak – pihak yang terlibat.
Akuntabilitas sosial	Akuntabel dalam arti sosial	Tidak akuntabel secara sosial.

Ket: dikutip dari Mudiansyah 2010: 14-15

*Ada tiga model hubungan: (1) vertikal-dominatif (seperti hubungan atasan-bawahan); (2) diagonal (seperti petugas layanan publik-pengguna layanan publik); dan (3) setara (seperti antara teman dan antar tetangga); Dua yang pertama adalah relasi-kuasa yang timpang.

** Strategis artinya berkenaan dengan/menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketimpangan strategis ini biasanya antar posisi strategis yang berhubungan lewat hubungan strategis. Sebagai contoh adalah hubungan antara seseorang yang menduduki posisi strategis sebagai panitia pengadaan barang dan jasa dengan peserta lelang pengadaan barang dan jasa. Pada posisi ini terdapat hubungan strategis di mana sebagai panitia



pengadaan barang dan jasa seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan pengalokasian/pendistribusian aset-aset sumberdaya strategis yang dipercayakan kepadanya pada pihak lain, sedangkan dilain sisi peserta lelang berkepentingan terhadap sumberdaya yang dikuasai oleh panitia tersebut. (Ibid, 2010: 14-15)

Penjelasan tentang Proses pelembagaan praktik pemberian upeti khirnya memberikan gambaran mengenai arti serta makna yang sebenarnya, akan tetapi walaupun secara etimologi, istilah-istilah tersebut memiliki definisi yang sama, akan tetapi untuk memperjelas pemahaman mengenai konsep tersebut maka dapat kita indentifikasi upeti, suap dan gratifikasi secara detail, agar pemahaman yang sudah terbentuk dapat lebih lengkap dan detail.

B. KONSEP PELEMBAGAAN UPETI

Fenomena upeti sebagai bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat yang ada, menggambarkan fenomena yang perlu dikaji secara ilmiah, untuk memberikan konstruksi terhadap realitas sehingga kita kaan lebih mudah dalam memahami hal tersebut, secara teoritik.

1). Pelembagaan praktik pemberian Upeti

Penjelasan-penjelasan tentang praktik Pelembagaan pemberian upeti, telah berlangsung ketika jaman kerajaan, upeti merupakan bentuk atau tanda kesetian yang diberikan dari rakyat kepada negara dalam hal ini kerajaan atau raja. Praktik pemberian upeti tersebut didasarkan atas otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh raja atau kerajaan terhadap rakyatnya, konsep kekuasaan tersebut memiliki berbagai macam bentuk dan model seperti penjelasan berikut.

Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma (daya tarik atau *Mahabbah*), yaitu kemampuan seorang yang dianggap sebagai anugrah Tuhan yang maha kuasa. Wewenang Kharismatik dapat berkurang, jika ternyata individu yang memilikinya berbuat kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat atau melakukan kesalahan yang dianggap melanggar nilai-nilai dan norma tertentu didalam masyarakat. (Setiadi dan Kolip, 2011: 767)

Wewenang (*otoritas*) adalah konsep mengenai pengkultusan atau penghormatan terhadap raja sebagai Wali Tuhan di muka Bumi, kemudian mengokohkan asumsi – asumsi di



kalangan masyarakat terkait keberadaan raja sebagai pengadil atau pembuat keputusan, yang keputusannya merupakan keputusan Tuhan, sehingga keabsahannya tidak dapat diragukan atau sifatnya mutlak. Konsep ini yang kemudian sekali lagi memberikan pengesahan terhadap kekuasaan raja sehingga instrument kebijakan raja melalui titah – titah nya menjadi kekuatan yang tidak dapat di nafikan, konsep *kawula* dan *Gusti* kemudian tumbuh subur dan berkembang, yang kemudian memberikan tempat kepada raja dan juga keluarga bangsawan sebagai lapisan masyarakat yang memiliki kelas tinggi karena kalangan bangsawan telah diberikan karunia oleh Tuhan sebagai golongan yang istimewa dan tidak semua orang diberikan karunia tersebut.

Penghargaan atau penghormatan yang diberikan kepada kelas bangsawan dari rakyat jelata, akhirnya memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran sistem kelas, dimana rakyat jelata mempercayakan kehidupan dunia dan akhiratnya kepada raja sebagai pemimpinnya, kondisi ini yang kemudian memberikan dampak terhadap kehidupan rakyat jelata, hal tersebut dilihat sebagai sebuah kewajiban bagi rakyat untuk memberikan timbal-balik dalam bentuk penghormatan dan pengabdian kepada raja, melalui praktik- praktik pemberian upeti seterbentuk dan terbangunlah kesetiaan dan bukti loyalitas rakyat jelata terhadap kerajaan dan raja yang memimpinnya.

Praktik pemberian upeti sebenarnya merupakan tatanan spiritual masyarakat Indonesia, tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dimana terdapat wali atau wakil Tuhan dimuka bumi untuk memberikan pencerahan serta jalan menuju surgawi, akan tetapi dalam perjalananya konsep pemberian upeti ternyata memberikan ruang terhadap pelanggaran sistem kelas, dimana adanya dominasi kelas bangsawan untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.

Wewenang yang dimiliki suatu pemerintahan negara, dapat saja dipertanyakan apakah memiliki keabsahan atau tidak, misalnya bila ada kabinet demisioner pada suatu sistem pemerintahan negara, lalu berdiri kabinet tandingan sebagai kabinet bayangan apakah masyarakat mempercayainya dan mengakuinya. Mempertanyakan keabsahan wewenang dari seseorang atau sekelompok orang, berarti membicarakan pula norma, nilai dan budaya. Apakah sekelompok orang-orang yang berkuasa, lalu dengan begitu saja pada akhirnya dianggap bangsawan yang berdarah biru. Kasta-kasta dan derajat keningratan adalah salah satu contoh akibat yang dihasilkan kekuasaan turun temurun

yang muncul dalam masyarakat, sebagaimana telah diuraikan di muka. (Syafiie, 2001:104)

Pelanggaran sistem kelas terlihat jelas, dalam kehidupan masyarakat, dimana seorang tokoh yang kharismatik seperti raja ketika menjumpai masyarakatnya, secara serentak masyarakatnya *mengelu – elukan* dan menyanjung rajanya seperti malaikat, yang turun dari nirwana. Kondisi tersebut terbawa hingga kini, tidak hanya berhenti disitu, akan tetapi terus berjalan mengikuti ruang-ruang perubahan dalam berbagai lini kehidupan di era modern saat ini. Sehingga melembagakan praktik pemberian upeti.

Praktik-praktik upeti sebagai bentuk penghormatan serta kesetiaan masyarakat kepada raja atau kerajaan, berubah seiring dengan perkembangan jaman, praktik-praktiknya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat kita jumpai dalam sistem pemerintahan modern dengan model negara, bagaimana *mainstream* dari para penyelenggara negara yang masih bersifat eksklusif dan ingin dilayani, karena pola pikir lama yang masih berkembang di kalangan birokrat beranggapan bahwa dirinya merupakan kelas atas atau kerabat bangsawan yang memiliki strata lebih tinggi dari masyarakat biasa, yang wajib dilayani bukan melayani. Sehingga proses pelembagaan praktik pemberian upeti masih diharapkan oleh birokrat sebagai bentuk persembahan karena kekuasaan dan status sosial yang dimilikinya. Kondisi tersebut sebenarnya banyak dipengaruhi oleh paradigma - paradigma lama yang berkembang di masyarakat tentang budaya patron klien, yang seharusnya sudah dihilangkan karena tidak sejalan dengan perkembangan jaman dan merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam disertasi klasiknya yang berjudul *The Making of A Bureaucratic Elite* (1979), Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola *patron-client* di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau *pamong-praja* di Indonesia. (Kumorotomo, 2008: 2)

Bentuk perubahan dari sistem pemerintahan tradisional menuju sistem pemerintahan modern ternyata masih diwarnai dengan pelembagaan dari praktik-praktik pemberian upeti dengan bentuk dan format baru dan orientasi yang berbeda, hal ini bisa kita lihat dari maraknya praktik-praktik seperti suap dan



gratifikasi, perbedaannya di jaman dulu (tradisional) hal ini dianggap legal, akan tetapi saat ini hal tersebut dianggap illegal, sebagai bentuk pelanggaran hukum, yang merugikan banyak pihak.

Proses pelembagaan praktik pemberian upeti dalam kehidupan modern menjadi permasalahan karena dianggap merusak tatanan kehidupan, hal ini disebabkan karena praktik-praktik tersebut banyak yang disalahgunakan, hal ini jika kita uraikan dilatarbelakangi oleh adanya proses pelembagaan dari praktik pemberian upeti sebagai sebuah kebiasaan masyarakat, yang akhirnya menjadi pembenaraan atau (*justification*) terhadap praktik-praktik seperti gratifikasi dan suap. Perbuatan tersebut melanggar hukum karena mengharapkan imbal balik tertentu, dari tindakan yang telah dilakukan, hal ini memberikan gambaran tentang tendensi dibalik sebuah tindakan yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan, hal ini berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang sering dilakukan oleh para pejabat, sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang lumrah ketika terjadi di pada era kerajaan atau rezim otoriter pada era orde lama dan orde baru, karena pemerintahan yang dijalankan masih bersifat paternalistik dan terpusat, hal tersebut bisa dilihat dari bentuk-bentuk otoritas yang dimiliki dan diperoleh yang berkembang pada sistem pemerintahan dan sosial budaya Indonesia.

2) Reiventing Government

Bentuk-bentuk otoritas yang dimiliki oleh para pejabat, memberikan arahan terhadap penyalahgunaan wewenang, sehingga efeknya akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan bernegara di bidang sosial, politik, ekonomi serta hukum, sehingga akan menghambat laju demokrasi terutama berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari praktek-praktek seperti suap dan gratifikasi, kondisi tersebut akan berdampak terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara, sehingga akan menyulitkan dalam penciptaan *Good Governance*, karena berbagai benturan-benturan kepentingan yang banyak dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih *Good Governance*, karena upaya yang maksimal tentang perwujudan konsep ideal tersebut sangat sulit diwujudkan karena akan menempatkan 3 (tiga) aktor utama yaitu *State* (Negara), *Civil Society* (Masyarakat sipil), *Private Sector* (Kalangan ekonomi atau pengusaha) pada posisi yang seimbang, sebagai sebuah alternatif mungkin *Reinventing Government*, dapat dijadikan sebuah solusi dalam perwujudan format Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.



Reinventing Government / pemerintahan yang efisien dan efektif ... analisis kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan *Reinventing Government* karena melibatkan manusia (bersih dan berwibawa), sistem dan teknologi dan teknologi (*hardware*, *software*, *brainware*, dan *profesionalisme*). Dan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat (sebagai *output*) artinya kesadaran akan tanggungjawab, yaitu *responsibility as accountability* (yang berkaitan dengan perintah dan laporan), *responsibility as obligations* (yang berkaitan dengan janji dan posisi), dan *responsibility as cause* (yang berkaitan dengan dengan *free will/choice*) yang kedua terakhir ini ada kaitanya dengan *Reward and punishment*. (Ndraha, 2005: 111)

Reinventing Government menggambarkan tentang mekanisme dalam menjalankan pemerintahan secara manusiawi, dengan menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, poin ini akan memberikan harapan baru ditengah bobroknya sistem pemerintahan kita, karena rongrongan pejabat yang korup dan semena-mena, konsep ini juga menekankan profesionalisme yang selaras dengan kemajuan teknologi, sehingga faktor penyebab korupsi dapat ditekan, karena minimalisasi peran manusia dalam sistem. jika hal itu terwujud, maka akan tercipta kepercayaan dari masyarakat, yang selama ini telah hilang ditelan waktu dan apatisme pemerintah terhadap persoalan rakyat.

Reinventing Government menggambarkan tentang mekanisme dalam menjalankan pemerintahan secara manusiawi, dengan menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, poin ini akan memberikan harapan baru ditengah bobroknya sistem pemerintahan kita, karena rongrongan pejabat yang korup dan semena-mena, konsep ini juga menekankan profesionalisme yang selaras dengan kemajuan teknologi, sehingga faktor penyebab korupsi dapat ditekan, karena minimalisasi peran manusia dalam sistem. jika hal itu terwujud, maka akan tercipta kepercayaan dari masyarakat, yang selama ini telah hilang ditelan waktu dan apatisme pemerintah terhadap persoalan rakyat.

3) Birokratisasi

Tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara profesional, menyatakan pentingnya proses Birokratisasi, sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, hal ini merujuk kepada konsep birokrasi ideal yang digagas oleh Max Webber



dibenturkan pada realitas birokrasi yang identik dengan kondisi-kondisi yang tidak efektif, efesien serta mekanisme yang semrawut dan berbelit-belit. Menurut Max Weber (Said, 2010:1) birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu, didasarkan aturan tertulis, oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

Melihat kondisi pemerintahan saat ini, yang sedang menghadapi permasalahan ketatanegaraan yang rumit, perlu adanya upaya birokratisasi. Birokratisasi merupakan proses menjalankan prinsip-prinsip birokrasi, dalam arti proses pembirokrasian lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan prinsip birokrasi ideal, yaitu perubahan dari birokrasi tradisional menjadi legal-rasional, serta perubahan dari personal administratif menjadi impersonal administratif. Birokratisasi juga dilaksanakan sebagai upaya mengembalikan fungsi birokrasi sebagai pelayan publik. Birokratisasi juga diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan seperti peningkatan jumlah penduduk, pesatnya kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat akan kesejahteraan.

C. KONSTRUKSI TEORITIS

Kondisi bangsa yang sedang sakit, karena diterpa krisis kepercayaan menjadikan bangsa Indonesia semakin terpuruk, karena tidak adanya saling ketidakpercayaan antar masyarakat, masyarakat terhadap pemimpin, dan yang paling buruk adalah tidak adanya kepercayaan antar pemimpin, yang terlihat adalah tindakan-tindakan yang saling menjatuhkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi maupun golongan. Realita tentang kondisi Indonesia saat ini, memperlihatkan lemahnya moral dan semangat nasionalisme dalam upaya rekonsiliasi pasca reformasi yang seolah-olah tidak berpenghujung.

Kondisi ini diperparah dengan rusaknya moralitas para *state apparatus* dan politisi di negri Indonesia, yang sibuk dengan kepentingan pribadi demi mencapai tujuannya, dengan cara-cara yang tidak halal, padahal figur-figur tersebut merupakan generasi-generasi penerus dari cita-cita bangsa yang telah digagas oleh para *Founding Father*, hal ini juga membuktikan ketidakmampuan sosok-sosok tersebut untuk menjadi pilar-pilar kokohan sebuah bangsa. Realitas yang terjadi bukan prestasi yang diukir akan tetapi *image* buruk tentang kebobrokan dan kemuduran bangsa Indonesia.

Lembaran-lembaran suram bangsa ini kemudian dicatat dengan indeks prestasi korupsi yang sangat tinggi dari perilaku putra bangsa melalui praktik-praktik suap dan gratifikasi, sehingga tidak

mengerankan ketika tayangan-tayangan televisi lokal maupun nasional menyiarkan berita-berita tentang para pejabat dan politisi yang tertangkap karena terkena kasus-kasus suap dan gratifikasi, sebagai sebuah pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Berbicara mengenai praktik-praktik suap dan gratifikasi yang saat ini marak terjadi, penyebabnya tidak hanya permasalahan kepentingan saja, akan tetapi jika kita runut kebelakang, memiliki hubungan yang erat dengan sistem sosial masyarakat mengenai pelanggaran sistem kelas dalam struktur masyarakat Indonesia ketika era Nusantara, bagaimana tatanan kelas menjelaskan dominasi kaum bangsawan atau *priyayi* sebagai kelas atas yang ingin menghegemoni rakyat jelata dengan konsep-konsep spiritual, mengenai hakikat kedudukan bangsawan yang dianggap sebagai wali atau wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga kondisi tersebut diyakini oleh sebagian masyarakat, sebagai bentuk kewajiban untuk patuh dan hormat kepada kaum bangsawan melalui praktik-praktik upeti.

a) **Pelembagaan praktik pemberian Upeti sebagai bentuk hegemoni negara**

Ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas penyelenggara negara yang dilaksanakan oleh pejabat serta lembaga birokrasi, disebabkan karena faktor teknis saja akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial historis, dimana hal itu merupakan wujud ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk merubah paradigma atau *mindset* (pola pikir) yang selama ini terbentuk. Konstruksi tersebut merupakan hasil karya para bangsawan lokal dan ekspatriat Belanda terhadap kenyataan sosial, ekonomi, budaya, yang melanggar praktik kasta atau sistem kelas, hal itu bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh kaum bangsawan terhadap masyarakat jelata.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan professional, tidak dapat terwujud karena maraknya praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara yang merupakan bentuk dari perilaku yang menyimpang dan cenderung merugikan, dalam hal ini adalah tindakan pemanfaatan jabatan, untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri dan sebagainya yang dianggap sebagai tindak kejahatan korupsi, Praktik itu sering dinamakan sebagai suap dan gratifikasi.

Realitas sosial budaya tersebut, kemudian memberikan penjelasan tentang bagaimana kasus-kasus korupsi khususnya suap dan gratifikasi di Indonesia dapat terjadi dan berkembang dengan pesat, mengikuti perubahan jaman serta keadaan sosial, ekonomi, politik. Kondisi tersebut nampak sekali, karena ada Dominasi kelas yang dilakukan para kaum bangsawan atau



bourgeois terhadap kaum *proletar* ketika jaman kerajaan hingga jaman pertengahan, bahkan hingga saat ini. Proses pelembagaan praktik pemberian upeti merupakan bentuk-bentuk hegemoni yang dilakukan oleh kaum bangsawan terhadap rakyat jelata, hal ini memiliki korelasi yang kuat dengan awal diberlakukannya upeti, sebagai bentuk atau tanda kesetiaan kepada raja atau kerajaan yang merupakan konsep dasar yang diusung dalam pelaksanaan praktik upeti, akan tetapi perkembangan budaya ini juga dikokohkan melalui proses sosial dan politik pemerintah kolonial Belanda, sebagai bentuk legitimasi otoritas atau kewenangan kaum priyayi terhadap rakyat jelata akhirnya menimbulkan hegemoni, yang mengakibatkan ketertundukan rakyat jelata kepada kelas bangsawan, melalui praktik-praktik pemberian upeti.

Pelaksanaan dari bentuk-bentuk otoritas atau kewenangan tersebut, memberikan sebuah landasan historis tentang dominasi suatu kelas terhadap kelas yang lain atau lebih dikenal dengan konsep hegemoni. Konsep hegemoni yang digambarkan oleh Gramsci bermuara pada pandangan-pandangan yang mengkritisi pemikiran Marxian, yang didasari atas dua asumsi besar yaitu Dialektika Materealis dan Dialektika Historis. Materialisme Historis adalah nama yang cukup tepat bagi anggapan-anggapan dasar teori yang diungkapkannya. Secara tradisional diasumsikan, bahwa tekanan yang diberikan oleh Marx terletak pada kebutuhan material dan perjuangan kelas akibat usaha pemenuhan kebutuhan tersebut. Menurut Marx suatu pemahaman ilmiah yang dapat diterima mengenai gejala sosial menuntut ilmiahwan untuk mengambil sikap yang benar atas hakikat permasalahannya. Hal ini mencakup pengakuan, bahwa manusia tidak hanya sekedar organisme materil semata, akan tetapi juga memiliki kesadaran subyektif tentang dirinya dan situasi-situasi materilnya. Tekanan materialisme Marx harus dimengerti lewat reaksi terhadap interpretasi idealistik mengenai sejarah. Diterapkannya pola perubahan sejarah yang luas berpusat pada perubahan cara atau teknik produk materil sebagai sumber utama perubahan sosial budaya. Perkembangan ini tentu mencakup teknologi baru, penemuan sumber baru, dan perkembangan baru lainnya dalam kegiatan produktif. Upaya yang lebih efisien tentu akan lebih banyak muncul, sehingga akan berkembang pula pertentangan dalam cara-cara produksi dan hubungan-hubungan produksi. (Purwanto, 2008:130-131)

Landasan teoritis yang dijelaskan diatas merupakan konsep teoritis Karl Marx yang menerangkan tentang dialektika Materialisme Historis yang memiliki anggapan-anggapan tentang

bagaimana kebutuhan material dan perjuangan kelas berakibat pada usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Kondisi tersebut akhirnya melahirkan sistem pertentangan kelas yang dianggap akan menciptakan aksi revolusi kaum buruh atau rakyat jelata karena bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis sudah tidak dapat ditolelir oleh kalangan proletar, sehingga terciptanya masyarakat sosialis yang diidam-idamkan oleh Karl Marx.

Titik tekan pada konsep *Historical Matrealism* ini adalah bila manusia ingin sukses dalam kehidupannya harus memiliki ekonomi dan menguasainya dengan baik atau dnegan kata lain, siapa yang menguasai ekonomi makaia akan berhasil menguasai yang lainnya.Prinsip-prinsip ekonomi merupakan dasar dalam pembentukan dan perubahan sosial.oleh karena itu manusia harus memiliki ekonomi dan mampu mengendalikanya secara baik. (Bahari, 2010: 6)

Pandangan tersebut ditampik oleh Gramsci dimana hegemoni yang berakar dari pemikiran sosialis, merupakan konsep dialektika materialis historis mengidam-idamkan masyarakat sosialis, melalui gerakan buruh yang bersifat revolusi, sehingga tercipta tatanan masyarakat komunis, akan tetapi Gramsci memiliki pandangan lain karena penciptaan situasi dan kondisi tidak mengarah kepada revolusi tetapi lebih bersifat *consensus* atau kesepakatan. Pandangan Gramsci yang berbeda ini, karena melihat terbangunnya sistem hegemonik yang dilakukan kaum *borjuis* atau priyayi dan negara, terus menerus berupaya untuk mengarahkan oposisi yang antagonistik menjadi kesalingesuaian, kondisi tersebut akan mengarahkan kepada hegemoni yang lebih kuat dan menciptakan kondisi *status quo*. Pandangan mengenai hegemoni yang diutarakan Gramsci memaparkan tentang definisi hegemoni menurut teoritisnya, bentuk-bentuk hegemoni, cakupanya, serta bagaimana hegemoni itu bisa terjadi.

Hegemoni (egemonia) menurut Gramsci bukanlah hubungan dominasi (*dominazione*) dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani yang berarti penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya, hegemoni dalam pengertian gramsci adalah sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan dilakukan melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Berbeda dengan Lenin, yang memahami hegemoni sebagai sebuah strategi untuk melakukan



revolusi yang dilakukan pada kelas dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas, Gramsci menambahkan dimensi baru dari pengertian hegemoni dengan memperluas cakupannya pada peran kelas kapitalis beserta anggotanya, baik dalam memperebutkan kekuasaan Negara maupun mempertahankan kekuasaan yang diperolehnya. Ringkas kata Gramsci mengubah makna hegemoni dari sebuah strategi menjadi sebuah konsep yang merupakan *keyword* utamanya dalam memahami dinamika kapitalisme, seperti halnya konsep marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara. (Suyanto & Amal, 2010: 39-40)

Hegemoni (bahasa Yunani: *hegemonía*) pada awalnya merujuk padadominasi (kepemimpinan) suatu Negara kota Yunani terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi negara terhadap negara lain. Namun saat ini, kepemimpinan tersebut menunjukkan pada sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam Negara 'pemimpin'. Bagi Gramsci, konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep ini untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu yang lewatnya, dalam suatu masyarakat yang ada, sesuatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya (Hefni, 2011: 63)

Uraian mengenai konsep hegemoni merupakan sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan dilakukan melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni, dalam hal ini dominasi yang dilakukan kaum bangsawan terhadap rakyat jelata, melalui ideologi - ideologi budaya masyarakat Indonesia tentang konsep *kawula* dan *gusti*, bagaimana raja sebagai *gusti* merupakan tokoh yang dikonstruksikan sebagai wali atau wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga keberadaanya harus dihormati cara penghormatannya dilakukan dengan cara melayani kebutuhan raja didunia dengan praktik pemberian upeti. Gramsci mempertegas kembali bahwa hegemoni akan memperluas peranan kelas atau strata dalam memperebutkan kekuasaan negara atau untuk mempertahankan kekuasaan. Proses hegemoni yang dilakukan, merupakan proses penyesuaian yang dilakukan untuk mengokohkan dominasi kelas yang satu terhadap kelas yang lain melalui kesepakatan atau konsensus, guna memperkuat dominasi kelas bangsawan terhadap masyarakat proletar atau rakyat jelata.

Bagi Gramsci, upaya menciptakan kepatuhan para warga melalui hegemoni tak hanya dengan cara pihak yang dikuasai harus mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, tapi jauh lebih dari itu, mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual (aktif) (Siahaan, tt: 3. Sugiono, 1999:31)

Proses hegemoni yang terjadi akhirnya melahirkan kelas hegemonik, yaitu merupakan kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan serta kelas sosial lainnya dengan cara melalui perjuangan politik dan ideologi. Konsensus yang terjadi dalam proses hegemoni antara kelas satu dengan kelas yang lain disadari bukan sebagai keinginan dari mereka, hal ini berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran, dalam memahami realitas sosial yang ada, penyebab utama yang melahirkan konsensus adalah pendidikan dan mekanisme kelembagaan, yang lahir karena keadaan dan tuntutan.

Kelas hegemonik adalah kelompok kelas hegemonik yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lainnya dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. Sebuah konsensus (*concesio*) terjadi bukan karena kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka tetapi justru sebaliknya, hal tersebut terjadi karena mereka kekurangan basis konseptual untuk membentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif. Gramsci menyatakan biang keladi dari terjadinya konsensus antara kelas borjuis dan kelas buruh adalah pendidikan disuatu pihak dan mekanisme kelembagaan di pihak lain. (Suyanto & Amal, 2010: 40)\

Upeti merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas bangsawan untuk menghegemoni rakyat jelata. Proses pelembagaan praktik pemberian Upeti tersebut kemudian dibentuk sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan yang berakar dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, kondisi tersebut kemudian dianalogikan sebagai bentuk persembahan atau pemberian yang dilakukan secara tulus dan ikhlas dari rakyat kepada kalangan bangsawan atau Negara dalam konteks kerajaan, karena nilai-nilai budaya lokal banyak yang beranggapan bahwa raja atau pimpinan merupakan wakil Tuhan dimuka bumi, oleh karena itu siapapun yang memiliki otoritas dalam Negara harus dipatuhi dan dihormati, sebagai sosok yang mulia dan suci.



Dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Para adipati memberikan persembahan kepada raja penakluk. Sebagai imbalannya, raja penakluk memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh para adipati tersebut. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ininternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia. Dalam disertasi klasiknya yang berjudul *The Making of A Bureaucratic Elite* (1979), Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola *patron-client* di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau *pamong-praja* di Indonesia. (Kumoro, 2008: 2)

Keadaan tersebut, kemudian menjadi sebuah proses hegemoni, yang bersifat total, dimana masyarakat secara keseluruhan dengan sadar ataupun tidak, kemudian melakukan praktik pemberian upeti, kepada negara atau raja, hingga sampai saat ini, sebagai sebuah keharusan. baik secara formal maupun non formal. Akan tetapi praktik ini berkembang dan mengakar pada lapisan masyarakat, sehingga menjadi sebuah keharusan untuk melakukan upaya - upaya seperti itu. Proses-proses hegemoni yang terjadi memiliki berbagai macam model, dalam konteks praktik pemberian upeti adalah hegemoni total (*integral*), dimana hegemoni ini mendapatkan justifikasi secara total dari masyarakat keseluruhan sehingga mereka seolah-olah memiliki kesatuan moral dan intelektual yang sangat kokoh, untuk melakukan praktik tersebut.

Menurut Gramsci, ada tiga tingkatan hegemoni, yaitu Hegemoni total (*integral*), Hegemoni yang merosot (*decadent*), Hegemoni yang minimum. *Pertama*, Hegemoni total (*integral*) ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dari hubungan organisasi pemerintah dan yang diperintah, hubungan ini tidak diliputi oleh kontradiktif dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis. (Ibid, 2010: 41)

Konstruksi tersebut dapat kita lihat saat ini sebagai fenomena hegemoni kelas borjuis atau priyayi kepada kelas proletar atau rakyat jelata, yang pada akhirnya memberikan

otoritas yang penuh terhadap hegemoni kelas borjuis, yang menyebabkan ketertundukan serta kepatuhan terhadap kelas ini. Fenomena tersebut adalah ciri khas kekuasaan lewat hegemoni, yang menjelaskan bahwa kekuasaan itu tertanam dalam keyakinan, cita-cita dan pandangan normatif seluruh masyarakat. Kemapanan kekuasaan sebuah kelas berdasarkan atas dialektika antara paksaan dan konsensus. Dengan terbangunnya hegemoni, menurut Gramsci kesatuan antara teori dan praksis, antara kesadaran dan kenyataan sosial akan semakin tercapai. (Ibid, 2010: 42).

Pandangan teori hegemoni, berbeda dengan konsep dialektika Materialis historis yang sebenarnya menjadi induk teori-teori sosial yang diungkapkan oleh Karl Marx diatas, mengenai kebutuhan ekonomi yang menjadikan landasan perjuangan kelas, sehingga adanya penindasan kelas bangsawan terhadap kelas proletar. mengakibatkan terjepitnya masyarakat proletar dan akhirnya akan melakukan revolusi, akan tetapi Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan penundukkan kelas-kelas sosial dengan cara-cara yang lebih bersifat konsensus (persetujuan) daripada penindasan (paksaan). (Bocock, 2007:27)

Kondisi tersebut, yang diyakini sebagai bentuk hegemoni yang berhasil ditanamkan oleh kalangan bangsawan kerajaan bersama pemerintah kolonial Belanda keseantero Nusantara, pertama melalui penjajahan secara fisik, kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk konsensus atau kesepakatan kelas-kelas tertentu dalam sistem sosial kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, pada akhirnya hegemoni inilah yang menjadi cikal-bakal, praktik-praktik korupsi sehingga tetap eksis dan menggerogoti keutuhan bangsa Indonesia.

Hegemoni yang dilakukan oleh kalangan bangsawan tentang pelaksanaan praktik pemberian upeti memang mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat, akan tetapi, tetap saja ada resistensi atau pihak yang menentang (penentangan) dalam pelaksanaan praktik pemberian upeti di Indonesia. Hal ini tidak dapat dinafikan karena, Sebagai sebuah metodologi, proses hegemoni tersebut tidak meniscayakan munculnya *counter-hegemony* (hegemoni tandingan), sebagai sebuah sikap sekaligus bentuk perlawanan dari kelas-kelas yang terkuasai. (Aman, (tt): 66, (Hobden & R.W. Jones, 2001:211).

Proses Hegemoni tandingan, lahir dari masyarakat intelektual, yang sadar akan penderitaan yang dialami oleh rakyat karena praktik pemberian upeti, pada akhirnya menyengsarakan rakyat jelata, seperti beberapa sumber yang menjelaskan penderitaan masyarakat karena praktek-praktek hegemoni kelas



bangsawan yang dilakukan melalui praktik ini. Perlawanan terhadap kekuasaan Raja atau kalangan bangsawan, merupakan perbuatan yang lahir akibat dari ketidakpuasan terhadap kesenjangan yang dilahirkan oleh sistem kelas yang hegemoni kelas proletar atau rakyat jelata. Hegemoni tandingan ini.

b) Konsep Repressive State Apparatus (RSA) dan Ideological (ISA) dalam praktik pemberian upeti

Dominasi kalangan priyayi terhadap rakyat jelata, akan menimbulkan keyakinan, yang secara turun-temurun dianggap sebagai *pakem* dan landasan sehingga diyakini sebagai sebuah cita-cita serta pandangan normatif masyarakat, yang akhirnya menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Bentuk-bentuk dominasi kelas dalam sebuah negara, memiliki padanan pemikiran, tidak hanya dalam konsepsi teoritis yang dilahirkan oleh Antonio Gramsci akan tetapi ada juga konsepsi teoritis yang menyebutkan hal tersebut, yaitu Louis Althusser, dengan konsep *Repressive State Apparatus* (RSA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA).

dengan menguraikan betapa proses dominasi dan penaklukan oleh kekuasaan negara tak hanya berlangsung melalui kekerasan fisik, dalam istilah Althusser, *repressive State Apparatus* tapi juga lewat produksi dan reproduksi kuasa dalam ruang kultural (tempat wawasan dan makna hidup dirajut dalam bermacam teks dan wacana yang saling berkompetisi). Althusser menyebutnya, *Ideological State Apparatus*. Menurut Althusser, ada dua dimensi hakikat negara, yakni represif dan ideologis yang satu masuk dengan memaksa, sedang yang lain masuk dengan mempengaruhi. *Repressive State Apparatus* (RSA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA) adalah dua perangkat berbeda tapi memiliki fungsi sama, yakni melanggengkan penindasan dalam relasi produksi masyarakat. Kerja RSA menindas secara fisik (*violence*) untuk mengamankan kondisi politik yang diciptakan ISA (melalui manipulasi kesadaran masyarakat secara intelektual, kultural dan simbolik). Penindasan RSA ini kemudian diberi arti ideologis oleh ISA dengan menyusun kerangka legitimasi yang mengabsahkan tindakan RSA, sehingga rakyat mau menerima tindakan kekerasan itu. Kenyataan sedemikian itulah yang digambarkan Louis Althusser (Cahyadi, 1992)

Konsepsi teoritis dari Louis Althusser ini mengemukakan tentang bagaimana konsep RSA (*Represif State Apparatus*) sebagai *repressive State Apparatus* melakukan dominasinya terhadap masyarakat dengan cara paksaan, atau dipaksa sehingga



mau tidak mau masyarakat patuh dan tunduk terhadap Negara, Hal inilah yang dialami oleh bangsa Indonesia bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh beberapa bangsa kolonial, contohnya Belanda yang melakukan penjajahan fisik selama kurang lebih 300 tahun.

Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki sejarah panjang dan berliku sejak jaman kerajaan-kerajaan kuno, jaman kerajaan hindu budha, kerajaan Islam, pengaruh kolonialisme belanda, Inggris dan Jepang yang puncaknya adalah ketika kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 agustus 1945. Tidak benar Indonesia pernah dijajah selama 350 Tahun, jika dirujuk pada hukum Internasional, sebab yang mereka jajah adalah kerajaan-kerajaan yang masih berdaulat sendiri-sendiri atas wilayah kekuasaannya. Karena sampai dengan tahun 1912, wilayah kerajaan Aceh masih merdeka dan berdaulat, meskipun telah puluhan tahun berperang menghadapi belanda. Aceh merupakan wilayah terakhir di Nusantara yang ditaklukan oleh Belanda dan setelah itu Belanda memerlukan waktu kurang lebih 300 tahun untuk menguasai wilayah yang ada di kepulauan Nusantara (Hasibuan, 2009: 6-7)

Penjajahan ini merupakan peristiwa atau prihal yang sangat menyakitkan, karena berlangsung sangat lama dan membekas dalam kehidupan masyarakat, penjajahan yang tidak manusiawi, menimbulkan kesan yang sangat mendalam dalam kehidupan yang ada pada masyarakat Indonesia, karena peristiwa itu disertai dengan penghinaan, dan pemaksaan, serta perampasan. Sedangkan konsep ISA (*Ideological Satate Apparatus*) merupakan bentuk dominasi dari Negara terhadap masyarakat dengan tidak menggunakan kekerasan sebagai alatnya, akan tetapi dilakukan melalui produksi dan reproduksi kuasa dalam ruang kultural melalui kebudayaan serta tradisi-tradisi dan falsafah hidup masyarakatnya yang akhirnya menciptakan teks tentang konsep kekuasaan atau bentuk-bentuk legimitasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, contohnya berkenaan dengan penjajahan yang dilakukan Belanda setelah melakukan penjajahan secara fisik, pemerintah Kolonial Belanda membawa misi yang terkenal dengan sebutan *Gold, Glory and Gospel* (Emas, Kejayaan, Injil). Misi-misi inilah yang kemudian banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia, menjadi tunduk dan percaya terhadap pelanggaran sistem kelas, serta doktrin-doktrin untuk memecah belah persatuan dan kesatuan, melalui konstruksi dari praktik pemberian upeti.



Dominasi bangsa kolonial, terlihat dari pekerjaan, pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan yang melanggengkan sistem kasta, seperti konstruksi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. (Kartodirdjo, 1993: 92) lebih menekankan pada analisis tentang struktur pada masyarakat Jawa selama jaman kolonial, yang dipusatkan pada "peranan pekerjaan dan pendidikan serta sebagai indikasi posisi sosial". Pengamatan perubahan struktur sosial dilakukan oleh Sartono Kartodirdjo dalam perspektif sejarah karena masyarakat Jawa pada masa itu sebagian besar masih berakar pada tradisi lama.

Kondisi tersebut, mempertegas kembali bahwa ada perbedaan kelas, dalam struktur masyarakat Indonesia, dimana masyarakat kelas bawah harus tunduk dan mengabdikan dirinya kepada kaum bangsawan dan priyayi, dimana dalam berbagai bidang selalu didominasi oleh kalangan bangsawan sebagai konstruksi kehidupan sosial budaya masyarakat, sehingga para priyayi yang memiliki hubungan darah dengan raja secara otomatis, menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, sehingga wajib diberikan persembahan, hal ini jelas menerangkan tentang kondisi sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia dalam kelas-kelas sosial tertentu.

Berdasarkan struktur sosialnya, pada awal abad XIX di Batavia terdapat 4 kelompok masyarakat. *Pertama*, adalah kelompok orang Eropa yang didominasi oleh orang-orang Belanda; *kedua*, adalah kelompok masyarakat Indo; *ketiga*, adalah kelompok masyarakat Timur Asing yang terdiri dari orang Cina dan Arab; dan *keempat*, adalah kelompok masyarakat pribumi yang terdiri dari orang-orang Betawi dan para penda-tang dari luar kota maupun dari luar Pulau Jawa. (Dadtun, 2011: 19)

Menurut F.A. Sutjipto lapisan atas atau merupakan kelas *elite*, *priyayi luhur*, atau *wong gede*, merupakan kelas yang memerintah. Di strata ini ada raja dan para bangsawan serta pejabat kerajaan. Sebenarnya bila dilihat dalam sistem kategorisasi, kelompok atau golongan ini merupakan kelompok campuran *priyayi* yang berasal dari *darah dalem* dengan *priyayi* yang karena pangkat atau pengabdian. Adapaun lapisan bawah atau rakyat biasa, rakyat kecil atau *wong cilik* merupakan mayoritas penduduk kelas yang diperintah, baik penduduk kota maupun yang berada di pedesaan. Mereka adalah para pekerja yang tidak terdidik atau sedikit mendapat latihan kerja di perusahaan kecil. Rakyat kecil ini biasanya bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh perkebunan dan pabrik serta tukang, perajin dan lainnya. (Sutjipto, tt :1-2)

Kepemimpinan moral yang dijelaskan oleh ISA tereduksi didalam sistem kasta atau kelas, bagaimana raja mengayomi rakyatnya, dengan konsep bahwa Raja merupakan perwakilan Tuhan di muka bumi, yang melindungi, memberikan keadilan, serta memberikan kehidupan dan keselamatan di dunia dan diakhirat. Kerja ISA inilah dalam konsep Antonio Gramsci disebut hegemoni (Cahyadi, 1992:51-65) yang sebagaimana ISA, pada hakikatnya juga merupakan represi kekuasaan. Bedanya, represi itu berciri lunak atau halus (*subtle*) dengan mengandalkan kepemimpinan moral dan intelektual (*intellectual and moral leadership*) dan bersifat aktif.

Konsep *manunggale kawula gusti*, yang digunakan oleh para raja dan kaum bangsawan untuk mencapai kondisi dimana publik dalam hal ini masyarakat, menerima konstruksi yang dibuat oleh mereka. Hegemoni tak dicapai melalui *coercive power*, tapi diskursus sistemik (bahasa), terarah dan berkelanjutan untuk memenangkan penerimaan publik (*public consent*) secara sukarela akan sebuah gagasan atau rezim (Patria dan Arief, 1999:112-23).

Ini sekaligus yang membedakan dengan konsep ISA Althusser. Usaha menguasai isi pikiran, bahkan cara berpikir melalui monopoli makna yang manipulatif, dicapai dengan membentuk perluasan struktur kognitif dan afektif, di mana individu merasakan dan mengevaluasi realitas sosial yang problematis.

Dalam *Serat Centhini* digambarkan *pan ki dhalang sejati jatining ratu, sang ratugantyaning nabi, nabi gantyaning Hyang Agung, ratu-nabi prasasting, Hyang Maha Gung kang katulat* 'dalang sejati itu raja sendiri, ia sendiri adalah wakil nabi, nabi adalah wakil Allah yang Maha Agung, raja nabi adalah perwujudan dari Allah yang dapat dilihat'. Raja sebagai dalang sejati, yang berhak mengatur kehidupan dengan menerima mandat dari Allah. Apa yang dikerjakan raja pada hakikatnya adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Sedang dalam *Wulangreh*, raja dikatakan sebagai penguasa yang *kinarya wakiling Hyang Agung*. Raja bertugas memelihara ditegakkannya hukum dan keadilan. Untuk itu semua rakyat harus taat kepada raja, barang siapa yang berani menentang perintah raja berarti *mbalelaing karsaning Hyang Agung* (menentang kehendak Tuhan Yang Maha Besar), karenanya pengabdian raja harus taat kepadanya tanpa syarat. Dikenal istilah *kawula-gusti*, kawula untuk menyebutkan rakyat dan gusti untuk menyebut raja. (Purwadi, 2007: 59)



Pemikiran Althrusser ini selalu jalan berdampingan, sebagai bentuk kolaborasi, antara RSA yang melakukan penindasan secara fisik (*violence*) untuk mengamankan kondisi politik yang diciptakan oleh ISA melalui manipulasi kesadaran masyarakat secara intelektual, kultural dan simbolik, kemudian diberi arti ideologis. Penindasan RSA ini oleh ISA disusunlah kerangka legitimasi yang mengabsahkan tindakan RSA, sehingga rakyat mau menerima tindakan yang berbentuk kekerasan, pengorbanan, pengabdian terhadap negara atau pemimpin disebuah negara. Konsep-konsep dominasi atau hegemoni kelas tertentu terhadap kelas yang lain, akhirnya melahirkan praktik pemberian upeti, dimana masyarakat secara fisik telah dijajah, kemudian sebagai konsekuensi, masyarakat tersebut menjadi hamba kepada negara yang menjajah ataupun pimpinan dari negara tersebut, dan wajib memberikan legitimasi kepada negara atau pemimpin yang berkuasa agar dihormati ataupun dijadikan panutan dengan memberikan persembahan kepada pihak istana, sebagai bentuk atau wujud rasa hormat dan patuh terhadap penguasa atau negara. Lantas konstruksi yang sudah ada tersebut, kemudian dikokohkan dengan *Ideologi State Aparatus* (ISA) untuk melegitimasi kekuasaan negara atau pemimpin, melalui proses manipulasi kesadaran masyarakat secara intelektual, kultural dan simbolik, sehingga menghasilkan legitimasi yang kokoh untuk membuat masyarakat patuh kepada negara.

Terbentuklah hegemoni kelas bangsawan terhadap rakyat, diwujudkan melalui praktik pemberian upeti dalam masyarakat, dimana kondisi tersebut mempengaruhi masyarakat, dimana rakyat memahami praktek pemberian upeti sebagai budaya yang dipahami secara normatif, sebagai penghormatan terhadap Raja atau Negara yang berkuasa, inilah yang menjadi akar permasalahan, karena hal itu dilanggengkan atas dasar tatanan sosial masyarakat, sehingga dalam praktiknya masyarakat menganggap bahwa upeti merupakan identitas atau tradisi dari kebudayaan mereka, yang harus dilestarikan. Seperti penjelasan yang dikemukakan oleh (McCarthy, 1996: 41): Fungsi ideologi lainnya ialah menghubungkan masyarakat satu sama lain, dengan suatu dunia dan terutama diri mereka sendiri. Ideologi memberikan identitas tertentu.

Asumsi masyarakat terhadap pelebagaan praktik pemberian upeti sebagai identitas bangsa, menyebabkan berkembangnya model-model dari pelebagaan praktik pemberian upeti berupa tindak kejahatan korupsi contohnya seperti Suap dan Gratifikasi di jaman modern ini, problemnya

adalah kedahsyatan efek yang ditimbulkan terhadap sistem pemerintahan sebagai induk yang melahirkan praktik pemberian upeti.

Permasalahan tentang proses pelembagaan praktik pemberian Upeti menjadi tindak pidana Suap dan Gratifikasi, menggunakan dua teori, yaitu: pertama teori yang di utarakan oleh Anthonio Gramsci, kedua pemaparan teori yang disampaikan oleh Louis Athrusser. Gramsci memahami hegemoni sebagai Proses yang dilakukan untuk mempengaruhi, dengan cara penyesuaian - penyesuaian untuk mengkokohkan dominasi kelas Borjuis terhadap kelas proletar melalui kesepakatan atau konsensus, guna memperkuat dominasi kelas bangsawan terhadap masyarakat jelata, sedangkan konsep Loius Athrusser melakukan Hegemoni melalui konsep *Repressive State Apparatus* (RSA) yang menekankan pada pemaksaan dan *Ideological State Apparatus* (ISA) melalui penanaman ideologis. Uraian mengenai hegemoni dan relasinya terhadap kekuasaan, telah memaparkan, hubungan-hubungan yang terjadi dalam sebuah masyarakat dengan Negara dan penyelenggara Negara, yang dapat dijelaskan dengan skema tentang kerangka teoritis, dari praktek pemberian upeti sebagai sebuah hegemoni kelas bangsawan terhadap kelas proletar untuk mengukuhkan dominasi serta hegemoninya.

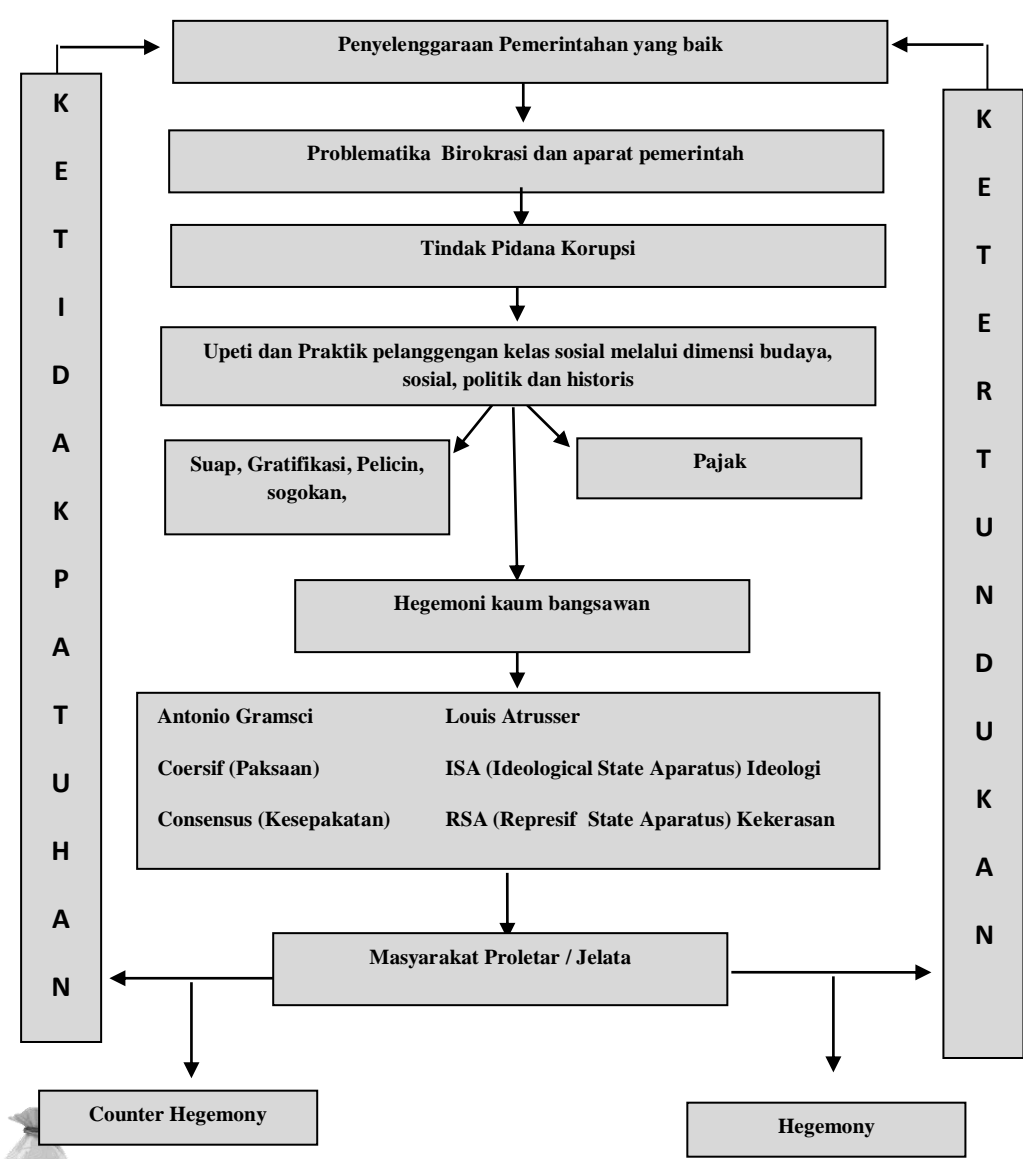
Skema diatas mejelaskan hubungan antara kelas bangsawan dengan rakyat jelata, dalam sebuah negara sebagai sebuah hubungan yang simbiosis atau saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menguntungkan, tetapi secara perlahan-lahan akan ada dominasi suatu kelas terhadap kelas lain yang akhirnya akan menimbulkan hegemoni. Praktik upeti merupakan bentuk hegemoni kelas bangsawan atau priyayi terhadap kelas proletar atau rakyat jelata, dimana praktik pemberian upeti memberikan pandangan bahwa di dalam struktur masyarakat Indonesia ada kelas yang lebih tinggi derajat dan martabatnya sehingga ada sebuah keharusan untuk memberikan penghormatan ataupun penghargaan dari kelas dibawahnya yaitu berupa upeti.

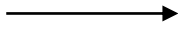
Hegemoni tersebut dilakukan dengan tindakan-tindakan kekerasan atau represif melalui penguasaan dan penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman ideologi, tentang sistem kelas, yang kebenarannya diciptakan oleh kalangan bangsawan sebagai bentuk hegemoninya, yang kemudian tidak membuat rakyat jelata berontak akan tetapi hegemoni tersebut akan menemukan jalan-jalan seperti konsensus atau kesepakatan.



Kondisi ini kemudian membuat sistem hegemoni ini menjadi bertahan lama, sehingga proses pelembagaan praktik pemberian upeti bisa di jumpai dalam kehidupan masyarakat karena menjadi hal yang lumrah dan umum untuk dilakukan, inilah yang menjadi penyebab dari praktik pemberian upeti menjadi dilarang dan melanggar hukum, karena tindakan tersebut menjadi tidak tulus dan murni akan tetapi memiliki tendensi tertentu dan bermotif kontraprestasi. Konsep tersebut bisa dipahami melalui skema dan konsep dibawah ini.

Gambar 2.1 skema tentang hegemoni kelas borjuis kepada rakyat jelata dengan praktik pemberian Upeti





: Alur dan Mekanisme Hegemoni



: Indikator atau Variabel

Skema diatas menjelaskan hubungan antar kelas bangsawan dengan rakyat jelata, dalam sebuah Negara sebagai sebuah hubungan yang simbolis atau saling membutuhkan saling melengkapi dan slaing menguntungkan, tetapi secara perlahan – lahan aka nada dominasi satu kelas terhadap kelas lain yang akhirnya akan menimbulkan hegemoni. Praktik Upeti merupakan bentuk hegemoni kelas bangsawan atau priyayi terhadap kelas proletar atau rakyat jelata, dimana praktik pemberian upeti memberikan pandangan bahwa di dalam struktur masyarakat Indonesia ada kelas yang lebih tinggi derajat dan martabatnya sehingga ada sebuah keharusan untuk memberikan penghormatan ataupun penghargaan dari kelas yang berada di bawahnya berupa upeti atau jenis lainnya.

Hegemoni tersebut dilakukan dengan tindakan kekerasan atau represif melalui penguasaan dan penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman ideologi, tentang sistem kelas, yang kebenaraannya diciptakan oleh kalangan bangsawan sebagai ebntuk hegemoninya, yang kemudian tidak membuat rakyat jelata berontak, akan tetapi hegemoni tersebut akan menemukan jalan – jalan seperti *consensus* atau kesepakatan. Kondisi ini kemudian membuat sistem hegemoni menjadi bertahan lama, sheingga proses pelembagaan praktik pemberian upeti dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat karena menjadi hal lumrah dan umum untuk dilakukan, inilah yang menjadi penyebab dari praktik pemberian upeti menjadi dilarang dan melanggar hukum, karena tindakan tersebut, menjadi tidak tulus dan murni akan tetapi memiliki tendensi tertentu dan bermotif kontraprestasi.





1. Perkembangan Masyarakat Indonesia

a) Fase-fase perkembangan Masyarakat Indonesia

Perkembangan manusia terbagi atas fase-fase sesuai dengan perjalanan sejarah atau periodisasi jaman, banyak pertimbangan mengenai pembabakan atau periodisasi dalam perkembangan sejarah. Persepsi yang berkembang diantara para ahli sejarah, membagi perkembangan sejarah Indonesia ke dalam berbagai babakan masa atau fase-fase.

Dalam penyusunan babakan masa (periodisasi) dapat dipakai dasar sudut pandangan yang bermacam-macam, selain yang telah diajukan oleh pemasaran, yakni: a. memakai dasar perkembangan peradaban (*civilizations*), b. babakan masa didasarkan segi-segi kebudayaan (*culture*), c. babakan masa atas dasar agama-agama yang masuk di Indonesia; d. pembabakan seluruh sejarah nasional dalam lima babakan; (1. prasejarah, 2. proto sejarah, 3. babakan kebangsaan, 4. Babakan pertemuan antara bangsa Indonesia di tanah Indonesia, 5. Babakan abad proklamasi berdasarkan adanya pembentukan masyarakat Indonesia yang berdaulat - dengan pengertian, bahwa Negara yang kekuasaannya meliputi seluruh Indonesia, dan Negara-negara yang kurang luasnya daripada kekuasaannya itu, adalah suatu susunan masyarakat.|| (Gazalba, 1981: 195)

Fase-fase dalam periodisasi perkembangan sejarah, memberikan gambaran perjalanan sejarah khususnya bangsa Indonesia, selain itu juga memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana periodisasi tersebut diperuntukan, sehingga nantinya dapat memberikan penjelasan tentang perkembangan sejarah masyarakat Indonesia, termasuk sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi. Pembabakan atau periodisasi sejarah bangsa Indonesia dalam penelitian ini akan diarahkan kepada penelusuran terhadap kebudayaan-kebudayaan masyarakat sebagai sebuah tradisi yang dijalankan secara turun temurun, karena memiliki asumsi tentang kebenaran yang dipercaya dan diyakini, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Periodisasi atas dasar kebudayaan ini, dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

1). Jaman Pra sejarah. 2). Jaman Kuno (Masa kerajaan-kerajaan tertua. Masa Sriwijaya dari abad VII sampai abad XIII

atau XIV. Masa Majapahit dari abad ke XIV sampai abad XV. Masa Peralihan abad XV). **3). Jaman Baru** (Masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate/Tidore, sejak abad XVI), Masa perlawanan terhadap imperialisme Barat (abad XIX), Masa Pergerakan Nasional (Abad XX), Masa Republik Indonesia (sejak 1945). (ibid, 1966:194)

Pembabakan atau pembagian zaman yang kedua ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda purbakala. Benda-benda demikian itu merupakan bukti autentik kebudayaan manusia yang telah hidup sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Secara umum zaman kehidupan manusia menjadi dua bagian, zaman batu (zaman pra sejarah) zaman logam (zaman sejarah). (Husein, 2008: 18)

Zaman batu merupakan masa ketika masih digunakan alat-alat batu/belum mengenal logam. Pembabakan zaman batu dibagi menjadi tiga yaitu *Paleolithikum*, *Mesolithikum*, *Neolithikum* (Soekmono, 1981:23). (Asnawi, tt: 63)

Berdasarkan kemampuan teknologisnya, yang didasarkan pada alat-alat yang ditinggalkannya, periodisasi masyarakat pra aksara Indonesia dapat dirinci menjadi: 1. Zaman batu yang meliputi: palaeolithikum, mesozoikum, dan neolitikum. 2. Zaman logam yang meliputi: zaman tembaga, perunggu dan besi. (Sudrajat, tt: 17)

Pembabakan sejarah mengenai perkembangan manusia, secara umum dapat dibagi kedalam fase-fase sesuai penjelasan diatas, fase pertama adalah zaman prasejarah dimana, pada jaman ini terdapat beberapa zaman batu, yang pertama adalah era batu tua, dimana masyarakat yang hidup dalam era ini, hidup secara berpindah-pindah *nomaden* untuk mendapatkan sumber makanan yang telah disediakan oleh alam. Manusia pada zaman batu tua ini menggunakan beberapa alat yang digunakan untuk berburu, bentuknya masih sangat kasar, dari hasil kebudayaan tersebut masyarakat berburu dan mendapatkan makanan.

Zaman palaeolithikum atau zaman batu tua merupakan zaman dimana peralatan manusia prasejarah dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Zaman ini berlangsung pada zaman pleistosen yang berlangsung kira-kira 600.000 tahun lamanya. Pada saat itu manusia praaksara kehidupannya masih sangat sederhana. Mereka hidup berkelompok dengan anggota kelompok sebanyak 10-15 orang. Mereka sudah mengenal api, meskipun baru dimanfaatkan sebagai senjata untuk menghadapi makhluk hidup lain, atau untuk menakuti binatang buruan. Manusia praaksara pada zaman palaeolithikum ini mendapatkan bahan makanan dengan cara



berburu dan mengumpulkan makanan dengan memungut langsung dari alam (food gathering). Mereka sangat tergantung dengan persediaan makanan dari alam karena mereka belum mampu memproduksi makanan. Oleh karenanya mereka selalu berpindah-pindah tempat (*nomaden*) mengikuti musim makanan. Apabila makanan di tempat mereka habis, maka mereka akan pindah ke tempat lain yang persediaan makanannya masih mencukup. (Sudrajat, tt: 19- 20)

Zaman batu tua *Paleolithikum* cirri-ciri jaman ini adalah sebagai berikut: 1). Manusia pada zaman ini hidup secara berpindah-pindah (*Nomaden*). 2). Makanan diambil secara langsung dari alam (*Food Gathering*). 3). Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. 4). Hasil utama zaman ini antara lain kapak perimbas (*Chopper*) dan alat serpih (*Flakes*). (Husein, 2008: 18)

...Zaman batu tua atau zaman *Paleolithikum* ditandai dengan penggunaan alat dari batu yang masih digarap dengan kasar. Ciri zaman ini adalah kehidupan manusia masih berburu dan meramu, serta berpindah-pindah (*Nomaden*) (Asnawi, tt: 63).

Pada perkembangan manusia zaman *Paleolithikum* kegiatan masih sangat primitif, karena mengandalkan alat serta menggunakan batu sebagai alat untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, kebudayaan masyarakat zaman batu tua bisa dilihat dari beberapa temuan dari beberapa kapak yang ditemukan diberbagai daerah.



Alat serpih

Sumber diolah dari <http://www.wacana.co/2013/08/alat-serpih/> pada 23 April 2017.

Gambar 3.1 Hasil Kebudayaan Masyarakat Zaman Paleolithikum

Setelah berakhir jaman batu tua atau *Paleolithikum* kemudian memasuki zaman batu tengah atau *Mesolithikum*, di zaman batu tengah ini kehidupan manusia masih berpindah-pindah atau *Nomaden*, akan tetapi ada beberapa perbedaan misalnya dalam hal penggunaan alat-alat batu yang sudah dihaluskan, sudah dikenal juga konsep tempat tinggal, mereka

bertempat tinggal dipinggir pantai atau sungai. Sistem kepercayaan pada zaman ini mulai berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sumber yang ditemukan di dinding gua mengenai lukisan yang identik dengan kehidupan kosmos.

Zaman batu tengah (*Mesolithikum*) ciri-ciri kehidupan ini adalah sebagai berikut: 1). Manusia pada zaman ini masih hidup berpindah-pindah (*Nomaden*) Secara berkelompok. 2). Makanan diambil dari alam (*Food Gathering*). 3). Umumnya mereka bertempat tinggal di tepi pantai dan sungai. Ini dapat dibuktikan dengan penemuan gua-gua karang (*abrisseouche roche*) dan sampah dapur disepanjang pantai (*Kjokkenmoddinger*). 4). Diperkirakan sudah ada unsur religi dan kesenian. Dapat dibuktikan dari temuan gambar telapak tangan di dinding gua Leang (Sulawesi)... (Husein, 2008: 18)

...Zaman batu tengah atau *Mesolithik*. Zaman batu tengah ditandai digunakannya alat yang telah diupam, sudah dikenal konsep tempat tinggal, pengolahan makanan, timbulnya struktur social dalam masyarakat, kondisi lingkungan yang stabil...kebudayaan yang berkembang pada masa ini adalah kapak Sumatra / *Pebble culture* , kebudayaan serpih dan kebudayaan tulang. (Asnawi, tt: 64)

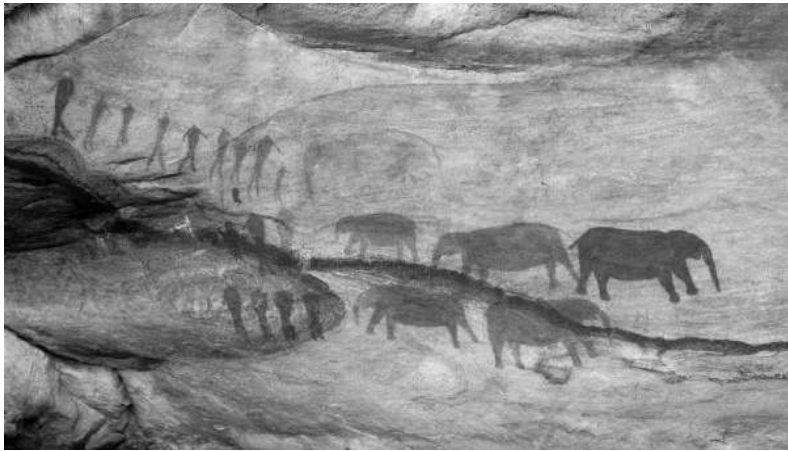
Zaman mesolithikum atau zaman batu tengah merupakan zaman peralihan dari zaman palaeolithikum menuju ke zaman neolithikum. Pada zaman ini kehidupan manusia praaksara belum banyak mengalami perubahan. Alat-alat yang dihasilkan masih terlihat kasar meskipun telah ada upaya untuk memperhalus dan mengasahnya agar kelihatan lebih indah. Dari berbagai alat yang ditemukan, dapat dianalisis bahwa kebudayaan zaman mesolithikum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: *pebble culture*, *bone culture* dan *flake culture* (Sokemono, 1973: 39).

Pebble culture terutama ditemukan dari suatu corak peninggalan istimewa yaitu *kjokkenmoddinger*. Lingkungan ini ditemukan disepanjang pantai timur Sumatera antara Langsa (Aceh) dan Medan. Di dua tempat tersebut kemungkinan telah ada komunitas manusia praaksara yang tinggal di dalam rumah-rumah bertonggak. Mereka hidup dari siput dan kerang yang dipatahkan ujungnya kemudian dihisap isinya dari bagian kepalanya. Kulit siput dan kerang tersebut kemudian dibuang sehingga menimbulkan bukit kerang. Di dalam bukit kerang tersebut ditemukan pebble atau sejenis kapak genggam khas Sumatera. Lingkungan kedua dari kebudayaan zaman mesolithikum adalah *abris sous roche* yaitu gua yang dipakai sebagai tempat tinggal. Gua ini sebenarnya hanyalah sebuah



ceruk di dalam batu karang yang cukup untuk memberikan perlindungan dari panas dan hujan. Di dasar gua tersebut ditemukan banyak peninggalan terutama yang terbanyak dari zaman mesolithikum (Soekmono, 1973: 41). Alat- alat yang ditemukan antara lain: mata panah, flake, batu penggilingan, dan lain- lain. (Sudrajat, tt: 19-20)

Kehidupan masyarakat pada jaman batu tengah, meningkat lebih maju daripada jaman batu tua, dimana telah berkembang ssstem sosial masyarakat dan juga cara untuk memperoleh makanan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kebudayaan seperti kapak yang telah dimodifikasi serta lukisan- lukisan pada dinding gua, yang diartikan sebagai kehidupan spiritual manusia kala itu.



Lukisan dinding goa

Sumber diolah dari

<https://hurahura.wordpress.com/2010/09/11/teknologi-baru-penanggalan-lukisan-batu-kuno/> pada 23 April 2017

Gambar 3.2 Hasil Kebudayaan Masyarakat Zaman Mesolithikum

Periodesasi berikutnya adalah zaman batu Besar atau *Megalithikum* dimana zaman batu masyarakat memiliki kebudayaan yang tinggi hal itu tampak dari peralatan-peralatan yang digunakan, tidak hanya alat-alat yang digunakan untuk berburu tetapi masyarakat pada zaman batu besar ini, telah mengenal tempat kubur atau peti mati dan juga tempat untuk meletakkan sesaji sebagi bentuk kehidupan religius pada zaman tersebut. Pada zaman *Megalithikum* masyarakat telah menetap.

Zaman batu besar (*megalithikum*). Secara umum diartikan sebagai peninggalan purbakala yang terbuat dari batu besar. Sejak zaman ini konsepsi pemujaan roh nenek moyang

dengan menggunakan sarana batu besar, manusia sudah mengenal adanya konsepsi pemujaan terhadap roh nenek moyang, kemudian tingkat kebudayaan sudah cukup tinggi, terbukti dari adanya bangunan yang terbuat dari batu besar sebagai tempat (sarana) pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan *Megalithikum* antara lain: menhir, dolmen, punden berundak-undak, kubur peti batu, sarkofagus, dan patung. (Husein, 2008: 19-20)

Hasil dari kebudayaan Megalithik antara lain punden berundak, menhir, dolmen, kalamba, sarkofagus, waruga, batu kandan serta batu lumpang. (Asnawi, tt: 64).

Zaman megalithikum atau zaman batu besar adalah suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan religius manusia praaksara. Zaman megalithikum sejalan dengan zaman neolithikum karenanya lebih tepat bila disebut dengan kebudayaan megalithikum. Zaman megalithikum terbagi dalam dua fase pencapaian. Fase pertama terkait dengan alat-alat upacara, sedangkan fase kedua terkait dengan upacara penguburan. Kebudayaan megalithikum menghasilkan alat-alat antara lain: 1. Menhir yaitu tugu batu yang dibuat dengan tujuan untuk menghormati roh nenek moyang. 2. Dolmen yaitu meja batu dimana kakinya berupa tugu batu (menhir). Biasanya meja batu ini digunakan untuk meletakkan sesaji. Kadang-kadang dibawah dolmen adalah sebuah kuburan, sehingga orang sering menganggapnya sebagai peti kubur. Peti kubur yaitu potongan batu yang disusun menjadi sebuah peti yang digunakan untuk meletakkan jenazah. 4. Sarkofagus yaitu keranda dari batu utuh (monolith) yang dianggap memiliki kekuatan magis. 5. Waruga adalah peti kubur yang berbentuk kubus atau bulat. 6. Punden berundak yaitu sebuah bangunan yang digunakan untuk sesaji yang merupakan bentuk dasar dari bangunan candi. (Sudrajat, tt: 21-22).

Kebudayaan yang tinggi dari masyarakat zaman *Megalithikum* menggambarkan tentang kehidupan sosial dan keagaamaan yang sangat maju, sehingga mampu untuk menghasilkan kebudayaan yang sangat unik, berbagai macam jenis tempat persembahan, tempat pemakaman, tempat – tempat ritual dan amsih banyak yang lainnya.





Dolmen

Sumber diolah dari <http://ipsgampang.blogspot.co.id/2016/10/apa-itu-dolmen.html> pada 22 April 2017

Gambar 3.3 Hasil Kebudayaan Masyarakat Zaman Megalithikum

Fase terakhir dari zaman prasejarah adalah zaman batu muda *Neolithikum*, dimana perkembangan fase ini, menjadi awal berakhirnya zaman batu menuju zaman logam, atau masa perundagian. Pada zaman batu muda masyarakat sudah hidup secara menetap dan juga dapat menghasilkan makanan dengan cara ditenak, hewan yang mereka ternak adalah kuda dan anjing serta babi.

Zaman neolithikum atau zaman batu muda merupakan revolusi dalam kehidupan manusia praaksara. Hal ini terkait dengan pemikiran mereka untuk tidak menggantungkan diri dengan alam dan mulai berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri (*food producing*) dengan cara bercocok tanam. di samping bercocok tanam manusia praaksara juga mulai beternak sapi dan kuda yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Manusia praaksara juga telah hidup dengan menetap (*sedenter*). Mereka membangun rumah-rumah dalam kelompok-kelompok yang mendiami suatu wilayah tertentu. Peralatan yang digunakan juga telah diasah dengan halus sehingga kelihatannya lebih indah. Kebudayaan mereka juga telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka menghasilkan gerabah dan tenunan. Pola hidup menetap yang mereka jalani menghasilkan kebudayaan yang lebih maju, karena mereka mempunyai waktu luang untuk memikirkan kehidupannya. (Sudrajat, tt: 20-21).

Zaman batu muda (*Neolithikum*) ciri-ciri zaman ini adalah sebagai berikut: 1). Manusia sudah hidup menetap (*sendenter*). 2). Mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri (*Food*

Producing), tidak hanya mengambil dari alam. 3). Pola hidup bermasyarakat, secara sederhana di kampung- kampung dan di gua-gua sudah dikenal. 4). Sudah mengenal cocok tanam (padi, palawija dan sayur) dan menjinakan hewan (babi dan ayam). 5). Alat- alat yang terbuat dari batu sudah mulai dihaluskan. Jenis alat yang terpenting antara lain kapak persegi dan kapak lonjong. 6). Sudah ada usaha membuat barang gerabah (wadah). 7). Mulai mengenal perhiasan, (Manik-manik, kalung dan gelang batu). 8). Mulai mengenai anyaman dan tenun pakaian dari kulit. 9). Yang paling penting adalah sudah dikenalnya kultul nenek moyang dengan adanya benda-benda Megalithik yang digunakan sebagai tempat pemujaan. (Husein, 2008: 19-20).

Zaman batu muda ditandai dengan revolusi kebudayaan, yaitu timbul dan berkembangnya pertanian/bercocok tanam dan berternak dalam masyarakat. Pada masa ini alat sudah diupam dengan halus berkembang teknologi gerabah, astronomi dan sistem perdagangan. Alat yang dihasilkan pada masa ini adalah kebudayaan kapak lonjong, kapak persegi, dan kebudayaan megalithik. (Asnawi, tt: 64)

Kebudayaan yang sangat tinggi dan perubahan mendasar, menjadikan masyarakat pada jaman batu muda menjadi manusia yang cerdas, hal tersebut dapat dilihat dari hasil kebudayaanya, yang sangat maju pada zaman tersebut.



Gerabah

Sumber diolah dari <http://www.wacana.co/2009/12/gerabah-prasejarah/> pada 22 April 2017

Gambar 3.4 Hasil Kebudayaan Masyarakat Zaman Batu Muda

Perubahan yang besar pada zaman batu muda, yang melahirkan banyak sistem sosial masyarakat, akhirnya membawa konsekuensi logis mengenai alkulturasi budaya serta proses interaksi, sehingga ada transfer teknologi maupun peradaban, hal inilah yang mengubah zaman batu menjadi zaman logam atau perundagian.

Zaman perundagian terjadi ditandai dengan semakin majunya teknologi yang digunakan manusia. Pada jaman ini



berkembang dua kebudayaan, yaitu kebudayaan logam dan Megalithikum. Alat-alat yang dihasilkan anatara lain alat dari perunggu berupa senjata, nekara dan moko; alat dari besi berupa mata kapak, senjata dan gelang-gelang, gerabah serta manik-manik. (asnawi, tt: 64)

Zaman Logam, pada zaman ini sudah berhasil dibuat peralatan hidup dari logam karena saat itu telah muncul golongan undagi, atau golongan yang trampil dalam melakukan jenis tertentu...Zaman logam dalam dibagi menjadi tiga zaman yaitu zaman tembaga, zaman perunggu dan zaman besi...alat-alat yang dihasilkan pada zaman ini antara lain: kapak corong (kapak yang mempunyai corong), neraka, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa (kapak sepatu). (Husein, 2008: 20)

Perkembangan pada zaman logam, akhirnya membawa manusia menjadi makhluk yang sangat pandai, oleh karena itu banyak melahirkan ahli- ahli dalam bidang-bidang tertentu. Kondisi tersebut bisa dilihat dari hasil kebudayaan masyarakat pada zaman logam yaitu sebagai berikut.

Zaman Logam, pada zaman ini sudah berhasil dibuat peralatan hidup dari logam karena saat itu telah muncul golongan undagi, atau golongan yang trampil dalam melakukan jenis tertentu...Zaman logam dalam dibagi menjadi tiga zaman yaitu zaman tembaga, zaman perunggu dan zaman besi...alat-alat yang dihasilkan pada zaman ini antara lain: kapak corong (kapak yang mempunyai corong), neraka, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa (kapak sepatu). (Husein, 2008: 20)

Perkembangan pada zaman logam, akhirnya membawa manusia menjadi makhluk yang sangat pandai, oleh karena itu banyak melahirkan ahli- ahli dalam bidang-bidang tertentu. Kondisi tersebut bisa dilihat dari hasil kebudayaan masyarakat pada zaman logam yaitu sebagai berikut.



Logam

Sumber diolah dari

<http://sejarahkelasx.blogspot.co.id/2014/06/benda-benda-yang-dihasilkan-pada-zaman.html> pada 22 April 2017

Gambar 3.5 Hasil Kebudayaan Masyarakat Zaman Logam

Jalur perdagangan Cina dan India pada masa itu melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur darat yaitu jalur sutra, yang kedua adalah jalur laut yang ditempuh melalui selat malaka. Jalur darat disebut *jalur sutra* karena barang yang paling utama diperdagangkan adalah sutra dari negri Cina yang terkenal halus. Jalur sutra ini dimulai dari negri Cina, terus melalui Asia Tenggara dan Turkestan sampai ke Laut Mediterania. (Husein, 2008: 155-156)

Beralihnya jalur perdagangan melalui Selat Malaka, secara otomatis mempengaruhi Nusantara (nama Indonesia ketika itu) dilewati serta disinggahi para pedagang, selain melakukan kegiatan perdagangan mereka juga menyebarkan agama Budha dan Hindu, proses alkulturasi budaya, menyebabkan daerah Nusantara dan kerajaan-kerajaan yang sudah ada di Nusantara terpengaruh oleh kebudayaan Hindu Budha. Munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, terlihat sangat jelas, kemunculan-kemunculan kerajaan yang bercorak Hindu Budha, diawali dengan kemunculan kerajaan bercorak Hindhu pertama di bumi Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai kertanegara. Kerajaan Kutai kertanegara terletak di daerah Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai kertanegara terletak di muara Kaman, yang terletak di tepi aliran sungai Mahakam. Bukti keberadaan kerajaan Kutai kertanegara bisa dibuktikan dengan ditemukanya beberapa prasasti berbentuk Yupa, yang menjelaskan beberapa hal tentang kerajaan Kutai kertanegara.

Semua Yupa tersebut didirikan atas perintah raja Mulawarman. Dari tulisan pada prasasti Kutai kita mendapat beberapa informasi berikut. 1). Sekurang- kurangnya ada tiga generasi dalam keluarga Kerajaan Kutai. 2). Raja pertama adalah **Kudungga**. Ia mempunyai putra bernama **Aswawarman**. Asmawarman disebut sebagai *vamsakarta*. Artinya pembentuk keluarga (dinasti). 3). Asmawarman memiliki tiga putra. Putranya yang terkenal adalah bernama **Mulawarman**. 4). Mulawarman menjadi raja yang terkenal karena baik bukti, bijaksana, adil, kuat dan sangat memprehatikan kesejahteraan rakyat sehingga rakyat makmur dan aman. 5). Pada masa pemerintahanya, ia mengadakan korban atau sedekah 1000 ekor sapi kepada Brahmana dan rakyat. Untuk memperingati kemurahan raja itulah, para Brahmana mendirikan Yupa. (Husein, 2008: 157-158)

Bukti-bukti tersebut ditemui dari beberapa penemuan Yupa, sebagai bentuk eksistensi keberadaanya kerajaan Kutai kertanegara, yang pernah ada ketika jaman tersebut.





Prasasti Kerajaan Kutai

Sumber diolah dari <http://www.zonasiswa.com/2014/05/sejarah-kerajaan-kutai.html> pada 23 April 2017

Gambar 3.6 bukti keberadaan Kerajaan Kutai kertanegara

Setelah berakhirnya kerajaan Kutai kertanegara, muncul lagi kerajaan di daerah Jawa Barat tepatnya terletak antara daerah Bogor dan Bekasi, kerajaan ini masih bercorak Hindu, seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Bukti keberadaan kerajaan ini bisa dilihat dari kehidupan keberagamaan masyarakat sebagai penganut Hindu yang taat, seperti raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara.



Prasasti Prasasti Ciaruteun Tarumanegara

Sumber diolah dari <http://www.yudhe.com/7-prasasti-peninggalan-kerajaan-tarumanegara/> pada 22 April 2017

Gambar 3.7 bukti keberadaan Tarumanegara

Beberapa penemuan prasasti tersebut menjelaskan tentang konsep raja yang diidentikkan yang disamakan dengan salah satu dewa dalam mitologi agama Hindu, penemuan-penemuan

prasasti tersebut menjelaskan tentang eksistensi dan keberagaman masyarakat Tarumanegara.

Prasasti ini sebelumnya dikenal dengan nama prasasti ciampea, terletak dipinggir sungai Ciaretuen terdapat lukisan laba-laba dan telapak kaki yang dipahatkan diatas hurufnya. Pada Prasasti Ciaretuen juga terdapat syair yang berbunyi: *-Ini bekas dua kaki yang seperti kaki yang seperti kaki dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Purnawarman, raja negri Taruma, yang gagah berani di dunia.* Prasasti Kebun Kopi, prasasti ini sering disebut Prasasti Telapak kaki Gajah. Prasasti ini terletak dikampung Muara Hilir, Cibungbulang. Pada prasasti ini ada dua tapak kaki gajah. Telapak kaki gajah ini disamakan dengan telapak gajah Airwata (gajah dari Kendaraan Dewa Wisnu). Terjemahan prasasti tersebut, antara lain berbunyi *-Di sini Nampak sepasang telapak kaki...yang seperti Airwata, gajah penguasa Taruma, yang agung dan...kejayaan".* (Husein, 2008: 158-159)

Keruntuhan kerajaan Tarumanegara tidak begitu jelas, akan tetapi ada perkiraan mengenai serangan yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya, yang waktu itu merupakan kerajaan besar yang bercorak Budha, selain untuk menguasai perdagangan kerajaan ini juga menyebarkan agama Budha. Setelah kehancuran kerajaan Tarumanegara, muncul kembali kerajaan Ho-Ling atau Kalingga yang terletak didaerah Jawa Tengah, kerajaan ini mayoritas memeluk agama Budha. Keberadaan kerajaan Ho-Ling atau Kalingga ini, dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti serta catatan-catatan dari bangsa asing yang ditinggalkanya.

Pertengahan abad VII (sekitar 650 Masehi) muncul kerajaan Ho-Ling. Kerajaan Ho-Ling diperkirakan terletak di Jawa Tengah...Catatan dari zaman Dinasti Tang. Cerita pada zaman dinasti Tang (618M- 906M) memberitakan Ho-ling sebagai berikut: 1). Ho-Ling atau disebut Jawa terletak di lautan selatan. Disebelah timurnya terletak pulau Bali, dan di sebelah barat terletak pulau Sumatra. 2). Ibukota Ho-Ling dikelilingi oleh tembok yang dterbuat dari tonggak kayu. 3). Raja tinggal di suatu bangunan besar bertingkat beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. 4). Penduduk Kerajaan Ho-Ling sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. 5). Daerah Ho-Ling menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak dan gading gajah. Catatan dari berita Cina juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674, rakyat Ho- ling diperintah oleh ratu sima (simo)...Catatan I Tsing (tahun 664/665m) menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa telah menjadi



salah satu pusat agama Budha Hinayana...prasasti peninggalan kerajaan Ho-Ling adalah Prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan didesa Dakwu daerah Grobogan, Purwodadi di lereng gunung Merbabu di Jawa Tengah. (Husein, 2008: 159- 160)

Bukti keberadaan kerajaan Ho-Ling, dengan beberapa bukti Autentiknya menggambarkan bahwa dahulu kerajaan tersebut maju dan berkembang, dengan tingkat keberagamaan masyarakatnya yang cukup tinggi.



Prasasti Tukmas Kerajaan Kalingga

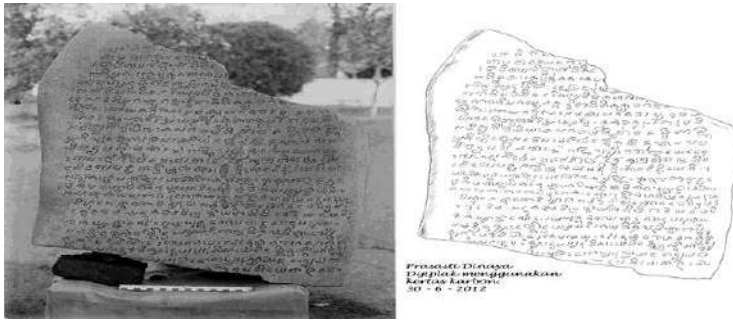
Sumber diolah dari

<http://deaseptianaputri.blogspot.co.id/2012/09/kerajaan-kalingga-holing.html> pada 22 April 2017

Gambar 3.7 bukti keberadaan Kerajaan Kalingga

Kehancuran kerajaan Kalingga tidak diketahui pasti akan tetapi, ini berkaitan dengan banyaknya kerajaan Jawa yang diserang oleh Kerajaan Sriwijaya, sehingga hancur. Setelah kehancuran kerajaan Ho-Ling, muncul kerajaan Hindu pertama didaerah Jawa Timur yaitu kerajaan Kanjuruhan, yang bercorak Hindu, kerajaan tersebut terletak ditepi sungai Metro daerah Dinoyo kelurahan Lowokwaru Kota Malang, saat ini.

Keterangan mengenai kerajaan Kanjuruhan diperoleh dari *Prasasti Dinoyo* (760 M). prasasti ditulis dengan huruf kawi (Jawa Kuno), dan ditemukan di desa Dinoyo (Kejuron) ditepi sungai metro Malang (Jawa Timur)...raja Kanjuruhan pertama adalah **Dewa Singha**. Ia digantikan oleh anaknya bernama **Liswa**. Liswa menjadi raja dan bergelar **Gajayana**. Gajayana menaganut agama Hindu Siwa. Selama masa pemerintahanya, ia membuat tempat pemujaan untuk Dewa Agastya yang terbuat dari bata merah. Si samping Arca juga terdapat bangunan batu bulat yang bernama lingga. Bangunan suci tersebut sekarang bernama Candi Badut. (Husein, 2008: 160)



Prasasti Dinoyo

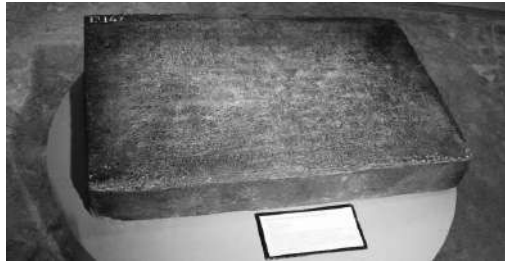
Sumber diolah dari <http://jawakuno.com/prasasti-dinoyo/> pada 22 April 2017

Gambar 3.7 bukti keberadaan Kerajaan Kanjuruhan

Kerajaan Kanjuruhan hancur ketika diserang oleh kerajaan Mataram Kuno, yang melakukan ekspansi untuk melebarkan daerah kekuasaanya. Kemunculan kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh dua dinasti yaitu Sanjaya dan Saiylendra, yang beragama Hindu dan Budha. kerajaan Mataram Kuno atau disebut dengan Bhumi Mataram. Pada awalnya terletak di Jawa Tengah. Daerah Mataram dikelilingi oleh banyak pegunungan dan di tengahnya banyak mengalir sungai besar diantaranya sungai Progo, Bogowonto, Elo, dan Bengawan Solo. Keadaan tanahnya subur sehingga pertumbuhan penduduknya cukup pesat...Prasasti-prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Mataram Kuno / lama.

Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di desa Canggal berangka tahun 732 M dalam bentuk Candrasangkala Prasasti Canggal menggunakan huruf pallawa dan bahasa Sansekerta isinya menceritakan tentang pendirian Lingga (lambang Syiwa) di desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja mula-mula Sanna kemudian digantikan oleh Sanjaya anak Sannaha (saudara perempuan Sanna) Prasasti Kalasan, ditemukan di desa Kalasan Yogyakarta berangka tahun 778 M, ditulis dalam huruf Pranagari (India Utara) dan bahasa Sansekerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh raja Panangkarana atas permintaan keluarga Syaellendra dan Panangkarana juga menghadiahkan desa Kalasan untuk para Sanggha (umat Budha). Prasasti Mantyasih ditemukan di Mantyasih Kedu, Jateng berangka tahun 907 M yang menggunakan bahasa Jawa Kuno Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Balitung

yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, dan Rakai Watukura Dyah Balitung. Untuk itu Prasasti Klurak ditemukan di desa Prambanan berangka tahun 782 M ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sansekerta isinya menceritakan pembuatan arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadananjaya. (Widyawarso, 2009:1-3) prasasti cangal ditemukan di Desa Cangal (Sebelah barat Magelang, Jawa Tengah). Prasasti Cangal berangka tahun 732 M. Prasasti ini dituliskan bahasa Palawa dan menggunakan bahasa sansekerta...Prasasti Kalasan berangka tahun 778 Masehi. Prasasti Kalasan menginformasikan terdesaknya wangsa sanjaya ke utara oleh Kedatangan wangsa Syailendra. Prasasti karang tengah, prasasti ini berangka tahun 824 Masehi. Prasasti mengisahkan tentang raja Samorotungga dan Pramodhawardhani dari dinasti syailendra. (Husein, 2008: 160-161)



Prasasti Kalasan Kerajaan Mataram Kuno

Sumber diolah dari

<http://budisusilo85.blogspot.co.id/2014/02/prasasti-kalasan-yogyakarta.html> pada 22 April 2017

Gambar 3.8 bukti keberadaan Kerajaan Mataram Kuno

Kejayaan kerajaan Mataram Kuno pada dinasti Sanjaya, ketika dipimpin oleh raja Sanjaya, kerajaan Mataram Kuno sangat makmur dan tentram kehidupan masyarakatnya, sehingga kehidupan yang tercipta menjadi sangat dinamis, dalam kehidupan tersebut persebaran agama Hindu sangat kuat. Masuknya Wangsa Sayilendra di bumi Mataram, akhirnya banyak menimbulkan pertentangan dengan dinasti Sanjaya, perebutan kekuasaan dan kepentingan untuk menyebarkan agama menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan, dahulu ketika dinasti Sanjaya dan Sayleindra sama-sama berkuasa pernah dilakukan upaya untuk meredam konflik tersebut dengan cara perkawinan politik antar dinasti, akan tetapi hal tersebut malah memperkuat perbedaan yang ada, bagaimana mereka menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing secara taat.

Pada masa pemerintahan Raka I Pikatan (dari Wangsa Sanjaya) dan Pramordhawardhani (dari Wangsa Sayleindra) terjadi penyatuan pemerintahan dan kekuasaan. Penyatuan terjadi melalui perkawinan antar keduanya...meskipun mereka bersatu dalam bentuk perkawinan, keduanya tetap bertahan pada agamanya masing-masing. Hal ini terbukti dengan adanya candi yang dibangun oleh keduanya. Pikatan membangun candi Roro Jongrang di Prambanan pada tahun 856 Masehi. Sedangkan Pramodawardhani menyelesaikan pembangunan candi Borobudur yang mulai dirintis pembangunannya sejak Raka I Panangkaran dan Samaratunga. (Ibid, 162)



Candi Perambanan

Sumber diolah dari
<http://www.rantinandrovin.com/wp-content/uploads/2012/11/Prambanan-2010-2-of-2.jpg> pada 22 April 2017



Candi Borobudur

Sumber diolah dari
<http://soeryonopost.blogspot.co.id/2015/08/candi-borobudur-dibangun-berdasarkan.html> pada 22 April 2017

Gambar 3.9 Pengaruh Hindu dan Budha di Kerajaan Mataram

Konflik yang tidak usai akhirnya membawa kemenangan dinasti Sayleindra dan menjadi penguasa Mataram. Dalam perkembangannya ketika masa pemerintahan raja Balitung, kerajaan dan Masyarakat Bumi Mataram sangat sejahtera dan aman, sampai pada masa pemerintahan Wawa sebagai penerus dari Raja-raja Wangsa Sayleindra. Dikatakan bahwa Bhumi Mataram terkena bencana Gunung Merapi yang menghancurkan daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang merupakan letak kerajaan Mataram.

Kondisi tersebut akhirnya membawa konsekuensi bagi Mataram melalui Mpu Sindok sebagai pejabat tinggi memindahkan kerajaan Mataram ke daerah Jawa Timur, kemudian dalam perkembangannya tetap digunakan nama Mataram sebagai Kerajaan dan ia mengangkat dirinya sebagai raja dan mendirikan wangsa baru yaitu Isyana.



Setelah mengalami kehancuran, Ibukota Mataram dipindahkan oleh **Mpu Sindhok** dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pada tahun 929 Masehi. Ibukota Mataram dipindah Watu Galuh dekat kota Jombang di tepi sungai Brantas. Karena keberhasilan memindahkan kerajaan tersebut Mpu Sindhok menyebut dirinya sebagai pendiri wangsa baru. Wangsa itu adalah Wangsa Isyana...(Op.Cit, 162).

Perkembangan kerajaan pada dinasti Isyana, terjadi ketika masa kepemimpinan raja Dharmawangsa yaitu keturunan dari Sri Mangkutawangsawardhana anak dari Putri Mphu Sidhok yaitu Isyanatunggawijaya. Pada Masa raja Dharmawangsa, Mataram mengalami kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Baginda raja memiliki keinginan untuk memakmurkan negrinya, hal ini selalu mendapat ganjalan dari kerajaan Sriwijaya dipulau Sumatra yang memiliki dendam terhadap kerajaan Mataram kuno, khususnya pada dinasti Isyana.

Ekspedisi yang dilakukan oleh raja Dharmawangsa, keluar Jawa ingin memperluas daerah kekuasaannya dan juga menguasai perdagangan yang pada waktu itu khususnya perdagangan di jalur laut telah dimonopoli oleh kerajaan Maritim dipulau Sumatra yaitu Sriwijaya, dengan keunggulan geografi atau letak wilayahnya, yang dilewati jalur perdagangan Internasional yaitu selat Malaka.

Pada tahun 1017, **Raja Wurawuri** menyerang Dharmawangsa. Raja Wurawuri merupakan bawahan Kerajaan Mataram. Diduga Raja Wurawuri menyerang Dharmawangsa atas dorongan kerajaan Sriwijaya. Waktu itu raja Dharmawangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Airlangga. Akibat penyerangan tersebut, seluruh keluarga Dharmawangsa terbunuh. Pristiwa ini disebut *Pralaya*. Hanya Airlangga yang meloloskan diri dari Pralaya ini. (Husein, 2008: 163)



Prasasti Pager Ukir Ponorogo

Sumber diolah dari

<https://pilgrim74.wordpress.com/2013/09/12/situs-bersejarah-pager-ukir/> pada 10 April 2017

Gambar 3.10 Penggemplengan Raja Airlangga Setelah terjadi Pristiwa Parlaya

Dalam pelarian tersebut Airlangga banyak mendapatkan pelajaran yang berharga, secara perlahan-lahan Airlangga, kembali melakukan penyerangan-penyerangan guna mempersatukan daerah yang dahulu lepas dari kerajaan Mataram. Akhirnya upaya yang dilakukannya berhasil. Airlangga merupakan keturunan dari Mpu Shidok dari putrinya yang bernama Mahendradhata (Ghunapridharmapatni) yang menikah dengan Udayana yang menjadi raja di Bali. (Husein, 2008: 163)

Setelah berhasil menguasai Mataram dan mempersatukannya, raja Airlangga membagi kekuasaan Mataram menjadi dua yaitu Kerajaan Panjalu dan Jenggala, yang terletak di Kahuripan dan Daha Kadiri. Setelah beliau wafat, kemudian terjadi perang saudara antara Jenggala dan Panjalu, yang mengakibatkan keruntuhan Mataram. Sampai pada masa pemerintahan Kertajaya, yang harus merelakan kerajaannya diambil oleh Ken Arok.

Ken Arok merupakan seorang tokoh pemberani, yang memimpin Singhasari setelah mengalahkan Tunggul Ametung adipati Tumapel atau Malang saat ini, tidak hanya itu Ken Arok juga memperistri Ken Dedes Istri dari Tunggul Ametung. Dalam masa pemerintahan Ken Arok, banyak sekali pertumpahan darah antar keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung, sebagai karma dari perbuatan Ken Arok membunuh Tunggul Ametung.

Beberapa bulan setelah Tunggul Ametung dibunuh, Ken Dedes melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusapati. Perkawinan Ken Arok dengan Ken Dedes menurunkan Mahisa Wong Ateleng. Dari perkawinannya Ken Umang Ken Arok mempunyai anak bernama Tohjaya. Setelah dewasa Anusapati mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Ken Arok. Sebagai balas dendam atas kematian ayahnya, pada tahun 1227, Anusapati membunuh Ken Arok dengan menggunakan keris buatan Mpu Gandring. Anusapati naik tahta pada tahun 1248 menggantikan Ken Arok. Pada tahun 1428 Anusapati dibunuh oleh Tohjaya. Anusapati dimakamkan di candi Kidal. Kemudian Tohjaya naik tahta menjadi raja Singasari. Ia memerintah hanya beberapa bulan. Pada tahun 1248 ia dibunuh oleh Ranggawuni. Ranggawuni adalah anak Anusapati. Raanggawuni Naik tahta menggantikan Tohjaya dengan Gelar Sri Jaya Wishnuwardhana. Ranggawuni memerintah didampingi oleh sepupunya bernama Mahisa cempaka dan Mahisa Wong Ateleng...pada masa pemerintahan Wishnuwardhana Negara dalam keadaan aman dan tentram. Pada tahun 1254, Wishnuwardana menobatkan anaknya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda. (Husein, 2008: 165)



Setelah meninggal raja Wisnuwardhana, kertanegara memerintah Singosari secara bijak, kekuasaan singosari semakin luas, sehingga menjadi kerajaan besar. Akan tetapi tekanan demi tekanan menjadikan Kertanegara lemah, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Jayakatwang ketika tentara Mongol menyerang Singosari, alhasil Singosari dapat ditaklukan. Setelah meninggal Kertanegara dimakamkan di candi Singosari dalam tiga bentuk arca Bhairawa, Aksobhaya, Ardhanari. Kertanegara juga dikuburkan di candi Jawi yang merupakan perpaduan antara Candi Hindu dan Budha.



Candi Singhasari

Sumber diolah dari

<http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/12/peninggalan-kerajaan-singhasari-5-candi.html> pada 10 April 2017

Gambar 3.11 Candi Peninggalan kerajaan Singosari

Sedangkan di daerah Sumatra terdapat kerajaan Besar yang bernama Sriwijaya, yang agak berbeda dari kerajaan - kerajaan yang ada di Nusantara karena kerajaan ini mayoritas menganut agama Budha. Ada beberapa pembuktian mengenai keberadaan Sriwijaya antara lain. Seperti Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Palas Pasemah, dan beberapa peninggalan lainnya.

Prasasti kedukan bukit ditemukan di (605 saka/688 M), Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Talang dekat Palembang, isinya antara lain mengatakan bahwa seorang yang bernama Dapunta Hyang mengadakan perjalanan suci (*Siddhayarta*) dengan perahu. ia berangkat dari Minangamatwan dengan membawa tentara sebanyak 20.000. dalam perjalanannya ini ia berhasil menaklukan beberapa daerah, sehingga dengan kemenangannya ini Sriwijaya menjadi makmur. Prasasti Telaga Batu, prasasti ini ditemukan disebelah barat kota Palembang. Prasasti ini tidak berangka tahun. Isinya berupa kutukan bagi mereka yang melakukan kejahatan dan tidak taat terhadap Raja. Prasasti Talang Tuo prasasti ini berangka tahun 606 Saka atau

684 Masehi. Isinya tentang pembuatan taman yang diberi nama **Sriksetra** yang dibuat oleh **Dapunta Hyang Sri Jayanaga** untuk kemakmuran semua makhluk. Prasasti kota Kapur, prasasti yang ditemukan di pulau Baangka ini berangka tahun 686 M. prasasti ini menceritakan permintaan kepada dewa untuk menghukum setiap orang yang tidak tunduk kepada kekuatan Kerajaan Sriwijaya. (Husein, 2008: 167)

Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Kedukan Bukit, di tepi sungai Talang dekat Palembang, berangka tahun 605 Saka atau 683 M. Isi prasasti tersebut menceritakan perjalanan suci/Sidayatra yang dilakukan Dapunta Hyang, berangkat dari Minangatamwan dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang. Dari perjalanan tersebut berhasil menaklukkan beberapa daerah. b. Prasasti Talang Tuoditemukan di sebelah barat kota Palembang berangka tahun 606 Saka / 684 M. Prasasti ini menceritakan pembuatan Taman Sriksetra untuk kemakmuran semua makhluk dan terdapat doa-doa yang bersifat Budha Mahayana. c. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Telaga Batu dekat Palembang berangka tahun 683 M. d. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Kota Kapur pulau Bangka berangka tahun 608 Saka / 686 M. e. Prasasti Karang Berahi ditemukan di Jambi tidak berangka tahun. f. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di Lampung Selatan tidak berangka tahun. (Widyarso, 2009: 1).

Bukti-bukti tentang penemuan prasasti – prasasti yang menguatkan keberadaan kerajaan Sriwijaya, merupakan bukti autentik, tentang eksistensi Sriwijaya sebagai kerajaan yang besar.



Prasasti Palas Pasemah

Sumber diolah dari <http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/10/9-prasasti-peninggalan-kerajaan-sriwijaya.html> pada 10 April 2017

Gambar 3.12 Peninggalan kerajaan Sriwijaya



Bukti autentik tersebut merupakan, gambaran tentang masa kejayaan Sriwijaya, yang menguasai jalur perdagangan laut kala itu, sehubungan dengan tidak diminatnya jalur sutra sebagai jalur perdagangan internasional, dan lebih dipilihnya selat Malaka yang terletak di daerah Sumatra tempat berdirinya kerajaan Sriwijaya. Setelah mengalami kejayaan, secara perlahan-lahan kerajaan Sriwijaya mulai melemah kondisinya, hal ini dibarengi dengan berdirinya kerajaan Majapahit di daerah Jawa, yang mulai melakukan ekspansi secara besar-besaran. Selain itu beberapa bentuk penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan asing yang ingin menguasai jalur perdagangan di selat Malaka, akhirnya membuat daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya mulai melepaskan diri serta, tidak lagi memberikan pajak atau upeti kepada pihak kerajaan.

Munculnya kerajaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dari peranan Singosari atau Raden Wijaya, yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah calon menantu raja Kertanegara Raja terakhir kerajaan Singosari, dimana Raden Wijaya setelah mengalami kekalahan melarikan diri ke hutan bersama pengikut-pengikut setianya. Atas desakan dari para pengikutnya Raden Wijaya akhirnya meminta pertolongan kepada Aria Wiraraja Bupati Madura yang juga ayah dari Nambi, permohonan bantuan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan diberikannya tanah Tarik daerah sekitar Majapahit untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Secara perlahan-lahan Raden Wijaya melakukan provokasi serta negosiasi kepada tentara Mongol untuk menyerang kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang, kondisi tersebut akhirnya membuahkan hasil dimana pasukan Mongol telah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri, tentara Raden Wijaya menyerang tentara Mongol, yang tentunya tidak disangka-sangka oleh tentara Tarik tersebut. Hasilnya kerajaan Kediri dapat ditaklukkan serta dapat mengusir mundur tentara Mongol.

Para pengikutnya yang selamat menyarankan Raden Wijaya meminta bantuan kepada Ari Wiraraja (**Bupati Madura**). Semula saran tersebut ditolak. Alasannya adalah Wiraraja teman Jayakatwang. Akan tetapi, atas desakan para pengikutnya dan juga jaminan dari Nambi (Petera Wiraraja), akhirnya usul tersebut diterima. Raden Wijaya bersama pengikutnya diterima dengan hormat oleh **Wiraraja**....selang beberapa lama kemudian Raden Wijaya memohon tanah Tarik (Sekitar daerah Mojokerto, Jawa Timur). Untuk dijadikan daerah kedudukannya. Permintaan Raden Wijaya dikabulkan. Dia diberikan bekal secukupnya untuk membuka hutan Tarik...pada akhir tahun 1292, tentara Mongol



mendarat di Tuban untuk menghancurkan Singosari...di cangu, pasukan Cina bergabung dengan Pasukan Raden Wijaya menuju ke Kediri untuk melawan pasukan Jayakatwang. Mereka tidak tahu bahwa Negara yang mereka serang telah mengalahkan Singosari. Karena serangan mendadak ini Kediri Jatuh dan Jayakatwang pun gugur. Kemudian tentara Raden Wijaya berbalik menyerang sisa-sisa tentara Cina. Serangan yang tiba-tiba itu menyebabkan tentara Tartar tidak dapat mengelak dan melawan sehingga kacau balau dan banyak yang terbunuh. (Husein, 2008: 168)

Pendirian kerajaan Majapahit itu sendiri diawali dari rangkaian peperangan Khu Bilai Khan dari China akhirnya di perairan Nusantara. Mereka bermaksud menghukum Kertanegara, Raja Singasari yang tidak mau tunduk, malahan bersikap menghina terhadap kekaisaran Cina. Satu tim dari pasukan itu berangkat mendahului yang lainnya. Misi mereka adalah kembali membujuk raja Kertanegara untuk menyerah, agar peperangan tidak perlu terjadi. Kabar ini sampai kepada telinga raden Wijaya. Dengan cerdik ia menghubungi pasukan pendahulu ini. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggempur Jayakatwang yang telah menyingkirkan Kertanegara menantu Wijaya. Ia berjanji akan membantu pasukan Cina...serangan demi serangan dilakukan oleh pihak Cina dan Wijaya sampai akhirnya pertahanan Kediri Jebol. Raden Wijaya dan Cina memenangkan peperangan, meskipun tidak sedikit pula anggota mereka yang tewas. Jayakatwang menyerah. Setelah Kediri jatuh, Wijaya mengundurkan diri dan kembali ke Majapahit. Akan tetapi diam-diam wijaya menyiapkan pasukan untuk mengalahkan pasukan Cina Tartar tersebut. Seluruh pasukan Cina yang ada bersamanya habis ia bunuh. Dengan demikian kukuhnya kedudukan Wijaya, maka semakin kukuh pula kerajaan Majapahit. (Nurhadi, 2009: 3-4)

Penguasaan terhadap Kediri mengawali kepemimpinan Raden Wijaya sebagai raja Majapahit, di awal kepemimpinannya banyak para pengikut setianya yang tidak puas dengan berbagai keputusan yang dibuat oleh Raja, oleh karena itu banyak terjadi pemberontakan dimana-mana, sampai pada masa kepemimpinan raja Jayanegara, sampai pada akhir masa kepemimpinannya akan tetapi api pemberontakan tetap belum bisa dipadamkan. Karena tidak memiliki keturunan akhirnya raja Jayanegara digantikan oleh Gayatri, akan tetapi karena ia telah menjadi pertapa, maka anaknya yang menggantikannya sebagai raja yaitu Tribhuanatunggadewi Jayawisnuwardhani, setelah wafat sang raja digantikan oleh anaknya yaitu Hayam Wuruk.



Kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi ketika masa pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Maha Patih Gajah Mada, dimana Majapahit melakukan ekspansi besar-besaran ke daerah Nusantara, untuk mempersatukan daerah koloni ke dalam panji-panji Majapahit. Atas gagasan sang patih kemudian dengan konsep -sumpah palapa|| kemudian Majapahit, menjadi besar dan memiliki kekuasaan yang luas, yang diperhitungkan di dunia. deteksi dalam teks amukti palapa (sumpah palapa) dalam naskah pararaton tahun 1334 Masehi, bahwa istilah *Nusantara* sebagai wilayah-wilayah yang perlu dikalahkan Majapahit : *Sirah Gajah Mada, Patih Amangkubhumi, tan ayun amukti palapa. Sirah Gajah Mada: Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa.* (Wieshguna, tt: 7)

Denys lombard (2000 : 39-40) lebih menekankan *Nusantara* sebagai jaringan kantor-kantor dagang yang dikuasai Kerajaan Majapahit pada periode keemasannya yaitu : 25 negeri yang sama dengan keseluruhan Sumatra; daftar itu mulai dengan Melayu, Jambi, dan Palembang, Minangkabau, Siak, Kampar, daerah- daerah Batak, kantor-kantor dagang di utara (Samudra dan Lamuri) dan berakhir dengan Lampung dan Barus. 24 negeri disebut dari pantai selatan, barat dan utara Kalimantan (Kutai, Pasir, Barito, Kuta Waringin, Lawai, Kapuhas, Sambas, Buruneng yang mestinya sama dengan Brunei). Ada 16 negeri yang boleh jadi terletak di Semenanjung Melayu diantaranya Pahang, Lengkasuka, Kalanten, Tringgano, Tumasik, Kelang, dan Kedah). Akhirnya ada 33 di sebelah timur Pulau Jawa, di Kepulauan Nusa Tenggara Barat (Bali, Lombok, Dombo, Bima, Sumba), di Sulawesi (Luwuk, Makasar, Butun, Salaya), di Kepulauan Maluku (Gurun, Seran, Ambwan, Maloko) atau lebih jauh lagi (Timur yaitu Timor dan Wwanin yang mestinya Onin di Irian). (ibid, 6-8).

Untuk menempuh jarak dari Ibukota Majapahit di Mojokerto menuju Bali, dibutuhkan waktu berhari-hari dengan menggunakan kuda atau perahu. Namun, dizaman itu, ada seseorang yang mampu mempersatukan wilayah Nusantara yang demikian luas, yang luasnya sama dengan Indonesia sekarang (Hariadi, 2006: X)

Kejayaan tersebut meninggalkan beberapa peninggalan sejarah seperti candi ataupun prasasti sebagai bukti keberadaan kerajaan Majapahit, yang melegenda yang terlahir sebagai kerajaan adidaya pada masa itu.



Gapura Bajang Ratu

Sumber dilah dari <http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/10/9-candi-peninggalan-kerajaan-majapahit.html> pada 10 April 2017

Gambar 3.13 Peninggalan kerajaan Majapahit

Kejayaan kerajaan Majapahit, berangsur-angsur surut ketika terjadi konflik Internal dalam kerajaan mengenai perebutan kekuasaan, selain itu kuatnya daerah-daerah yang terpengaruh oleh Islam, akhirnya membawa kepada kondisi tentang upaya-upaya Islam yang merongrong kekuatan Majapahit, Islam kuat dan juga memiliki kelebihan dengan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh ajaran Agama Islam, akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa itu.

Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia terutama di Jawa setelah berakhirnya masa Hindu-Budha yang ditandai dengan kemunduran dan keruntuhan kerajaan Majapahit sebagai salah satu pusat kekuatan dan kekuasaan besar terakhir yang berpusat di Jawa yang bercorak Hindu-Budha. Dengan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara mendorong tumbuhnya peradaban (*tamaddun*) Islam di Nusantara (Ambary, 1997:35), yang ditandai dengan munculnya tatanan-tatanan baru yang bersendikan pada asas dan ajaran Islam. (Nugroho, 2004:65)



Makam Islam Fatimah Binti Maimun

Sumber diolah dari http://travel.detik.com/dtravelers_stories/u-2963977/makam-ulama-sepanjang-9-meter-di-gresik-seperti-apa/3 pada 22 April 2017

Gambar 3.14 Keberasaan Islam di Nusantara

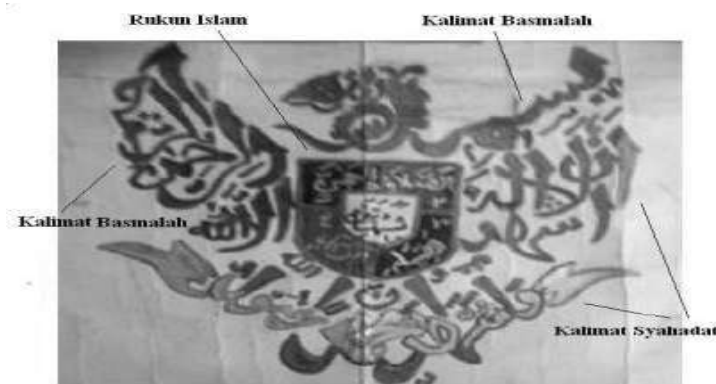
Keruntuhan Majapahit sebagai penanda masuknya Islam dan mempengaruhi kehidupan Masyarakat Nusantara kala itu, tidak bisa dilepaskan dari peran penyebar agama Islam di Nusantara, mereka adalah para pedagang, yang melakukan transaksi ekonomi dengan pedagang pribumi di Nusantara, selain berdagang mereka juga berdakwah dalam upaya menyebarkan Islam ke penjuru dunia.

Pada abad ke-8 agama Islam menyebar ke Spanyol dan China. Pada abad ke-10, agama Islam telah menyebar ke Gujarat India. Itulah sebabnya pedagang-pedagang Arab dan India (Gujarat) yang datang setelah abad 10 merupakan pemeluk agama Islam. Melalui hubungan dengan pedagang ataupun kontak dengan penduduk selama berdiam di sebuah kota pelabuhan, agama Islam akhirnya juga samapai dan menyebar ke Indonesia. (Husein, 2008: 175)

Di Jawa kejatuhan kerajaan Hindu Majapahit kira-kira dalam tahun 1581 M., merupakan hasil yang gemilang bagi perjuangan yang gigih dari Islam terhadap Hindu. Dalam abad ke XVI itu juga telah berdiri di Jawa kerajaan- kerajaan Islam Mataram, Banten dan Cirebon, yang mengIslamkan rakyatnya...Dr. B.J.O Schrieke dalam kitabnya – *Het Boek van Bonang*|| (Diss. Leiden, 1916) menyimpulkan dan membicarakan kembali catatan Marcopolo itu, yang menerangkan bahwa berita yang pertama mengenai Islam masuk ke Indonesia ditetapkan dalam tahun 1929. Ceritanya yang panjang ditulis dalam kitabnya, bernama sejarah mangindanau. Al Hadad menerangkan, bahwa pembawa Islam itu ada hubungan keturunan dengan Ali Zainal Abidin, cucu nabi Muhammad yang berangkat dari Hadramaut (Arab selatan) ke Johor disemenanjung Malaya. Juga Syarif Abu Bakar (1450-1480) yang turut menyiarkan agama ke Sulu konon berasal dari anak cucu Zainal Abidin juga. Peniar Islam pertama di Mangindanau mungkin Ibrahim Zainudin Al-Akbar., sedang Syarif Makdum atau Makdum Ishak dianggap termasuk orang pertama yang membawa masuk Islam ke pulau-pulau sebelah timur. Dikatakan bahwa ia datang ke Jawa pada zaman Ampel tahun 801. bersama anak dan saudara-saudaranya, begitu juga pamanya yang bernama Malik Ibrahim yang kuburanya terdapat di Gapura, Gresik...dengan demikian dapat dipastikan bahwa Islam masuk ke Jawa sebelum tahun 648 H. Meskipun yang sudah dibuktikan adalah tahun 678 H. (Atjeh, 1985: 6-16)

Menurut J.C Van Leur, berdasarkan berbagai cerita perjalanan dapat diperkirakan bahwa sejak 674 M ada koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera, yaitu di Barus, daerah penghasil kapur Barus terkenal. Dari berita Cina diketahui bahwa

dimasa dinasti Tang (abad ke 9-10). Orang-orang Ta- shin sudah ada dikanton (Kan-fu) dan Sumatera. Ta-shin adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia, yang ketika itu jelas sudah mejadi muslim. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat Internasional antara negeri-negeri di Asia bagian Barat dan Timur mungkin disebabkan oleh kerajaan Islam. Akan tetapi belum ada bukti bahwa pribumi Indonesia di tempat-tempat yang disinggahi oleh para pedagang muslim itu yang beragama Islam. (Tarjiono, 2010: 4)



Lambang Kerajaan Samudra Pasai

Sumber diolah dari <https://kanzunqalam.com/2016/02/20/misteri-lambang-kerajaan-islam-samudra-pasai/> pada 20 April 2017

Gambar 3.15 Jejak Islam di Kerajaan Samudra Pasai

Faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Majapahit runtuh antara lain sebagai berikut: 1). Di Majapahit tidak ada lagi pemerintahan yang kuat setelah Wafatnya Gajahmada dan Hayam Wuruk. 2). Terjadinya perang saudara antara Ratu Suhita dengan Bhre Wirabhumi yang disebut perang Paregeg. 3). Daerah-daerah bawahan Majapahit banyak yang melepaskan diri. 4). Armada China datang dibawah pimpinan Laksamana Ceng-Ho. 5). Agama Islam mulai berkembang dipulau Jawa. (Husein, 2008: 171).

Masuknya Islam ke Nusantara banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1). Syarat masuk agama Islam tidak begitu sulit. Seseorang dianggap telah masuk agama Islam apabila sudah mengucapkan dua kalimat sahabat. 2).Penyebaran agama Islam bisa dilakukan oleh setiap muslim. 3). Upacara- upacara dalam agama Islam lebih sederhana. 4). Agama Islam tidak mengenal kasta sehingga mempermudah Islam Untuk masuk ke Nusantara, dimana. Agama Islam mengakui dan memperjuangkan bahwa semua manusia sederajat atau sama dimata Tuhan. 5). Agama Islam tidak menentang adat/tradisi yang sudah ada di Indonesia.

6). Secara ekonomis, Islam mengajarkan adanya kesejahteraan social dengan adanya kewajiban zakat bagi yang memiliki harta (zakat fitrah amal dan sebagainya)...7). Kemunduran dan kejatuhan Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa, memberikan keleluasaan berkembangnya kekuasaan Islam. 8). Peran Ulama, Kiay dan para Dai sangat besar manfaatnya bagi perkembangan Islam di Indonesia. (Husein, 2008: 175-176).

Ketika itu pengaruh Hindu, Budha, serta kepercayaan masyarakat Nusantara sangat kuat, sehingga perlu pendekatan dan metode khusus untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara....Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serata dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat perdagangan-perdagangan muslim (Arab, Persia dan India) turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri- negeri dari bagian barat, Tenggara dan Timur Benua Asia. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status social yang lebih baik dari pada kebanyakan pribumi sehingga penduduk pribumi, terutama puteri-puteri bangsawan, tertarik untuk menjadi isteri-isteri saudagar itu. Sebelum kawin, mereka di Islam kan terlebih dahulu. Pengajar-pengajar tasawuf, atau para sufi, mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kyai- kyai dan ulama'- ulama' dipesantren atau pondok itu. Calon ulama', guru agama dan kyai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang kekampung masing-masing atau berdakwak ketempat tertentu mengajarkan islam. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sebagaimana besar cerita wayang masih dipetik dari cerita mahabharata dan Ramayana, tetapi didalam cerita itu disisikan ajaran dan nama-nama pahlawan islam, kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra (Hikayat, Babat dan Sebagainya), seni bangunan dan seni ukir. (Tarjiono, 2010: 7-8)

Sejak abad ke – 7, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Disamping berdagang, para pedagang Islam mengajarkan agama...para pedagang Islam mempunyai status



ekonomi yang lebih baik sehingga penduduk pribumi, putri bangsawan, menjadi tertarik kepada para pedagang Islam. Dengan begitu terjadilah perkawinan antara pedagang Islam dengan penduduk Indonesia...para ulama, gurur-guru agama para kyai mendirikan pondok pesantren untuk mendidik para santri. Para santri di didik tentang agama Islam. Setelah selesai mereka pulang kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan dan mengajarkan agama dan budaya Islam kepada masyarakat sekelilingnya. (Husein, 2008: 176)

Dalam perkembangannya, pengaruh Islam semakin kuat dengan perkembangannya di Bidang politik dan pemerintahan dimana banyak lahir kerajaan-kerajaan Islam di penjuru Nusantara antara lain kerajaan Mataram Baru, Demak, Cirebon, di pulau Jawa. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, di Pulau Sumatra.

Setelah terjadi proses penyebaran Islam lambat laun tumbuh dan berkembang Kesultanan-Kesultanan dengan dinamika sejarahnya dalam berbagai aspek: social-politik, social ekonomi-perdagangan, social keagamaan dan kebudayaan. Dalam bidang sosial-politik biasanya terjadi pergantian kekuasaan yang mulus tetapi kadang - kadang tidak mulus. Tidak mulus disebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga; dan juga kadang-kadang karena hasutan politik dari luar dari pihak yang menginginkan penjajahan termasuk bidang monopoli perdagangan. (Tjandrasasmita, 2007: 2)

Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia Islam. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir timur Aceh. Letak kerajaan ini sangat strategis karena dekat dengan selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur pelayaran perdagangan Internasional.semula kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang terpisah. Pada tahun 1285, Raja Marah Silu (Raja Samudra) berhasil menyatukan kerajaan samudra dan kerajaan pasai. Penyatuan dua kerajaan itu dibantu saudagar-saudagar muslim dari Mesir. Marah Silu kemudian memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Malik Al- Shaleh. (Husein, 2008: 180)

Bukti keberadaan kerajaan Samudra Pasai, bisa di lihat dari makam, Sultan Malik Al-Sholeh serta penggunaan uang pada masa tersebut, sebagai ukuran bagaimana perkembangan Islam



serta perdagangan di daerah kerajaan tersebut, yang sudah menggunakan uang emas dalam melakukan transaksi.



Masjid Raya Baiturohman Peninggalan kerajaan Aceh

Sumber diolah dari

<http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/12/6-peninggalan-kerajaan-aceh-keterangan.html> pada 10 April 2017

Gambar 3.16 Jejak Islam di Kerajaan Aceh

Kerajaan Samudra Pasai akhirnya hancur diawali ketika diserang oleh kerajaan Majapahit, akan tetapi Kerajaan Samudra Pasai bisa bertahan sampai abad ke - 15, kemudian dapat dikuasai oleh pemerintah portugis, dikuasainya kerajaan Samudra Pasai oleh Portugis, ternyata mengusik para pedagang karena peraturan yang dibuat sangat merugikan, sehingga setelah kehancuran kerajaan Samudra Pasai, kemudian muncul kerajaan Aceh. Karena mayoritas para pedagang dari Arab, India, serta China beralih ke daerah Aceh, tepatnya didaerah kerajaan Aceh. Perkembangan kerajaan Aceh, setelah merdeka dari kerajaan Pedir, bersamaan dengan itu, dengan beralihnya perdagangan melalui pelabuhan Aceh, sehingga kerajaan Aceh mempersiapkan segalanya untuk peningkatan kualitas serta pelayanan kepada para pedagang, agar para pedagang tidak berpindah ke lain daerah.

Untuk menyambut para pedagang yang semakin ramai tersebut, Aceh mempersiapkan dan memperbaiki sarana-sarana di pelabuhan, dan menambah jumlah pegawai dan mengakat syahbandar kebangsaan Turki yang sudah berpengalaman. Selain itu, armada angkatan laut juga terus diperkuat guna mengamankan dari gangguan Portugis. Pada amsa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1606-1637) Aceh mencapai kejayaan.

Wilayah kekuasaannya bertambah luas. Kehidupan keberagamaannya mengalami perkembangan pesat. (Ibid, 180)

Perkembangan kerajaan Aceh, meninggalkan beberapa bukti sejarah yang hingga saat ini dapat di temui, baik berupa makam maupun naskah- naskah kuno, serta kitab-kitab Tafsir Al – Quran yang sangat terkenal.

Berbagai peninggalan sejarah yang ada di Aceh mengalami kehancuran oleh berbagai faktor baik disengaja ataupun tidak. Cukup banyak mesjid kuno yang dibangun pada abd ke-17 dihancurkan lalu diganti atau dibangun mesjid yang baru. Makam dengan berbagai jenis tipe nisan kubur mulai abad ke-13 hingga akhir Kerajaan Aceh abad ke-19 banyak terbengkalai, sebagian dijadikan batu pengasah oleh masyarakat setempat. (Ibrahim, 2006: 1-2)

Keruntuhan kejayaan kerajaan Aceh terjadi ketika wafatnya Sultan Iskandar muda, setelah itu kondisi kerajaan semakin lemah, ketika digantikan oleh penerusnya, sering terjadi perselisihan pendapat antara raja dengan para ulama yang ada ketika itu. Perkembangan Islam selanjutnya adalah ketika zaman kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pertama adalah kerajaan demak, dimana kerajaan demak merupakan kerajaan yang dahulunya merupakan daerah bekas kekuasaan Majapahit.

Demak merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam di pantai utara pulau Jawa yang menonjol pada abad ke- 16. Kerajaan demak didirikan sekitar tahun 1500. Sebelumnya, Demak adalah salah satu daerah Majapahit...Raja pertama kerajaan Demak adalah **Pangeran jimbun**. Kemudian wafat dan digantikan Pati Unus, kemudian Pati Unus Wafat dan digantikan Pangeran Sekar, Kemudian digantikan Pangeran Trenggana. (Husein, 2008: 181)

Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggana mencapai kejayaan Demak, dimana untuk membendung kekuatan Portugis dan politiknya, Demak juga melakukan penaklukan-penaklukan terhadap daerah-daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat. Setelah Raja Trenggana wafat terjadi perebutan kekuasaan untuk menguasai Demak, keturunan Sultan Trenggana Parwata mengangkat dirinya menjadi sultan sebagai pengganti ayahnya, akan tetapi keputusan tersebut tidak diakui oleh petinggi kerajaan, hal ini berbuntut terhadap kondisi perpecahan yang terjadi di Demak, terjadi perebutan kekuasaan antara **Arya Penangsang** (Keturunan sekar Sada Lepen) dengan **Prawata** (Keturunana Sultan Trenggana) banyak wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan, walaupun demikian kondisinya banyak sekali



bentuk- bentuk peninggalan kerajaan Demak, sebagai bukti eksistensi kerajaan tersebut di Nusantara.

Ketika kondisi Kerajaan Demak sedang mengalami Gejolak, tepatnya diawali dari Wafatnya Prawata, kemudian Jaka Tingkir atau Adipati Pajang mengangkat dirinya sebagai Sultan pewaris Demak, Jaka Tingkir dikenal dengan nama Mas Karebebt atau Hadiwijaya. Naik tahta menjadi Sultan Agung Pajang dengan istananya yang terletak di daerah Boyolali Jawa Tengah. Pusaka kerajaan Majapahit, yang disimpan di Demak dipindahkan ke Istana Pajang. Kondisi yang carut-marut ketika itu, akhirnya membawa kepada keadaan untuk melakukan penyerangan terhadap *Arya Penangsang*, yang dipimpin Hadiwijaya atau Joko Tingkir untuk memimpin penaklukan- penaklukan, bersama dengan *Ki Ageng Pemanahan* (Ki Ageng Mataram). Dan *Danang Sutawijaya* (Putra Pemanahan).

Setelah berhasil mengalahkan Aria Panangsang, kemudian Hadiwijaya, mengangkat Aria Pangiri sebagai Bupati di Demak. Ki Ageng Pemanahan (Ki Ageng Mataram) diangkat menjadi Bupati Mataram. Sutawijaya diangkat sebagai anak pungut oleh Hadiwijaya dan dibesarkan diadalam Istana bersama Pangeran Benawa (putra Mahkota). Kemudian setelah wafatnya Hadiwijaya, konflik kembali terjadi dan memporak- porandakan keadaan waktu itu. Kondisi tersebut berhasil diredam oleh Pangeran Benawa dibantu Sutawijaya, akan tetapi pangeran Benowo akhirnya menyerahkan kekuasaanya kepada Sutawijaya karena merasa tidak mampu untuk memimpin.

Kepemimpinan Sutawijaya mengawali berdirinya kerajaan Mataram Baru, sebagai kerajaan yang bercorak Islam, dimana dalam perjalananya Sutawijaya melakukan penaklukan- penaklukan yang terus menerus dilakukan dari beberapa penerus seperti Mas Jolang (***Penembahan Sida Keprak***), lalu setelah wafat digantikan oleh ***Mas Rangsang*** atau dikenal dengan Sultan Agung. Ketika pemerintahan masa Sultan Agung, mengalami kemajuan dan kejayaan, hal tersebut bisa dilihat dari bukti-bukti mengenai keberadaan Kerajaan Mataram.



Majid Agung Demak peninggalan kerajaan demak
 Sumber diolah dari <http://jagosejarah.blogspot.co.id/2015/03/bukti-peninggalan-kerajaan-demak-yang.html> pada 10 April 2017

Gambar 3.17 Jejak Islam di Kerajaan Demak

Konflik pun terjadi karena Belanda turut campur dalam urusan pemerintahan Mataram Baru, sehingga menjadikan kondisi perpolitikan semakin kacau Alhasil, Kerajaan Mataram dibagi-bagi kedalam beberapa wilayah antara lain: 1). Kerajaan Yogyakarta, 2). Kerajaan Surakarta, 3). Kerajaan Pakualaman, dan 4). Kerajaan Mangkunegaraan. (Husein, 2008: 184)

Runtuhnya dominasi kerajaan Islam di Nusantara, tidak dapat dilepaskan dari ekspansi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, yang sedang mengalami krisis, sehingga bangsa-bangsa seperti Portugis dan Belanda, melakukan ekspedisi dengan motif melakukan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang saat itu dominan di Bumi Nusantara, kondisi itu, membuahkan berbagai macam kesepakatan dan konsensus, yang pada awalnya saling menguntungkan, akan tetapi dalam perkembangannya bangsa- bangsa Eropa pada khususnya, memiliki maksud-maksud yang terselubung, karena ingin menguasai kekayaan sumberdaya alam yang terbentang diseantero Nusantara dengan manuver-manuver politiknya yang terkenal licik dan kejam.

Bangsa eropa yang pertama kali datang ke dunia Timur adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka membawa armada kapalnya ke dunia Timur dengan membawa misi agama, perdagangan, dan daerah koloni. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1494 diadakan perjanjian antara pihak Spanyol dan Portugis yang disebut dengan "*Tratados de tordesillas*", yang seakan membagi dunia dalam kekuasaan mereka. Dalam perjanjian itu ditarik garis khayal dari sebuah titik yang terletak 370 mil disebelah barat



Tanjung Verde melintas dari Kutub Utara ke Kutub Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut Armada Portugis berangkat ke arah timur dengan harapan menemukan dunia Timur, sementara armada Spanyol berangkat ke arah barat. Yang kemudian perjanjian tordesillas inilah yang mengawali lahirnya kolonialisme dan imperialisme di dunia Timur oleh Bangsa-bangsa Barat. (sumber diolah dari <https://insulinda.wordpress.com/2015/09/08/penjajahan-bangsa-portugis-dan-spanyol-di-indonesia/> pada 01 Maret 2017)

...masa ini muncul dengan semboyan *Gold, Gospel, Glory* (Gilpin 1987). Negara-negara baru tersebut membutuhkan sutikan pemasukan ekonomi mencari wilayah-wilayah lain diluar wilayah mereka untuk dijadikan tambang emas. Selain mencari emas, mereka juga membawa misi lain yaitu menyebarkan agama (secara luas bisa diartikan kebudayaan) dan juga kejayaan negara mereka. (Mubah, 2011: 303)

Berawal dari kedatangan dengan misi bangsa Eropa tersebut, kemudian bangsa-bangsa Eropa khususnya Belanda, melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara karena terkenal dengan komoditi rempah-rempahnya yang menjadi primadona sehingga menjadi magnet yang memicu kedatangan bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk ikut serta melakukan ekspansi yang bertujuan untuk menguasai dan melakukan kolonisasi di bumi Nusantara.

Diawali dengan datangnya bangsa Belanda, setelah kalahnya Portugis dan Spanyol, dalam perdagangan serta politik di Nusantara, Belanda memulai ekspedisi dengan tujuan awal untuk melakukan perdagangan, yang kemudian, memberikan ruang terhadap bentuk-bentuk penguasaan karena adanya tujuan lain, akhirnya menempatkan Belanda pada penguasaan-penguasaan terhadap wilayah-wilayah Nusantara, melalui propaganda politiknya kerajaan Belanda mengokohkan dominasinya untuk menguasai kekayaan alam serta menyebarkan agama Kristen di Nusantara.

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pertama kali ke Asia tenggara pada awal abad ke -16 sering dipandang sebagai titik penentu paling penting dalam sejarah kawasan ini. Tahun 1595, perseroan Amsterdam pertama kali mengirimkan misi perdana ke Banten dipimpin Cornelis de Houtman. Kemudian, 14 Agustus 1597 mereka tiba kembali di negeri Tesel Belanda. Kesuksesan Cornelis de Houtman merangsang kongsi dagang Belanda lainnya untuk melakukan hal serupa pada tanggal 1 Mei 1598, misi pelayaran kedua dipimpin Van Nede, Van Heemskerck dan Van Marwijck tiba di Maluku untuk membeli rempah-rempah. Karena

pedagang Belanda semakin banyak, didirikanlah gabungan perseroan yang dinamakan *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* yang terdiri atas 17 kongsi perdagangan. Awal kedatangan Belanda tahun 1595 ini, banyak disebut-sebut sebagai titik awal penjajahan Belanda di Indonesia. (Hasibuan, 2009: 5)

Mulai pada saat itu, kemudian penjajahan Belanda terjadi, bentuk- bentuk penjahan awal bersifat fisik, dimana penguasaan-penguasaan yang dilakukan oleh Belanda melalui monopoli perdagangan, mengarah kepada penaklukan secara fisik masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Proses penjajahan tersebut kemudian diwarnai dengan penyiksaan serta penindasan, sehingga dirasakan sangat menderita masyarakat pada waktu itu.

Praktik perbudakan atau jual beli manusia berlangsung demi terpenuhinya tenaga kerja atau kuli disektor perkebunan Hindia Belanda juga berlangsung selama masa penjajahan itu sendiri. Tanam paksa atau (*culture stelsel*) dan kerja paksa (Rodi) merupakan bentuk kekerasan lain yang dilakukan Belanda. Tindak rasialistik yang menempatkan bangsa kulit putih pada tataran tertinggi dan kaum pribumi pada tataran terendah juga berlangsung pada masa ini, belum lagi perlakuan merendahkan terhadap kedudukan kaum wanita oleh kaum laki-laki, baik laki-laki sesama bangsa maupun oleh laki-laki kulit putih. *Nyai* atau gundik adalah wanita pribumi yang diperistri atau lebih tepatnya sebagai istri simpanan laki-laki kulit putih, khususnya Belanda, yang tidak memiliki hak hukum, kewarganegaraan, politik, sosial, maupun budaya. Kedudukan *Nyai* bahkan sering disamakan dengan pemuas seksual laki-laki kulit putih. (Nurhadi, 2009: 4)



Intimidasi Pemerintahan Kolonial Belanda

Sumber diolah dari <http://www.berdikarionline.com/belanda-minta-maaf-dan-ganti-rugi-korban-pembantaian-westerling/> pada 10 April 2017

Gambar 3.17 Ilustrasi kekejaman Pemerintah Kolonial

Bentuk-bentuk penindasan yang dialami oleh masyarakat Nusantara kala itu menyebabkan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan-perlawanan dari masyarakat saat itu masih bersifat lokal kedaerah, sehingga efeknya kurang dahsyat, dan sangat mudah untuk dipadamkan. Gejala perlawanan dari masyarakat, akan tetapi hampir di seluruh penjuru nusantara terjadi berbagai bentuk perlawanan masyarakat, sebagai kondisi nyata ketidakmauan masyarakat di Nusantara untuk dijajah.

Kolonialisme Belanda pada periode tahun 1927-1942 dalam sejarah Indonesia merupakan masa represi dan krisis ekonomi. Rezim Belanda memasuki masa yang paling menindas terhadap pribumi sehingga melahirkan perlawanan yang kuat: meskipun berbeda pendapat, para elit tokoh bangsa waktu itu memiliki satu kesepahaman, yaitu tidak mungkin lagi bekerja sama dengan Belanda. Nasionalisme menempati posisi ideologis yang paling berpengaruh (Ricklefs, 2005:374). Kartodirdjo (1984:13-14) juga mencatat abad ke-20 sebagai abad bangkitnya nasionalisme di kalangan penduduk jajahan di Indonesia yang secara tegas telah merumuskan satu tujuan, yaitu kemerdekaan. (Sungkowati, 2007: 1)

Berbagai perang melawan Belanda banyak terjadi di banyak daerah (1821- 1837), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1907), perang di Jambi (1833-1907), perang di Lampung (1834-1856), perang di Lombok (1843-1894), perang Puputan di Bali (1846-1908), perang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (1852-1908), perlawanan di Sumatra Utara (1872-1904), perang di tanah Batak (1878-1907), dan perang Aceh (1873-1927). Peperangan tersebut berakhir dengan berakhirnya perang Aceh. (Hasibuan, 2009: 6)

Berdasarkan Traktat London I tahun 1814 (antara Belanda dan Inggris), maka semua jajahan Belanda (kecuali Kaapkoloni dan SriLanka) dikembalikan kepada Belanda. Ini berarti jajahan Inggris di Indonesia, yang dulu direbut dari Belanda, harus dikembalikan kepada Belanda. Bertolak dari keputusan tersebut, maka Indonesia akan dijajah kembali oleh Belanda. Dengan demikian penindasan yang pernah dilakukan terhadap rakyat Indonesia juga akan dilakukan kembali, dan memang demikian. Itulah sebabnya, rakyat Indonesia lalu melakukan perlawanan-perlawanan, yang diawali dengan perlawanan rakyat Saparua dari Maluku. Maluku sangat penting bagi Belanda karena daerah ini merupakan penghasil rempah-rempah. Hal itu sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai jatuhnya VOC tahun 1799 yang kemudian dikuasai oleh Inggris yang liberal. Ketika rakyat

Maluku mendengar bahwa Belanda akan berkuasa kembali di Maluku, masyarakat Maluku trauma akan kembalinya sistem monopoli VOC dan Pelayaran Hongi. (Wiharyanto, 2009: 2-3)

Kondisi tersebut terus berlanjut, sampai pada masa penjajahan Jepang, dimana momentum Perang Dunia 1 (Pertama), sekutu pada saat itu dibawah komando Inggris mengalami kekalahan termasuk Belanda, sehingga berita tersebut, memberikan motivasi kepada para pejuang kemerdekaan, untuk segera merebut kekuasaan dan memproklamirkan kemerdekaanya. Hal tersebut berbarengan dengan masuknya *Nippon* atau Jepang ke Indonesia, yang seolah - olah memposisikan dirinya sebagai saudara bagi bangsa Indonesia dengan memberikan bantuan-bantuan serta upaya-upaya kepada para pemuda untuk mengusir Bangsa kolonial Belanda dari bumi Nusantara.

Politik yang dilancarkan Jepang akhirnya membuat bangsa (Indonesia) tenggelam kembali dalam masa-masa penjajahan, bahkan model penjajahan yang dilakukan oleh kekaisaran Jepang lebih menyengsarakan Masyarakat pribumi, dimana tidak hanya secara fisik akan tetapi secara psikis masyarakat pribumi mendapatkan tekanan dan siksaan yang sangat memilukan.

Tentu, kalian masih ingat bahwa Jepang dengan mudah berhasil menguasai daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Karena: 1. Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941; 2. Negeri-negeri induk (Inggris, Perancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman; 3. Bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia) sehingga tidak memberi perlawanan. Bahkan, kehadiran Balatentara Jepang disambut dengan suka cita karena Jepang dianggap sebagai ‘saudara tua’ yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara Barat. (Eko. 2009: 1).

Pada tanggal 8 Desember 1941, pemerintah Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik yaitu pelabuhan Pearl Habor. Tentara Jepang yang sudah menduduki sebagian dari daratan tiongkok dan Manchuria, diperintahkan untuk menguasai Asia Tenggara dan sebagian kepulauan pasifik. Karena serangan Pearl Habor inilah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap Jepang. Demikian juga dengan pemerintahan Belanda. Waktu itu belanda sudah diduduki Jerman, tetapi Gubernur Jendral Hindia



Belanda masih berkuasa. Ia mengeluarkan pernyataan perang terhadap Jepang. Tetapi menghadapi serangan tentara Jepang yang sangat kuat waktu itu, perlawanan tentara Hindia Belanda dapat dipatahkan dalam waktu sebentar saja. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati Jawa Barat. (Said, 2004: 30) Dalam permulaan pendudukan Jepang propaganda mereka adalah bahwa perang yang dilancarkan Jepang adalah untuk membebaskan benua Asia dari kekuasaan Barat, untuk membentuk -lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya|| untuk itu diperlukan Jepang sebagai pemimpinya. Maka dilancarkan slogan -Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia|| (Ibid, 34)

Masuknya bangsa Jepang ke Indonesia, sangat menggembirakan bagi masyarakat Nusantara, pada awalnya. karena, setelah sekian lama Indonesia mengalami masa kegelapan karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa- bangsa Barat, akhirnya muncul Jepang sebagai nagara Asia, yang neniliki visi utnuk membantu Negara-negara di kawasan Asia. Akan tetapi, kenyataanya *Nippon* atau Jepang juga memiliki kepentingan, untuk menguasai wilayah- wilayah di semenanjung Asia, diawali dengan penaklukan Belanda akhirnya Jepang mampu menguasai Nusantara, dalam proses penguasaan tersebut Jepang memakai cara-cara yang lebih kejam daripada cara-cara Belanda atau bangsa Eropa lainnya, hal tersebut bisa dilihat dari bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh para tentara Jepang. Bagaimana masyarakat Nusantara diperlakukan dengan tidak manusiawi dan sangat menderita.

Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan balatentara Jepang ke Indonesia adalah untuk menanamkan kekuasaanya, untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan gerakan 3A dan pengakuan sebagai _saudara tua|| merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa kenyataan yang terjadi selama pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia. Bahkan, perlakuan pasukan Jepang lebih kejam, sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang untuk kepentingan peperangan dan industri Jepang, melalui cara-cara berikut: 1). Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusha. Romusha adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja

paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita meninggal ketika menjalankan romusha, karena umumnya mereka menderita kelaparan dan beberapa penyakit. 2). para petani diawasi secara ketat, dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah, balatentara Jepang. 3). Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi Jepang. (Eko, 2009: 1-2)

Di Indonesia, berbagai tindak kekerasan tentara Jepang mulai dari pengumpulan bahan makanan untuk keperluan perang Jepang, romusha, kelaparan hingga *jugun ianfu* atau wanita penghibur telah menambah daftar panjang praktik kekerasan selama masa Pendudukan...Selain menjadikan sejumlah perempuan menjadi *jugun ianfu*, Jepang juga menjadikan pada lelaki menjadi romusha, dan mengumpulkan semua bahan pangan untuk keperluan perang Jepang yang mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Pada masa pendudukan Jepang juga direkrut para pemuda Indonesia menjadi *heiho*. Mereka dimanfaatkan untuk berperang di pihak Jepang bahkan untuk memerangi bangsanya. (Nurhadi, 2009: 6-7)

Refleksi atas kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang dalam karya prosa Suparto Brata adalah gambaran masa-masa kegelapan karena kelaparan, ketakutan, dan kekejaman Jepang yang di luar batas perikemanusiaan, sebuah gambaran yang sangat kontras dengan masa pemerintahan kolonial Belanda yang tertib dan teratur. Penderitaan akibat pendudukan Jepang itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kelas bawah atau *wong cilik*, tetapi juga oleh keluarga bangsawan, seperti Raden Ayu Rumsari dalam novel SM yang dipaksa menjadi budak nafsu/*jugun ianfu* seorang komandan Jepang bernama Ichiro. Raden Ayu Rumsari bersama suaminya, Wiradad, berjuang melalui gerakan bawah tanah untuk menghancurkan tentara Jepang yang telah merendahkan martabat bangsanya. (Sungkowati, 2007: 1)

Berbagai bentuk penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, sangat



menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga banyak yang meninggal dunia, karena perlakuan-perlakuan tersebut.



Jogun Gonfu kekaisaran jepang

Sumber diolah dari

http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Jugun_Ianfu pada 10 April 2017

Gambar 3.18 Ilustrasi kekejaman Kekaisaran Jepang

Penderitaan-penderitaan tersebut, menyebabkan bentuk-bentuk perlawanan, terhadap pemerintahan Jepang, yang bertindak sangat kejam dan tidak manusiawi. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh para pemuda, seperti peristiwa perlawanan yang PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi.

Pada tanggal 14 Februari 1945, seorang komandan Peleton (*Sodhanco*) yang bernama Supriyadi memimpin satu pemberontakan seluruh batalyon yang bertugas di Blitar (di Karisidenan Kediri ada dua Batalyon peta waktu itu). Sebab-sebab dari pemberontakan peta Blitar adalah karena tidak tahanya prajurit-prajurit peta melihat kesengsaraan rakyat di daerah Blitar (dan didaerah-daerah lain di karisidenan Kediri). Banyak rakyat yang mati karena kelaparan dan karena kerja paksa untuk kepentingan pemerintah militer Jepang. Di antara rakyat yang sengsara ini terdapat keluarga para prajurit peta. (Said, 2004: 36)

Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dapat diakhiri oleh pemerintahan Jepang, selama 3,5 tahun pemerintah Jepang berkuasa di Nusantara, dimana kondisi ini berakhir, ketika selesainya perang dunia ke-II dimana pemerintah sekutu memenangkan perang, yang kemudian mengakibatkan kekalahan Jepang, setelah di bomnya Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika yang akhirnya berbuntut kepada penyerahan Jepang terhadap sekutu. Proklamasi 17 Agustus 1945 telah didahului oleh serentetan peristiwa-peristiwa penting yang berkenaan dengan kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Dan ditandatangani oleh Jepang. Pernyataan menyerah tanpa

bersyarat pada tanggal 15 Agustus 1945 kepada sekutu. Sebelum itu, pimpinan pemerintah dan militer Jepang sudah mulai merasa, sejak permulaan 1945, bahwa pukulan-pukulan militer sekutu diberbagai medan di Pasifik sudah mulai melumpuhkan mesin peperangan Jepang.dalam keadaan begini, pimpinan tentara pendudukan Jepang di Jawa membentuk badan penyelidik Usaha- usaha persiapan kemerdekaan (*Dokoritsu Junbi Choosokai*)...Pimpinan gerakan pemuda di Jakarta waktu itu mendesak kepada mereka bertiga untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sesudah berlangsungnya persiapan-persiapan mengenai teks proklamasi dan langkah-langkah lain, maka dibacakan teks proklamasi yang ditandatangani Soekarno Hatta itu pada tanggal 17 Agustus oleh Soekarno. (Ibid, 38-39)

Kekalahan' Jepang secara beruntun dalam perang (PD II) melawan sekutu memaksa' pemimpin administrasi militer di Indonesia yaitu Hayashi menganjurkan kepada Pemerintah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sebab berdasarkan pengamatannya kesengsaraan bangsa Indonesia di bawah pemerintah Tentara Pendudukan sudah tidak tertahankan lagi. Maka kalau Jepang secara eksplisit tidak memberikan janjiir kemerdekaan itu kepada pemimpin-pemimpin Indonesia tentu mereka akan berbalik melawan Jepang. Kalau itu terjadi, maka keadaan Jepang tentu tidak dapat diselamatkan lagi. Saran ini kemudian diterima oleh Pemerintah Jepang dibawah Perdana Menteri Koiso. Maka tanggal 7 September 1944, Koiso mengumumkan ke seluruh dunia di muka sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu dekat. (Benda dan Irikura, 1965: 244-345)

Setelah merdeka Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai wakilnya, dalam masa awal kepemimpinan Soekarno, Indonesia perlahan-lahan menjadi Negara yang mulai bangkit dari keterpurukan, menuju kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Bangsa Indonesia memasuki kepemimpinan Soekarno yang telah berhasil mempersatukan Nusantara kedalam Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia, dimana kehidupan masyarakat saat itu, sangat memprihatinkan, maka segala bentuk kerjasama dan hubungan diplomatik terbuka lebar, agar dapat meningkatkan kehidupan dan martabat masyarakatnya, hal ini membawa Indonesia kedalam percaturan politik serta kancah kehidupan Internasional, dimana Indonesia dengan politik bebas aktifnya, mencoba memberikan tawaran-tawaran dalam bentuk-bentuk



kerjasama, sehingga keterlibatan tersebut menjadikan Negara Indonesia membuat kesepakatan dengan berbagai macam hubungan diplomatik bersama negara-negara seperti China, Rusia, Amerika, yang saat itu sedang mengalami ketegangan-ketegangan akibat perang dunia I, II. Indonesia menjadi Negara yang kuat dan disegani ketika era kepemimpinan Soekarno, dengan gagasan-gagasan serta hasil pemikirannya, tentang konsep serta bentuk Negara yang dapat mengayomi keutuhan masyarakat, budaya, agama, serta kebudayaan yang ada didalamnya. Eksistensi Indonesia ketika itu sangat luar biasa, sebagai Negara yang baru saja merdeka, Indonesia mampu untuk *survive* dalam mengatur dan menjalankan Negara, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka berdaulat serta tidak menjadi bangsa yang miskin dan bodoh. Kondisi bangsa Indonesia, akhirnya kembali melemah, ketika presiden Soekarno memasuki akhir-akhir kepemimpinannya, dimana Soekarno melahirkan beberapa konsep pemikirannya mengenai gagasan-gagasan kenegaraannya yang dinilai oleh masyarakat dan kalangan politisi serta kaum intelektual muda, sangat kontroversial, hal ini kemudian berdampak kepada kondisi keterasingan Soekarno dengan beberapa teman dan rekan seperjuangannya, sehingga mengakibatkan kehidupan politik serta karir kenegaraannya berjalan sendirian.

Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia dihadapkan pada pertarungan- pertarungan sengit antarindividu dan kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertentangan sehingga menjadi periode yang kacau balau. Bangsa Indonesia yang baru merdeka tidak hanya menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali, tetapi juga menghadapi elemen bangsa sendiri yang berebut pengaruh dan kekuasaan. Surabaya menjadi arena pertempuran yang paling hebat sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisional atau Agresi Militernya yang pertama dan berakhir dengan perjanjian Renville, yang salah satu hasil kesepakatannya adalah garis demarkasi. Beberapa tokoh bangsa yang tidak puas dengan hasil perjanjian itu, bergabung dengan komunis melancarkan pemberontakan di Madiun tanggal 18 September 1948. Peristiwa Madiun menjadi titik balik revolusi yang sangat penting karena mengkhianati revolusi kemerdekaan. Pada tanggal 18 Desember 1948, bangsa Indonesia harus menghadapi aksi polisional atau agresi militer Belanda yang kedua (Ricklefs, 2005:428-468). (Sungkowati, 2007: 1)

Dalam perjalanannya konsep Nasionalis, Islamisme, dan Marxisme Bung karno berubah menjadi Nasakom; Nasionalis,

Agama, dan Komunis. Bung karno memperluas konsep Islamisme menjadi Agama, yang harapanya semua agama bisa terwakili dalam konsep persatuannya tersebut. Bung karno benar- benar berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan ke-Bhineka-an tiga golongan ini menjadi Tunggal Ika, dalam balutan Ibu pertiwi walau sebenarnya Bung karno sadar benar golongan-golongan ini rentan sekali bertikai karena perbedaan paham yang sangat lebar. Sekali lagi hal ini tampak sejak tulisannya yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme diterbitkan, Bung karno berkata, ||Bukannya kita mengharap yang nasionalis itu supaya berubah paham menjadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara tiga golongan tersebut. (Soekarno, 1994: 5)

Bila kita teliti dekrit itu memang ada unsur positif dan negatifnya. Negatifnya ia membawa Presiden menjadi seorang diktator dalam demokrasi terpimpin. Dan positifnya ialahpulinya kembali seutuh-utuhnya dan semurni-murninya piagam Jakarta seperti semula tanpa coretam-coretan lagi. (A.N, 1999: 80) Dekrit 5 Juli 1957 menjadi tonggak Demokrasi Terpimpin -àla Sukarno|| dan dimulailah kekuasaan tunggalnya. Pada suatu waktu PKI dielu-elukan, hubungan baik dengan negara Komunis sekaliber Cina pun demikian intim. Pasca Pemberontakan G 30 S pemerintah jijik dan ingin cuci tangan dari segala hal yang berbau PKI. Tertuduhnya Soekarno ikut terlibat dalam PKI menjadikannya sebagai tahanan rumah di Istana Bogor hingga pemerintahan berpindah tangan ke suharto pasca Surat Perintah 11 Maret 1966. (Mulyani, 2007: 5)

Kondisi tersebut semakin memposisikan soekarno menjadi teralienasi sehingga kehidupan politik serta sosialnya menjadi jauh dari rakyat, sebagai seorang pemimpin yang berasal dari rakyat, hal ini menjadi kesedihan yang mendalam bagi presiden soekarno hingga akhir hayatnya. Sepeninggalanya presiden soekarno konflik makin mencuat antara pihak militer dengan partai komunis dimana kehidupan politik semakin kacau, dan kondisi keamanan semakin tidak stabil.

Berbagai macam ancaman mengenai keutuhan dari kedaulatan Republik Indonesia, ancaman tersebut bisa berasal dari internal bangsa maupun ada intervensi dari Negara luar, tercatat berbagai bentuk pembelotan serta pembangkangan tercatat, diantaranya Pemberontakan semesta PRRI, G30S/PKI, dan beberapa ancaman-ancaman yang mengarah terhadap keutuhan Integrasi bangsa....dan diatas puing-puing Nasakom yang Orla itulah Orde baru berdiri pada 11 Maret 1966 dibawah



Jendral Soeharto, setelah ABRI dan angkatan 66 Berhasil menumpas G30S/PKI dengan gemilang. Ya, baik PRRI maupun Nasakom dan G30S/PKI, adalah *noda hitam* bagi sejarah R.I. (A.N, 1999: 34)

Pengkhianatan dan kebodohan kaum komunis terpapar pula dalam novel DWC. Kasminta dan Jumilah adalah anak muda desa biasa yang terbujuk rayuan anggota PKI sehingga masuk dalam Barisan Tani Indonesia (BTI). Dalam pelariannya akibat pemberontakan komunis yang gagal di Madiun, Kasminta menyamar menjadi Susmanta tetapi tetap menggunakan cara-cara komunis untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak seideologi dengannya. Den Darmin, bekas tentara yang telah berjuang menumpas pemberontakan PKI Madiun dibunuh secara keji di tengah sawah. Ia juga menggalang dan memprovokasi masa untuk mengeroyok bekas gurunya yang dianggap menentang kehadirannya. DWC secara jelas menggambarkan orang-orang komunis sebagai orang *culika* / curang, jahat' yang selalu mencari cara untuk merongrong, mengkhianati perjuangan bangsa, dan selalu membuat kekacauan. Tokoh Suryaningsih di dalam *Kremil* secara tajam menggambarkan pengkhianatan kaum komunis pada periode akhir Orde lama membuat bangsa Indonesia jatuh dalam situasi masa yang sangat buruk: Tahun 1945 kita memproklamkan diri sebagai bangsa yang beradab, tahun 1965 kita menjadi bangsa biadab|| (Brata, 2002a:472). (Sungkowati, 2007:1)

Kolonel Soeharto berbekal Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR), menyelesaikan misi militernya untuk mengakhiri peranan partai komunis di Indonesia, dengan berbagai cara, peristiwa tersebut terkenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI). Keberhasilan itu mengawali Jendral Soeharto menduduki tampuk pimpinan sebagai presiden Soeharto. Persaingan politis yang kuat ini mengakibatkan huru-hara pada tahun 1965 dan menyebabkan Bung Karno jatuh dari kursi Presiden Republik Indonesia. Setelah kejatuhannya beliau dikucilkan dan menderita sakit, dirawat di wisma Yaso hingga wafat pada tanggal 21 Juni 1970 lalu dimakamkan di kota kelahirannya di Blitar, Jawa Timur. (Aditya, 2007: 11)

Rezim Soeharto, banyak tindakan-tindakan Jendral Soeharto yang kontroversi, sehingga dalam kepemimpinan militernya selama 32 tahun membuat kondisi Negara menjadi tentram dan aman, karena rezim ini tidak memberikan celah sedikitpun, pada sistem demokrasi untuk berkembang dan melebarkan sayapnya. Kita memang memiliki catatan buruk

dalam persoalan ini. Pengalaman sejarah begitu panjang selama lebih dari tiga puluh dua tahun, saat rezim orde baru berkuasa, praktik-praktik *otoritarianisme* secara massif tidak lain adalah karya militer. Sebagai mesin resmi kekerasan Negara, militer di Indonesia dianggap mampu membangun *-integrasi-represif* secara efektif terhadap warga Negara. (Sujito, 2002: 122)

...sikap represif terhadap rakyat dengan pembatasan dalam berbagai kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencekalan terhadap tokoh-tokoh yang vocal, pelarangan pengedaran buku-buku yang dianggap membahayakan pemerintah, pembredelan surat kabar, dan berbagai kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pola pengaturan pemerintah dan tatanan sosial yang dianggap merugikan masyarakat mewarnai orde baru ini. (A. Lilis, 2009: 4)

Kondisi tersebut, berlangsung selama 32 tahun, Setelah 32 tahun berkuasa, tepatnya pada tahun 1988, berbagai macam tuntutan dari aspirasi masyarakat terus diupayakan oleh kalangan mahasiswa, agar kepemimpinan Soeharto segera dilengserkan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan revolusi 1988 yang secara besar-besaran, mengerahkan kekuatan rakyat (*people power*) untuk menyelesaikan dan mengganti pemerintahan yang lalim dan otoriter. Pristiwa tersebut membawa kekacauan, kerusakan serta kesemrawutan, sehingga kondisi masyarakat pada saat itu menjadi *Chaos*.

Rakyat yang selama ini diam, memang kehilangan kesabarannya. Mereka ikut-ikutan berunjuk rasa di seluruh tanah air. Seluruh lapisan masyarakat, terutama kelas menengah bawah seperti terluka dan meradang di seantero negeri. Maklum banyak orangtua yang kehilangan kemampuannya membiayai pendidikan anak-anaknya. Kemarahan rakyat ini lantas membuat dunia kampus menggeliat dari tidur panjangnya. Geliat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang termasuk pergantian pucuk pimpinan Negara. Dan dunia kampus kembali mendapatkan peranan sosial politiknya. (Rafiq, 2008: 51)

Dan Soeharto terguling karena dipecat oleh rakyat Indonesia, yaitu oleh pejuang-pejuang reformasi yang revolusioner, karena telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sebagai dictator yang militer yang lebih zalim dan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Korupsi) demi kepentingan diri dan keluarganya serta kroni-kroninya. (A.N, 1999: 184)

Era ini muncul akibat berbagai ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat Indonesia terhadap berbagai kebijakan dan perilaku para penguasa Orde Baru yang dianggap tidak lagi



mempedulikan keinginan dan kepentingan rakyat. Hal-hal yang diprotes dari kebijakan dan perilaku pemerintah Orde Baru tersebut adalah Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), sikap represif terhadap rakyat dengan pembatasan berbagai kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencekalan terhadap tokoh-tokoh yang vokal, pelarangan pengedaran buku-buku yang dianggap membahayakan pemerintah, pembredelan surat kabar, dan berbagai kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pola pengaturan pemerintahan dan tatanan sosial yang dianggap merugikan masyarakat mewarnai Era Orde Baru ini. (A. Lilis, 2009: 102)



Kondisi Reformasi 1998

Sumber diolah dari

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/18/11192491/18.mei.1998.jakarta.mencekam.tetapi.mahasiswa.bergerak.kuasai.gedung.dpr.mpr> pada 10 April 2017

Gambar 3.19 Era Reformasi 1998

Kondisi tersebut, menjadi akhir dari kepemimpinan Soeharto karena kuatnya tuntutan untuk mundur, dari rakyat melalui mahasiswa-mahasiswa yang mengidam-idamkan sistem pemerintahan demokrasi yang dianggap akan menyelesaikan problematika otoritarianisme dan kesewenang-wenangan dari penguasa. Setelah selesainya orde lama dan baru dan berganti dengan orde reformasi, dengan beberapa pergantian kepemimpinan yang terjadi, kemudian beralihlah kepemimpinan Indonesia ketangan B.J Habibie.

Ketika Soeharto lengser, pada 21 Mei 1998, Habibie mewarisi Negara porak- poranda. Utang luar negri menggunung sampai menembus ambang batas aman UU\$ 100 Miliar, tepatnya sekitar US \$ 137, 424 Miliar pada Maret 1998. Dari utang sebesar itu lebih separuhnya (Tepatnya US\$ 73,962 Miliar) merupakan utang swasta besar alias Konglomerat. (Rafiq, 2008: 140)



Kondisi pemerintahan kala itu memang sangat memprihatinkan, sebagai seorang presiden pengganti, Habibie memiliki beberapa kebijakan serta kebijaksanaan yang berdampak pada kehidupan masyarakat ketika kondisi negeri ini sedang tidak baik. Akan tetapi ada beberapa kebijakan dari Presiden Habibie yang membenahi kondisi yang saat itu tidak demokratis, dengan sistem multi partai yang memberikan kesempatan partai dan sarana untuk berekspresi menjadi terbuka.

Kita berharap kepada presiden yang baru, B.J Habibie, agar dia bisa berhasil menghidupkan semangat demokrasi yang sejati di Negara kita dengan dibukanya kesempatan seluas-luasnya mendirikan partai-partai politik baik yang berdasar agama (Islam) dan agama lainya atau yang nasionalis...semoga habibie berhasil mencapai sasaran yang diamanatkan masyarakatnya ke atas pundaknya, yaitu reformasi total dan menyeluruh disegala bidang, terutama reformasi dwifungsi ABRI, sesuai dengan aspirasi pejuang-pejuang reformasi. (A.N, 1999: 171-172)

Setelah selesainya masa pemerintahan B.J. Habibie, kemudian digantikan oleh Abdurahman Wahid atau Gusdur. Presiden Indonesia yang satu ini merupakan presiden yang banyak menuai kontroversi, dimana banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat, sangat mengherankan dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang bermitra di sekitarnya.

...Bahkan protes beberapa kalangan atas kelakuan presiden yang sering nyeleneh, tak beraturan, dan mengecewakan tidak membuat Indonesia makin terpuruk. Bila mau dihitung kekecewaan itu sebenarnya sudah menggunung. Di awal pemerintahanya dia memecat menteri Investasi/ ketua BKPM Hamzah Haz, orang PPP dari NU, dengan alasan tidak jelas. Lalu presiden Kyai itu menambah masalah dengan cara merintis hubungan dagang langsung dengan Israel. Akibatnya poros tengah, yang menghantarkanya ke Istana, mulai terluka. Kemudian giliran PDI Perjuangan dan partai Golkar dibikin miris lewat pemecatan menteri BUMN Laksamana Sukardi dan menteri Perindustrian Jusuf Kalla. Alasannya Korupsi, satu alasan yang mencoreng partai. Kalangan nasionalis awam dan tentara kemudian di bikin Abdurahman sesak nafas dengan keinginan mencabut TAP MPR soal pelarangan PKI. Campur tanganya yang kasar di militer untuk mempercepat reformasi di tubuh TNI. Menimbulkan persoalan baru yang sulit diselesaikan, dan disinyalir berdampak panjang terhadap stabilitas dan keamanan Negara hingga kini. Daftar ini bisa diperpanjang,



misalnya dengan grilya politiknya Sofyan Wanandi CS, yang dibiarkan Gusdur merecoki Menko Ekuin Kwik Kian Gie. Kabinet persatuan akhirnya memang dipreteli sendiri oleh Gusdur, dan diganti dengan orang-orangnya sendiri. Terakhir dia mendepak Kwik dari PDIP dan Menkeu Bambang Soedibyo (PAN). (Rafiq, 2008: 213)

Bentuk-bentuk protes dan tuntutan untuk mundur dari rakyat tidak digubris oleh Gusdur, hal tersebut di tanggapinya dengan cara berpergian ke luar negeri, dengan berbagai lawatan-lawatan kenegaraan baik yang formal maupun informal, sehingga lebih sering dihabiskan waktu dengan berpergian biasanya untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi gelombang terhadap tuntutan mundur yang diinginkan oleh kalangan politisi, akademisi dan juga rakyat terhadap Gusdur sangat kuat, sehingga mengakibatkan, berbagai cara dan strategi digunakan untuk menurunkan presiden Gusdur.

Berpijak dari perkembangan terakhir, antara lain hubungan Gus Dur dengan elit politik di DPR yang semakin runcing. Apalagi setelah presiden menganggap pansus illegal. Juga kecamanya terhadap menteri senior Singapura Lee Kuan Yue, yang merusak pamor Gusdur di dunia Internasional. Sony mempersiapkan 4 skenario yang dapat berpengaruh terhadap bisnis tahun depan. Pertama Mega naik tanpa menimbulkan konflik horizontal. Bila ini terjadi maka ekonomi Indonesia akan tumbuh sampai 6% , bahkan bisa mencapai 8 % tahun depan, karena investasi asing akan masuk bersamaan dengan dukungan Internasional yang sudah dikantongi Mega. Restrukturisasi ekonomi akan berjalan lancar. Skenario kedua Mega naik dan terjadi konflik horizontal. Iklim bisnis akan terganggu. Investor akan menunggu sampai keadaan pulih kembali. Pertumbuhan ekonomi akan menurun, nilai rp akan semakin menipis. Skenario ketiga, kata Sony, Gusdur bertahan dan tetap menjalankan kebiasaan liar politik. Situasinya tidak akan lebih baik dari kondisi saat ini. Ekspor akan berjalan terus, dan komoditi akan mengejar dolar. Indonesia akan kesulitan membayar utang dan kebutuhan impor lainnya. Pemerintahan akan rapuh, terjadi instabilitas politik yang akan mengganggu iklim investasi. Skenario keempat Gusdur tetap presiden dan melakukan perubahan fundamental, terutama dalam gaya mengurus Negara...Akhirnya Gusdur presiden pertama yang dipilih secara demokratis itu, dipaksa lengser melalui impeachment. Dia terpaksa keluar dari istana. Megawati menggantikan posisinya tanpa pergolakan berarti. (Ibid, 216)

Setelah selesainya kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gusdur kemudian sebagai penggantinya adalah Megawati

Soekarno Putri, anak dari sang proklamator Indonesia Ir. Soekarno, dimana ketika awal kepemimpinannya banyak diwarnai dengan polemik mengenai sosok kepemimpinan perempuan dalam berbagai perspektif khususnya Islam. Akan tetapi hal tersebut, lama-kelamaan terlupakan. Pristiwa-pristiwa yang banyak terjadi ketika masa pemerintahan Megawati adalah ketergantungan Indonesia yang semakin kuat terhadap bangsa barat, selain itu semakin banyak aset-aset Negara seperti BUMN, BUMS yang dijual kepada pihak asing, hal ini merupakan sebuah kegagalan ditengah terpaan krisis ekonomi yang melanda. Seolah-olah tidak ada pilihan lain yang lebih baik kecuali berhutang.

Mega yang tak punya pertahanan akhirnya memang kebobolan juga dari segala arah. Di luar negri dia tidtak bisa membela tenaga kerja Indonesia yang dikejar-kejar aparat Negara lain tempat mereka mencari nafkah. Bahkan mereka diusir secara tidak hormat dari negeri Jiran Malaysia. Sehingga pulau nunukan dipenuhi oleh TKI yang merana. Di dalam negri dia tidak bisa mencegah penjuala asset-asset Negara yang bagus kepada asing oleh para pembantunya. Bahkan bank-bank besar semacam BCA dan lain-lain, yang dengan susah payah disehatkan dengan biaya ratusan triliyun, cepat berpindah tangan ke asing ataupun konsorsium lokal dan asing dengan harga obral di zaman ini. (Op. Cit, 218)

Kuatnya kondisi ketergantungan yang menyebabkan hilangnya aset - aset penting bagi Negara, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang akhirnya membawa kesengsaraan terhadap rakyat Indonesia, yang semakin menderita, penderitaan masyarakat tersebut dirasakan seperti tidak berpenghujung. Dalam perkembangan kepemimpinan Megawati, terjadi banyak perbedaan pendapat dengan beberapa menteri, salah satunya adalah dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dimana dikemudian hari SBY sapaan akrab Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi rival dalam pemilu, dalam pemilu tahun berikutnya, SBY dengan politik pencitraanya mampu untuk memenangkan konstelasi politik di Indonesia. SBY bersama Jusuf Kalla memimpin Indonesia dengan berbagai warisan permasalahan-permasalahan dari Orde lama, Orde Baru sampai pada era reformasi. Permasalahan - permasalahan tersebut antara lain: Kesejahteraan, Penegakan Hukum, Korupsi, Kemiskinan, Kesempatan memperoleh Pendidikan serta lapangan Pekerjaan.

Jakarta, Aktual.co. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto, dinilai sebagai biang keladi dari tidak diusutnya dugaan keterlibatan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam memuluskan anggaran proyek



pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON), Hambalang, pada proses penyelidikan maupun penyidikan di KPK. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai Bambang Widjajanto (BW) punya konflik kepentingan tersendiri dengan Sri Mulyani. "Kita sama-sama taulah BW itu bekas pengacara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujar Boyamin melalui pesan singkat kepada *Aktual.co*, Rabu (31/10). Bambang Widjajanto tercatat pernah menjadi pengacara LPS yang diketuai Sri Mulyani. Sebelumnya, KPK mengaku tak mau menyentuh kebijakan yang dikeluarkan oleh bekas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk 'memuluskan' perubahan anggaran proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON), di desa Hambalang, Bukit Sentul, Jawa Barat dari singleyears menjadi multiyears ketika proyek sedang berjalan. KPK bergeming takkan menyentuh dugaan pelanggaran yang dilakukan Sri Mulyani terkait perubahan anggaran tahun jamak, baik untuk proses penyidikan maupun penyelidikan lantaran hanya terfokus soal pembangunannya saja. "KPK saat ini masih mengembangkan proses pengadaannya sport centre Hambalang, belum sampai pada proses sebelum itu," kata juru bicara KPK, Johan Budi. Untuk diketahui, ketika proyek hambalang berjalan, Sri Mulyani membuat peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perlu diingat pada awal tahun ini, Presiden menyampaikan suatu pernyataan yang pada intinya menyatakan apapun yang akan terjadi pada tahun ini, Harga BBM tidak akan naik. Didalam opsi yang ditawarkan pasca kenaikan BBM, pemerintah menawarkan paket kompensasi seperti BLSM (BLT model baru), Kebijakan penyaluran raskin dsb. Kebijakan kenaikan harga BBM adalah sebuah Kebijakan yang sangat rentan secara politis, baik bagi partai yang pro terhadap Kebijakan kenaikan BBM maupun bagi partai yang menolak Kebijakan tersebut. Dari dinamika yang terus berkembang dalam sebulan terakhir, sangat dikhawatirkan Kebijakan ini hanya menjadi sebuah komoditas politik yang sebenarnya benar-benar tidak pro-rakyat. BEM FISIP UI menyimpulkan suatu kesimpulan seperti ini, berkaca dari pengalaman kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 dan 2008. Suatu Kebijakan yang pada akhirnya menuai banyak kontroversi. Sebenarnya terdapat banyak pembelajaran dari pengalaman menyangkut kenaikan BBM pada tahun 2005 dan 2008. Namun sayangnya, kami melihat sampai pada saat ini tidak ada suatu pembelajaran yang diambil dari Kebijakan masa

lain. Alternatif yang diberikan pemerintah pada waktu itu terkait kenaikan harga BBM adalah pemberian kompensasi BLT. (BEM FISIP UI, 2012: 6)

BLT (Bantuan Langsung Tunai) pernah diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Dan diselingi debat oleh akademisi yang berkesimpulan untuk menolak atau menyambutnya, menunjukkan kebutuhan akan suatu kajian akademis yang lebih baru. Kajian akademis lama yang sempat menanggukkan BLT 2005 ternyata tidak sanggup dijadikan senjata untuk menolak BLT 2008. (Agusta, 2008: 1)

Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY melalui Kabinet Indonesia Bersatu telah menempatkan pemberantasan Korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bentuk perwujudan komitmen tersebut kemudian diaplikasikan dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap praktek Korupsi. Namun banyak kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa maupun para pengamat politik menilai bahwa belum terlihat adanya kemajuan yang berarti dari upaya pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh SBY. Pendapat itu salah satunya dilatarbelakangi oleh belum tuntasnya penanganan terhadap beberapa kasus besar, seperti kasus Korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto, kasus Pertamina, kasus Bapindo dan kasus BLBI. The National Law Enforcement Watch. (Fadhil, 2007: 1)



Kaum Bangsawan



Rakyat Jelata

Sumber diolah dari

<https://phesolo.wordpress.com/2012/06/28/masyarakat-dan-perubahan-sosial-surakarta-awal-abad-xx/> pada 10 April 2017

Gambar 3.20 Pelanggaran Kelas

SBY kembali menduduki tampuk pimpinan Indonesia untuk yang kedua kalinya, berbagai persoalan kembali menguat

dan mencuat ke permukaan, yang paling disoroti adalah keterlibatan kader-kader partai democrat yang terjebak oleh kasus-kasus korupsi, sehingga pamor pemerintah menjadi turun, sehingga ada kecenderungan mengenai kepercayaan masyarakat yang turun. Beberapa periode kepemimpinan presiden di Indonesia, ternyata belum mampu memberikan efek terhadap kesejahteraan rakyat, dimana dalam beberapa periode kepemimpinan Nasional masih dihantui oleh persoalan-persoalan klasik seperti korupsi, kemiskinan, pelayanan kesehatan dan kesenjangan dalam pembangunan.

Permasalahan - permasalahan tersebut merupakan gejala tentang ketidakmampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan baik, hal tersebut dikarenakan adanya ketidakmampuan dari para penyelenggara Negara untuk menyelesaikan permasalahan klasik tidak hanya kemampuan penyelenggara Negara dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya, akan tetapi juga persoalan mengenai paradigma dari para penyelenggara Negara yang belum mampu lepas dari jerat-jerat budaya *patronase* yang di identikan dengan praktik-praktik korupsi dengan berbagai macam bentuk. Kondisi tersebut dapat dilihat dari makin tingginya praktik-praktik korupsi di beberapa periode kepemimpinan mulai dari presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, sampai pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berkuasa saat ini.

Kondisi mengenai ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari kepemimpinan pasca reformasi hingga sampai saat ini, mengisyaratkan ketidakmampuan serta ketidakmauan penyelenggara Negara untuk memperbaiki dan memrubah tradisi-tradisi lama yang tidak sesuai dengan kehidupan social masyarakat saat ini. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang harus dilakukan secara struktural dan kultural melalui aparat penyelenggara Negara. kondisi itu membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan (*trust*) terhadap pemerintah, karena ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, mengakibatkan penderitaan yang panjang yang dialami oleh rakyat jelata. Pemerintah seharusnya bisa merangkul masyarakat serta elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah Negara, agar dapat melakukan kegiatan bersama dalam upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.



Sumber diolah dari Fase Perkembangan Masyarakat Indonesia
Gambar 3.21 Skema Perkembangan Masyarakat Indonesia

b). Kultur dan Struktur Masyarakat Indonesia

Rentetan perjalanan panjang sejarah bangsa, dengan dinamika yang terjadi, membuat permasalahan-permasalahan yang muncul lebih bersifat kausalitas, dimana kondisi tersebut terjadi karena adanya hubungan sebab- akibat, yang timbulkan karena perbuatan-perbuatan, prilaku-prilaku, serta tindakan-tindakan yang berakar dari kebudayaan masa lalu, sehingga diperlukan pendekatan sejarah agar analisis masalah tersebut bisa dilakukan secara maksimal. Pendekatan sejarah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan sejauhmana peranan budaya dalam hal ini produk budaya dalam mempengaruhi sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia, sehingga membentuk kondisi, yang saat ini terjadi di Indonesia.

Pemahaman mengenai kondisi masyarakat serta tatanan yang ada didalamnya, akan memberikan gambaran yang lebih rinci tentang realitas dari sistem sosial kemasyarakatan yang terdapat di Indonesia, karena kehidupan masyarakat tersebut, bisa dilihat dari kultur dan struktur yang ada. Pembentukan kultur dan struktur pada masyarakat Indonesia sangatlah

kompleks, karena disebabkan oleh peristiwa sejarah yang panjang, sehingga perlu penjelasan yang runut agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi yang saat ini terjadi. sebelum memahami kultur dan struktur masyarakat Indonesia, kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya suku bangsa Indonesia atau etnis ini berasal dan bagaimana persebarannya, sehingga dapat menguraikan berbagai macam praktik-praktik kebudayaanya, termasuk sistem sosial masyarakatnya, sehingga diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai struktur dan kultur dari bangsa Indonesia. Memahami kultur dan struktur yang ada di masyarakat Indonesia, tentunya harus diawali, dengan pertanyaan siapakah masyarakat Indonesia itu dan bagaimana persebarannya serta kebudayaan yang dimilikinya, sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang asal-usul dan hasil kebudayaanya. Sehingga tidak akan menimbulkan *ambiguistas* yang akan menimbulkan pertentangan tentang karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kebudayaan masyarakat.

Mereka menamakan penduduk Hindia Belanda bagian barat yang berasal dari Proto Malaya (Melayu Tua). Dan Deutro Melayu (Melayu Muda), sebagai *Indunisians* (Indu Bahasa Latin artinya; India; Nesia asal katanya *Nesos*, bahasa Yunani, artinya kepulauan). Sedangkan penduduk di wilayah India- Belanda bagian Timur masuk ke dalam bagian kategori *Malenesians*. Karena itu, Earl sendiri cenderung menggunakan istilah *melayu-nesian* untuk menamakan penduduk India Belanda bagian barat. Kemudian *James Logan* merubah *Indunesia* menjadi Indonesia (*Indos* dan *Nesos* berasal dari bahasa Yunani). (Hasibuan, 2009: 3)

Penjelasan mengenai masyarakat yang berdiam di daerah Nusantara yang kemudian disebut sebagai Indonesia, dapat ditelusuri melalui perjalanan sejarah, bagaimana perkembangan masyarakat, yang hidup dan berkebudayaan dalam kehidupan kesehariannya memiliki sistem-sistem serta tata aturan di berbagai bidang kehidupan seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan keagamaan yang berkembang dan dilestarikan secara turun temurun, sebagai sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan. Perkembangan masyarakat Indonesia mengalami beberapa fase kehidupan, dimana ditiap fase memiliki berbagai karakter serta ciri tertentu, sehingga ada perbedaan antara satu zaman dengan zaman yang lain. Periodeisasi atau fase yang pertama: adalah fase prasejarah yang menjelaskan tentang kehidupan masyarakatnya dimulai dari zaman batu, dengan kehidupan yang mengandalkan alam, secara perlahan-lahan mulai berkembang dan bergeser

menjadi manusia yang sudah dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara berternak hewan seperti babi dan ayam, dalam perkembangannya mereka juga telah mengenal sistem kepercayaan yang berbentuk *Animisme dan Dinamisme*. Dalam kehidupan sosial mereka hidup berkelompok, maka ada diantara mereka yang menjadi pemimpin yang diangkat karena pertimbangan kelebihan yang dimilikinya. Dalam bidang teknologi masyarakat telah menemukan teknologi untuk mengolah tembaga dengan berbagai bentuk berupa perak dan besi serta perunggu.

Fase kedua adalah zaman sejarah dimana kehidupan masyarakat sudah berkelompok dan meninggalkan tempat-tempat sebagai sebuah komunitas, yang akhirnya membentuk sebuah koloni-koloni kecil yang akhirnya berbentuk kerajaan. Perkembangan zaman prasejarah diawali oleh adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak animisme dan dinamisme, konsep keberagamaannya, mencoba menjaga keselarasan dengan alam, selanjutnya dalam perkembangannya masuklah kebudayaan-kebudayaan yang bercorak Hindu Budha yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Salah satu pengaruh ajaran Hindu adalah sistem warna atau Varnas atau yang lebih dikenal dengan Kasta. Sebenarnya dalam konsepsi ajaran agama Hindu, Varnas ditujukan untuk memberikan spesialisasi terhadap golongan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi jelas dan gamblang tentang peranan masing-masing Varnas tersebut.

Istilah pertama yang digunakan di India adalah sebenarnya bukan kasta tetapi -Varnas|| Bahasa Sansekerta yang artinya Warna -*Colour*". Ditemukan dalam Rg Veda sekitar 3000 Tahun sebelum masehi *Brahman* (Pendeta), *Kshatriya* (Prajurit dan Pemerintah), *Vaisha* (Pedagang/Pengusaha), dan *Sudra* (Pelayan).tiga kelompok pertama disebut -*Dwij*|| karena kelahirannya diupacarai dengan prosesi penyucian. (Kokog, tt: 2)

Varna, dalam Baghdad Gita, landasan pembagaian atau penentuannya, apakah seorang itu termasuk ke dalam salah satu *Varna* atau golongan dari keempat golongan masyarakat (*caturvarna*) tersebut, adalah *guna* (sifat alamiah atau material), *karma* (Perbuatan, daya cipta), dan *svabhavah* (sifat lahiriah, pembawaan lahiriah), bukan berdasarkan keturunan (*jati*), seperti yang terjadi dalam sistem kasta. (Hadi, 2009: 105-106)

Dalam perkembangannya corak keberagamaan Hindu di Nusantara, kemudian banyak dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan lokal, seperti konsepsi kepemimpinan Jawa tentang konsep kekuasaan pada Raja-raja Jawa, dimana Raja merupakan Wali Tuhan dimuka bumi sehingga, manusia telah ditakdirkan



untuk menghormati serta mengagung-agungkan Raja sebagai sosok yang dipilih oleh Tuhan untuk membimbing rakyat didunia dan akhirat.

...*Babad Tanah Jawi* disebutkan bahwa raja memiliki kekuasaan mutlak, segala sesuatu di tanah Jawa, bumi tempat kita hidup, air yang kita minum, daun, rumput dan lain-lain yang ada di atas bumi, adalah milik raja. Dan juga raja sebagai *warana ning Allah* ‘penjelmaan Tuhan, wakil...Dalam *Serat Centhini* digambarkan *pan ki dhalang sejati jatining ratu, sang ratu gantyaning nabi, nabi gantyaning Hyang Agung, ratu-nabi prasasting, Hyang Maha Gung kang katulat* _dalang sejati itu raja sendiri, ia sendiri adalah wakil nabi, nabi adalah wakil Allah yang Maha Agung, raja nabi adalah perwujudan dari Allah yang dapat dilihat’. Raja sebagai dalang sejati, yang berhak mengatur kehidupan dengan menerima mandat dari Allah. Apa yang dikerjakan raja pada hakikatnya adalah apa yang menjadi kehendak Allah Sedang dalam *Wulangreh*, raja dikatakan sebagai penguasa yang *kinarya wakiling Hyang Agung*. Raja bertugas memelihara ditegakkannya hukum dan keadilan. Untuk itu semua rakyat harus taat kepada raja, barang siapa yang berani menentang perintah raja berarti *mbalela ing karsaning Hyang Agung* (menentang kehendak Tuhan Yang Maha Besar), karenanya pengabdian raja harus taat kepadanya tanpa syarat. Dikenal istilah *kawula-gusti*, kawula untuk menyebutkan rakyat dan gusti untuk menyebut raja. Juga istilah *jumbuhing kawula-gusti* _menyatunya rakyat-raja’. Konsep ini bukan saja untuk menunjuk pada persatuan antara Tuhan dan Manusia, namun juga untuk menyebutkan persatuan antara rakyat dengan rajanya Raja-raja Mataram menggunakan konsep keagungbinataran yang diwujudkan dengan keunggulan dan mempunyai kesanggupan untuk menunjukkan keunggulan itu terhadap semua orang dalam banyak segi. Di antara keunggulan memimpin (*superior in leadership*), keunggulan militer, keunggulan fisik dan mental, sehingga nampak di mata semua orang bahwa sang pemimpin mempunyai kekuatan luar biasa, yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai kesaktian. Dan juga akan sangat bermanfaat jika pemimpin sanggup mendemonstrasikan keunggulan darah seperti terdapat dalam ungkapan *trahing kusuma rembesing madu, wijining atapa tedhaking andana warih* ‘jenis bunga menghasilkan madu, benih pertapa menurunkan bangsawan’. (Purwadi, 2006: 57-58)

Konsepsi kekuasaan masyarakat Jawa yang kemudian berakulturasi dalam kehidupan keseharian Raja, sebagai sosok yang terlegitimasi kekuasaanya, karena kehendak Raja

merupakan kehendak Tuhan yang Maha Esa, sehingga terjadi hubungan yang sangat kuat antara Raja dengan rakyatnya, yang membawa kepada model-model pengkultusan dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam perkembangannya ketika memasuki era penjajahan, terlihat sebuah kondisi bahwa masuknya Islam di Nusantara, telah perlahan-lahan menghapus sistem sosial serta tatanan masyarakat yang bercorak Hindu Budha, sehingga hal tersebut berakibat kepada semakin melemahnya kekuasaan yang dimiliki Raja. Setelah masuknya pemerintahan kolonial Belanda, yang lama belajar kebudayaan Nusantara, akhirnya untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya dengan misi *Gold, Gospel, Glory*. Belanda melakukan hegemoni terhadap budaya yang secara spesifik membuat sebuah sistem yang mengatur tatanan masyarakat Indonesia, bagaimana Belanda memadukan sistem warna atau *Varnas* dengan konsep kekuasaan Jawa yang akhirnya melahirkan konsepsi kelas, yang memberikan gambaran mengenai sistem sosial masyarakat Nusantara kala itu yang sangat identik dengan kelas-kelas sosial dalam kehidupan masyarakat kala itu. Kondisi tersebut yang berhasil ditanamkan, selama penjajahan Belanda di Nusantara. Sistem pelapisan masyarakat di Bali didasarkan atas keterunutan; karena itu tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai kelompok-kelompok kerabat yang bersifat patrilineal. Ada pelbagai klen yang mempunyai sejarah keturunan (*babad, pemancangah, pretasti*) sendiri-sendiri yang masing-masing kembali sampai pada sejarah penaklukan oleh Majapahit dalam abad ke 14. Orang-orang bangga apabila dapat menyusur keturunan mereka sampai pada raja-raja atau bangswan-bangswan dari jaman Majapahit itu. Pelbagai keturunan inilah yang memberikan susunan yang kompleks pada klien-klien patrilineal yang terdapat di Bali dataran. Karena proses sejarah yang kembali ke jaman majapahit, maka klen-klen di Bali daerah dataran, tersusun dalam suatu susunan berlapis tinggi rendah berdasarkan jarak hubungan kekerabatan dari nenek moyang-nenek moyang dari klen-klen itu dengan seorang tokoh raja atau bangsawan dari majapahit. (Koentjaraningrat, 1988: 299)

Di dalam kenyataan hidup masyarakat jawa, orang masih membedakan antara orang *priyayi* yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar dengan orang kebanyakan yang disebut *wong cilik*, seperti petani-petani, tukang-tukang, dan pekerja kasar lainnya. Di samping keluarga keraton dan keturunan bangsawan atau *bendara-bendara*. dalam kerangka susunan masyarakat ini, secara bertingklahku yang berdasarkan atas gengsi-gengsi itu,



kaum *priyayi* dan bendara merupakan lapisan atas, sedang *wong cilik* menjadi lapisan masyarakat bawah. (ibid, 344)

Kondisi tersebut, masih berlanjut ketika fase kepemimpinan- kepemimpinan Soekarno dan Soeharto di Era orde Baru dan Orde Lama, yang tetap mempertahankan budaya *patronase* sehingga konstruksi masyarakat mengenai sistem kelas sangat kuat, sehingga konsepsi kekuasaan tersebut memberikan jalan kepada pengkultusan-pengkultusan raja atau seorang pemimpin dengan bentuk yang berbeda. Pengkultusan terhadap para pemimpin bangsa, yang dilakukan oleh masyarakat maupun sekelompok orang, memberikan gambaran tentang realitas struktural dan kultural dari masyarakat yang tetap percaya bahwa seorang pemimpin adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa kearah yang lebih baik.

Dosa budaya politik orde baru banyak dipengaruhi oleh penyalahgunaan paham kekuasaan Jawa. Kekuasaan Jawa yang mustinya adiluhung, berdasarkan wahyv atau pulung telih dibelokan oleh penguasa sehingga tumbuh sistem *patronase* (*bapakisme*) yang melahirkan budaya KKN. Hal itu terjadi karena ada pengaruh zaman edan yaitu sebuah era yang memungkinkan terjadinya kekacauan dan kebimbangan. Pada saat semacam itu muncul pula gerakan *ratu adil* yang menginginkan lahirnya panguwa sejati atau pemerintahan yang legitimate. Pengaruh zaman edan terhadap budaya politik orde baru juga telah memunculkan budaya ewuh pakewuh sehingga pengadilan tidak lxrjalm sebagaimana mestinya. Zaman edan juga telah memicu lahirnya budaya ingin nunyncangkn atasan. Akibatnya dalam pcmcrintalmn orde baru sering terjadi upeti dan sogok-menyogoic kepada atasan. Atas dasar ini, pemerintahan menjadi tidak bersih dan berwibawa, melainkan penuh KKN. Lahirnya budaya politik yang kurang sehat (kontra) di atas, karena terdorong juga oleh godaan kekuasaan dan kewibawaan. Kekuasaan dan kewibawan dianggap sesuatu yang sakral dan sakti sehingga terjadi keinginan mempertahankan status quo. Akibatnya, lahir pemerintahan', yang otokratik. Jika waktu itu terjadi demokrasi hanyalah demokrasi semu. Pemerintahan yang berdemokrasi semu biasanya anti kritik dan mengasumsikan bahwa pemerintah selalu benar. (Suwardi, 2005: 1)

Bentuk-bentuk kepercayaan mengenai konsep kekuasaan yang berkembang zaman sejarah sampai zaman orde baru, kemudian berkembang memasuki dimensi kekuasaan sebagai bentuk legitimasi terhadap sosok pemimpin yang dipercaya memimpin bangsa, membawa konsekuensi mengenai cara

pandangan masyarakat atau sekelompok orang untuk mengukuhkan figur atau sosok pemimpin sebagai orang yang suci, sehingga melahirkan tradisi-tradisi *patronase* atau patron klien, tradisi tersebut selama berpuluh-puluh tahun mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, karena banyak asumsi yang menyebutkan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia berada di pulau Jawa. Kondisi tersebut akhirnya menjadikan para pemimpin dimintai restunya, untuk memper lancar urusan- urusan duniawi agar dapat mendapatkan berkah serta ridho dari sang pencipta.

Karisma yang menyertai kepemimpinan Gus Dur merupakan fenomena yang menarik dan penting untuk diamati. Gus Dur dalam konteks ke-Indonesiaan adalah tokoh yang memiliki karisma memadai. Dia memiliki berkesempatan menjadi pemimpin di berbagai situasi. Kepemimpinan Gus Dur di dunia Pesantren, LSM, juga NU telah meyakinkan dirinya sebagai sosok tokoh yang sangat disegani baik di kalangan komunitasnya sendiri maupun lintas komunitas. Ketika Indonesia dilanda berbagai krisis, maka Gus Dur tampil sebagai tokoh politik. Terjunnya Gus Dur ke wilayah politik praktis inilah yang mengantarkan dirinya sebagai Presiden RI ke-4. (Ishak, 2003: 1)

Bagi Indonesia, Soekarno memang dianggap pemimpin sejati dan jago berpidato, dan isinyapun mampu menciptakan dan mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih gemilang, yaitu menginginkan satu Dunia Baru penuh dengan perdamaian dan kesejahteraan. Mudah-mudahan Indonesia akan memiliki pemimpin yang handal dan dihormati serta disegani seperti Bung Karno dulu. (Prawiro, 2009: 63)

Model kepemimpinan *religio paternalistic* adalah model kepemimpinan pada masyarakat agraris tradisional yang mengandaikan seorang kiai sebagai figure sentral yang dimitoskan, dimana perkataan dan sikapnya mesti diikuti tanpa *reserve*. Sedangkan model kepemimpinan *persuasive-partisipatif* merupakan gaya kepemimpinan yang mendekati komunitas yang dipimpinnya dengan jalan menjual ide sehingga hubungan (relasi) yang dibangun lebih bersifat interrelasional dan terbuka. (Susanto, 2007: 40)

Konsep inilah, yang kemudian tereduksi kedalam kehidupan masyarakat, sebagai sebuah budaya *patronase*, dimana dalam sebuah masyarakat terdapat tatanan nilai yang identik dengan adanya kelas-kelas sosial, yang akhirnya mengkonstruksi serta melanggengkan sistem kelas di Indonesia, karena adanya perbedaan-perbedaan status, yang akhirnya dipercaya sebagai kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Budaya *patronase* tersebut



tereduksi kedalam berbagai bidang kehidupan dimana salah satunya dalam kehidupan pemerintahan, dimana banyak pejabat sebagai seorang abdi Negara, memiliki kekuasaan yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai orang yang memiliki starta atau kelas dalam kehidupan sosial masyarakatan, sehingga segala bentuk urusan yang berhubungan dengan jabatannya, maka akan ada tindakan yang sifatnya simbiosis, karena saling membutuhkan.

Kehidupan Masyarakat



Zaman Prasejarah	Kehidupan masyarakat mulai berkembang dg kehidupan komunitas yg akhirnya membawa keadaan masyarakat pada perkembangan. Animisme dinamisme merupakan corak kehidupan masyarakat dapat dilihat dari sistem sosial serta keberagamaanya, di era ini masyarakat sudah menemukan teknologi untuk mengolah logam. Jadi Perkembangan manusia menyebabkan proses interaksi antar manusia dengan kebudayaan- kebudayaan yang mereka miliki.
Zaman Sejarah	Ketika manusia sudah berkembang dan hidup secara berkelompok, akhirnya membentuk komunitas seperti kerajaan, yang memiliki corak animism dan dinamisme, kemudian terpengaruh oleh pengaruh Hindu Budha yang, mengakar kuat pada masyarakat Nusantara. Salah satunya sistem warna Varnas tentang spesialisasi masy berdasarkan keahlian, ketrampilan, serta kecakapan yang dimiliki. Kebudayaan Hindu tersebut berdampingan dengan falsafah kehidupan masyarakat jawa.
Zaman Kolonial	Konsep - konsep itu kemudian dikonstruksi oleh pemerintah kolonial Belanda, dengan konsepsi kekuasaan Jawa, sehingga menciptakan sistem kelas atau kasta yang menjadikan masyarakat patuh terhadap kelas yang lebih tinggi, hal ini yang kemudian menciptakan hegemoni kelas bangsawan

	terhadap kelas jelata.
Zaman Kemerdekaan	Konsep tersebut ketika orde baru dan lama tereduksi dalam budaya patronase, yg memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk mengembangkan hegemoni melalui politik klan, ekonomi klan, dan bentuk-bentuk dominasi lainnya. Yg akhirnya melahirkan praktik- praktik korupsi.
Zaman Pasca Reformasi	Setelah era reformasi praktik - praktik korupsi tsb berkembang dengan berbagai macam bentuk dan model, seperti Suap, Gratifikasi, dan bentuk - bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.

Sumber diolah dari fase perkembangan Kultur dan Struktur Masyarakat Indonesia

Tabel 3.1 Fase Perkembangan Struktur Masyarakat

c). Pelembagaan praktik Pemberian Upeti

Kondisi struktural dan kultural masyarakat Indonesia yang ada saat ini, terbentuk karena proses historis masa lalu, seperti penjelasan diatas, yang pada kelahirnya memancing tumbuhnya praktik-praktik korupsi, dengan berbagai macam bentuk, sebagai bentuk tatanan budaya pemerintah kolonial Belanda, demi terciptanya hegemoni dan tercapainya tujuan politiknya. Dalam upaya mencapai tujuan pemerintah Hindia Belanda, melakukan hegemoni terhadap konsepsi kekuasaan Jawa dan juga kebudayaan yang bercorak hindu Budha khususnya sistem Warna -*Varna*" yang merupakan bentuk alkulturasi budaya, antara kebudayaan masyarakat Jawa dengan kultur keberagamaan Hindu dan Budha, yang akhirnya melahirkan sistem kelas ataupun kasta, yang berakibat terhadap kuatnya pengaruh budaya-budaya *patronase* yang melihat masyarakat berdasarkan status sosial yang dimilikinya, dimana budaya tersebut masuk melalui konsep kekuasaan, yang dimiliki oleh kalangan bangsawan atau priyayi guna mengokohkan dominasinya terhadap rakyat jelata.

Konsep kekuasaan pada masyarakat Jawa didasarkan atas kepercayaan tentang sosok yang dianugrahi kharisma dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk memimpin masyarakat atau rakyat jelata, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sistem kekuasaan tersebut akhirnya menjadikan masyarakat mengkultuskan kalangan bangsawan sebagai sosok yang suci dan mulia, oleh karena itu perlu diberikan penghormatan. Sistem stratafikasi atau penggolongan kelas dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat



Jawa dan Bali, maupun suku-suku di Tanah Air, sebagai bentuk struktur masyarakat Indonesia, sebagai manifesto ajaran agama Hindu yang melenceng dari apa yang seharusnya dilaksanakan, Sistem kelas atau kasta yang merupakan tatanan kebudayaan Jawa dan Hindu, telah lama mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia kondisi ini memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya masyarakat Indonesia memahami kehidupan sebagai sesuatu yang penuh dengan makna atau arti. Konsep klasifikasi atau sistem kasta merupakan intisari dari nilai yang dapat kita pahami sebagai bentuk filsafat orang Jawa, yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, akhirnya dipercaya oleh masyarakat sebagai tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Kondisi konstruksi tersebut akhirnya membawa masyarakat kedalam Praktik-praktik pengkultusan atau penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap raja atau kerabat raja, yang menjadikan masyarakat melakukan berbagai bentuk persembahan baik yang diberikan kepada kerajaan atau negara, maupun diberikan kepada raja serta kerabat raja, salah satunya adalah berbentuk upeti.

Proses pelembagaan praktik pemberian upeti di Indonesia, telah ada sejak jaman kerajaan, hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber, yang menjelaskan tentang praktik-praktik tersebut. Pada masa kerajaan Mataram Islam yang agraris, kegiatan ekonomi sebagian besar masih dilakukan dengan cara tukar-menukar, upeti yang terdiri dari hasil panen dan tenaga kerja. Meskipun sudah ada organisasi/ lembaga keuangan di pusat kerajaan, akan tetapi belum berfungsi sebagai alat perekonomian kerajaan yang utama. Bagi raja kekayaan adalah alat yang ditimbun dan kadang-kadang digunakan untuk membeli dukungan, sehingga tidak pernah dianggap sebagai alat efisiensi dalam organisasi ekonomi kerajaan (Supriyono, 2010: 6)

Raja merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi, pusat segala kekuasaan. Atas kebesarannya, kekayaan yang melimpah, istana yang indah megah, yang demikian itu, ia sangat dihormati oleh raja-raja lain dan menjadi populer di seantero negeri. Oleh karena itu raja-raja dari berbagai negeri dengan kerelaan mengirimkan upeti, mempersembahkan putri taklukan, memberikan apa saja yang dibutuhkan raja. (Purwadi, 2007:57)

Praktik-praktik pemberian upeti pada masa kerajaan banyak diperuntukan sebagai tanda kesetiaan kepada raja atau kerajaan, sehingga pemberiannya tidak memiliki tendensi apapun, sehingga murni sebagai bentuk pemberian dari rakyat kepada raja atau kerajaan melalui pejabat kerajaan. Konsep pemberian upeti

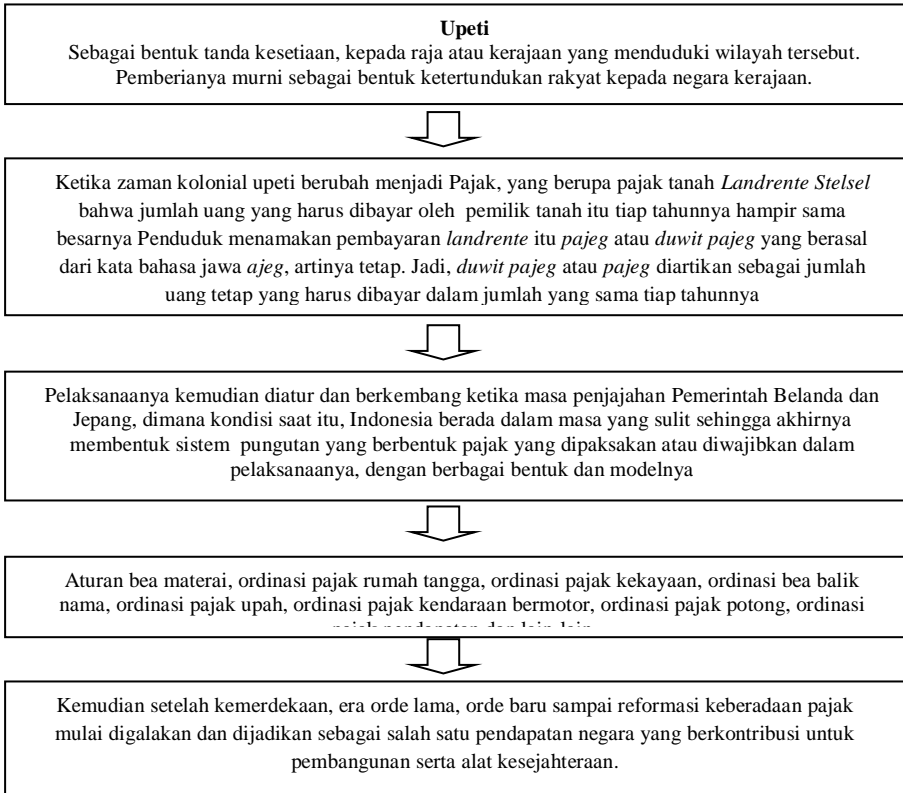
semacam ini yang di Negara Barat kemudian diadopsi sebagai Pajak, dimana pemberian tersebut ditentukan besarnya, dan dipaksakan pembayarannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Pajak bukan istilah asing bagi bangsa Indonesia, bahkan kata itu telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Istilah Pajak baru muncul pada abad ke 19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintahan Kolonial Inggris tahun 1811 – 1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkanlah Peraturan *Landrente Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Penduduk menamakan pembayaran *landrente* itu *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari kata bahasa jawa *ajeg*, artinya tetap. Jadi, *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama tiap tahunnya. (Negara, 2008: 8)

Pajak yang dikenal di Indonesia terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena undang – undang Pajak yang ada dianggap terlalu menitikberatkan pada hukum barat dan sedikit sekali memuat ketentuan hukum adat yang berlaku yang mana dirasa sangat bertentangan dengan kepribadian kita, maka disusunlah undang – undang Pajak nasional yang merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannya memiliki arti sejarah bagi bangsa dan Negara, undang – undang Pajak nasional terdiri dari: 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk keempat kalinya dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak Penghasilan; 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk ketiga kalinya dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn). Fungsi pajak di dalam Negara dikenal ada tiga, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*), dan fungsi sosial. (Law, 2010: 5-6)



Gambar 3.22 Skema Perkembangan Kultur dan Struktur Masyarakat Indonesia



sumber diolah dari Praktik-praktik Pemberian Upeti menjadi pajak

Praktik pemberian upeti dahulu merupakan tatanan nilai-nilai kebudayaan masyarakat di era kerajaan, yang menjadi sebuah tradisi tentang pelanggaran praktik-praktik pemberian hadiah, dari rakyat kepada pejabat atau negara. Pemberian-pemberian tersebut tidak lagi tulus melainkan penuh maksud serta tendensi, sehingga digolongkan sebagai tindakan kontraprestasi. Dalam Perkembangan zaman setelah selesainya fase kerajaan, terdapat beberapa perubahan dari bentuk praktik pemberian upeti di Indonesia, hal tersebut terlihat dari budaya *patronase* yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah sistem tanah Ulayat dan Tanah bengkok, yang merupakan bentuk pemberian resmi untuk kepala desa atau lurah.

Hak persekutuan atas tanah disebut hak ulayat. Di dalam ketentuan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui dan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, dijelaskan pula bahwasannya hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. (Hendriatiningsih S dkk, 2008: 518-519)

Tanah merupakan modal dasar bagi untuk pembangunan dan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sebagai imbalan jasa dan penghormatan kepada Kepala Desa dan Prangkat Desa, maka digunakanlah tanah yang disebut tanah bengkok yang merupakan tanah desa yang penggunaannya untuk upah atau ganjaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Tobing, 2009: 1)

Praktik-praktik tersebut, kemudian berkembang kedalam konsep – konsep kekuasaan di Indonesia, bagaimana kekuasaan itu merupakan domain dari kelas bangsawan atau kerabat kerajaan yang memiliki hubungan darah, sehingga kedudukan-kedudukan dalam pemerintahan dikuasai oleh kelas-kelas tersebut. Kondisi inilah, yang kemudian terus melembaga, kedalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, yang menjadikan interaksi sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh sistem kelas, dimana masyarakat jelata memiliki *mindset* atau pola pikir, yang berasumsi bahwa kelas-kelas bangsawan yang menempati posisi-posisi di pemerintahan harus dihormati dan diberikan persembahan, sebagai bentuk tanda kesetiaan.

Dalam disertasi klasiknya yang berjudul *The Making of A Bureaucratic Elite* (1979), Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola *patron-client* di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau *pamong-praja* di Indonesia. (Kumorotomo, 2008: 2)



Kondisi tersebut berakibat terhadap dominasi yang dimiliki masyarakat kelas atas untuk mempertahankan kekuasaannya, agar mendapatkan prioritas-prioritas dalam bentuk pelayanan dan upeti, sehingga hubungan antara masyarakat dengan Negara atau penyelenggara Negara tidak lagi sebagai sebuah tindakan yang murni tetapi lebih tendensius serta kontraprestasi.

Pola pembangunan yang dijalankan Soeharto menciptakan disparitas yang curam antara *the haves* dan *the have-nots*. Soeharto memberikan fasilitas pada individu dan kelompok tertentu yang mau tunduk dan mendukung kelanggengan kekuasaannya. Dari situ muncul apa yang disebut kelompok konglomerat, kroni, dan kelompok pebisnis yang memiliki kedekatan politik dan kekerabatan dengan Soeharto (*politico-business families*).¹⁰ Berbagai privilese dan pengecualian pada kelompok-kelompok itu menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sialnya, Soeharto pun masih menganggap praktek korupsi dengan dalih bahwa *korupsi is by product of accelerated economic growth* (Korupsi dianggap uang semir yang fungsinya sebagai pelumas mesin pembangunan). (Nasution, 2012: 7)

Kondisi tersebut, kemudian memberikan jalan terhadap praktik-praktik persembahan kepada Negara atau penyelenggara Negara, dengan berbagai macam bentuk dan motif, sehingga melahirkan praktik-praktik suap serta gratifikasi. Praktik-praktik suap dan gratifikasi merupakan sebuah bentuk tindakan kontraprestasi, yang disebabkan karena bentuk pemberian maka seseorang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan, karena praktik tersebut pejabat melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan.

Inilah keanehan-keanehan kasus Miranda dan Nunun yang menyebabkan 26 Anggota DPR Periode 2004-2009 ditetapkan sebagai tersangka penerima traveler cheque tersebut: 1. Miranda Gultom terpilih sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI) pada tahun 2004. 2. Ternyata terpilihnya Miranda Gultom karena ada suap berupa travel cheque atau cek perjalanan kepada 26 orang anggota DPR. Totalnya lebih dari 10 miliar rupiah. 3. Cek itu diserahkan oleh Nunun atau stafnya. Nunun adalah seorang wanita pengusaha, sekaligus sebagai istri mantan Wakapolri Adang Dorodjatun, yang pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI bersaing dengan Fauzi Bowo., tapi kalah suara 4. Sudah ditetapkan 26 anggota DPR sebagai tersangka, beberapa di antaranya sudah lama diadili dan sudah terbukti bersalah. 5. Nunun Nurbaeti yang diduga sebagai

pemyuap, sampai saat ini tidak diketahui pasti keberadaannya, padahal KPK punya alat untuk menyadap percakapan telepon Nunun dan suaminya Adang atau pengacaranya, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan saat kasus —Cicak dan Buaya|| dengan Susno Duadji dan kasus Anggodo. 6. Miranda Gultom sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, padahal suap-menyuap ini terkait dengan pemilihan dirinya sebagai DGSBI. 7. KPK sudah menetapkan 26 tersangka penerima suap, dan terbukti di sidang pengadilan bahwa memang suap meyuap itu ada, tetapi yang menyuap belum ditetapkan sebagai tersangka, padahal mestinya yang menyuap itu yang harus diadili terlebih dahulu. 8. Pertanyaannya adalah: Untuk apa Nunun menyuap para anggota DPR tersebut, dan apa untungnya bagi pengusaha seperti Nunun kalau Miranda Gultom terpilih sebagai DGSBI, karena total uang untuk menyuap itu lebih dari 10 miliar. 9. Apakah Miranda Gultom dapat mengeluarkan suatu kebijakan Bank Indonesia yang dapat menguntungkan Nunun Nurbaeti dan para pengusaha yang diduga ikut mendanai suap menyuap itu. (<http://hukum.kompasiana.com>)

terjadi kasus yang sangat besar dan diduga melibatkan pejabat negara misalnya dugaan keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus *bailout* Bank Century senilai 6,7 triliun rupiah. kasus yang mencuat dan menjadi perdebatan hampir seluruh elit negara pada medio awal tahun 2010 tersebut sangat menyita perhatian seluruh masyarakat di Indonesia karena dugaan adanya tindakan menyimpang yang diduga dilakukan oleh Wakil Presiden Boediono sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden yaitu ketika menjabat Gubernur Bank Indonesia. kasus tersebut menjadi perhatian seluruh elit politik negara yang sebagian besar berkesimpulan bahwa Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya karena diduga kuat terlibat kasus *bailout* Bank Century tersebut yang dianggap merugikan negara triliunan rupiah. (Wildan, 2010: v-vi)

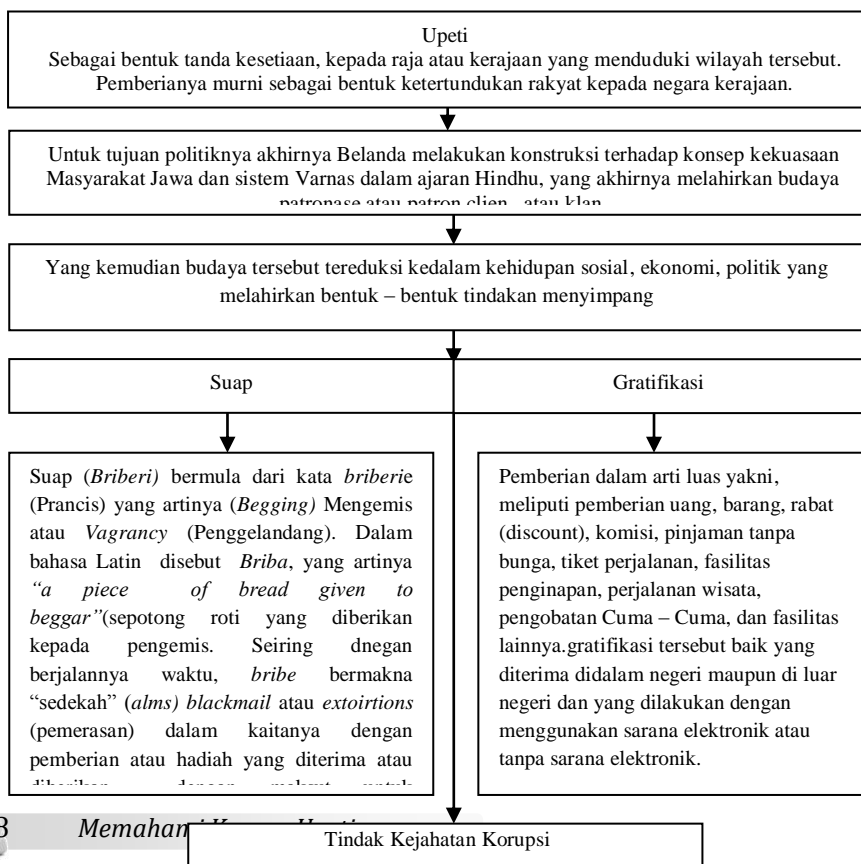
Dari hasil analisis kesejarahan, bentuk pemerintahan yang menekankan pada populasi yang kontinu dalam kesejarahan Indonesia hingga saat ini merupakan dasar bagi praktik korupsi. Pemahaman upeti, hadiah, dan tanda loyalitas menjadi kabur batasannya dalam praktik pemerintahan dan politik modern yang menyebabkan lahirnya praktik-praktik korupsi. Hal ini ditambah dengan bentuk komunikasi politik yang lebih mengutamakan relasi personal dari pada prinsip birokrasi modern yang tidak humanis. Kerangka budaya lisan juga berkontribusi dalam praktik korupsi modern di Indonesia dalam perspektif komunikasi politik. (Wibowo, 2007: 1)



Belum Dahlan menyebut nama, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan Putro, mengaku pernah diminta upeti dan menyatakan kesiapannya untuk membeberkan nama-nama oknum anggota DPR itu. "Saya tidak mau menyebutkan nama-namanya, tapi kalau saya dipanggil DPR untuk pertanggungjawaban omongan itu, saya siap," ujarnya, sebagaimana diberitakan Tempo (27/10/2012). Lewat wawancara di televisi, Dirut RNI itu kembali menyatakan hal serupa. (Yatim, 2012: 1)

Praktik-praktik suap dan gratifikasi, merupakan tindak kejahatan korupsi, yang memiliki kriteria serta tipikal berbeda, Suap merupakan bentuk pemberian berupa uang atau janji untuk memberikan sesuatu untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan jabatan atau wewenangnya, yang akan mempengaruhi keputusan dari sebuah permasalahan. Sedangkan gratifikasi merupakan bentuk pemberian bisa berupa uang, barang, maupun jasa atau fasilitas baik dengan menggunakan media alat elektronik maupun tidak ataupun dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri.

Gambar 3.23 Pelembagaan Upeti Menjadi Suap dan Gratifikasi



Sumber diolah dari Praktik-praktik Pemberian Upeti menjadi Suap dan Gratifikasi

Proses pelembagaan praktik pemberian upeti menjadi suap dan gratifikasi seperti penjelasan diatas dapat dispesifikasikan kedalam bentuknya, dimana bentuk pelembagaan praktik pemberian upeti seperti penjelasan diatas dapat memberikan contohnya, seperti dibawah ini.

Tabel 3.2 Contoh Pelembagaan Praktik Upeti, Suap, dan Gratifikasi

Periodisasi	Upeti	Suap	Gratifikasi
Zaman Pra sejarah	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
Zaman Sejarah	Ditemukan salah satunya ketika zaman kerajaan Singasari. Pada tahun 1820 dan 1821 datang utusan Kubhilai –khan yg menuntut agar Kertanegara mengakui kedaulatan Kubhilai– khan di China. Kertanegara diminta mengirimkan seorang pangeran ntk menyerahkan upeti kpd Kubhilai –khan. (Husein, 2008: 165)	tidak ditemukan dan Belum dikenal istilah suap	Tidak ditemukan, dan belum dikenal istilah Gratifikasi
Zaman Kolonial	Ditemukan salah satunya ketika era mataram baru, dimana Dlm Grebeg Maulud / peringatan kelahiran Nabi Muhammad, pejabat yg diberi lungguh wajib datang ke keraton untuk memberikan upeti sbg tanda loyalitas. (Kwee	Kekuasaan yang besar oleh pemerintahan kolonial, akhirnya membawa konsekuensi untuk melakukan praktik suap, dimana suap ini diperuntukan agar segala bentuk perizinan dapat diperoleh para saudagar tersebut-...yang terjadi adalah	Tidak ditemukan, dan belum dikenal

Periodesasi	Upeti	Suap	Gratifikasi
	2006: 29)	pengeluaran yang terus meningkat, kebutuhan uang tunai yg tinggi, beredarnya uang kertas secara massal di masyarakat, praktek korupsi dan kecurangan di antara para pegawai Badan Dagang, praktek perdagangan gelap dengan pihak asing, penyelundupan, pengkhianatan para penguasa lokal, lemahnya kontrol birokrasi pemerintah dan pengeluaran yang besar di sektor militer (Raffles, 2008: xx).	
Zaman Kemerdekaan	Praktik upeti terlihat dari budaya patronase, budaya ini marak ketika zaman orde baru dimana segala bentuk usaha bnyk dikuasai oleh keluarga cendana, oleh karena itu jika ingin membangun usaha dimulai dari restu keluarga cendana. Sehingga kebijakan orde baru sangat memonopoli kegiatan ekonomi, sehingga kekuasaan tersebut menjadi tidak terkontrol (Susanto, 1999:23) Kondisi tersebut tdk mampu diperbaiki oleh orde baru bahkan menjadi semakin parah. Di masa pemerintahan Soeharto tdk ada lagi <i>merit system</i> . Kekuasaan mutlak ditentukan oleh uang. Birokrasi dijalankan dengan	perkembangan praktik suap di Indonesia merupakan cara untuk mencapai keinginan melalui lobi- lobi untuk mempengaruhi keputusan yg akan diambil sehingga mempengaruhi hasil akhir dari sebuah keputusan. Dan Soeharto terguling karena dipecat oleh rakyat Indonesia, yaitu oleh pejuang-pejuang reformasi yg revolusioner, krn tll menyalahgunakan wewenang yg ada padanya sebagai dictator yang militer yg lebih zhalim dan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Korupsi) demi kepentingan diri dan keluarganya serta kroni- kroninya. (A.N, 1999: 184)	Sbg tindakan yg kontraprestasi, karena bertujuan u Kepentingan politik, bisnis dan tidak bersifat pemberian sukarela. Era ini muncul akibat berbagai ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat Indonesia terhadap berbagai kebijakan dan perilaku para penguasa Orde Baru yang dianggap tidak lagi mempedulikan keinginan dan kepentingan rakyat. Hal-hal yang diprotes dari kebijakan dan perilaku pemerintah Orde Baru tersebut adalah Kolusi, Korupsi, dan

Periodesasi	Upeti	Suap	Gratifikasi
	<p>sistem upeti, termasuk di institusi-institusi penegakan hukum, di pusat hingga daerah-daerah. Polisi, Jaksa, Hakim memegang kekuasaan yg teramat besar sehingga Advokat pun tdk berdaya dan ikut larut dlm sistem upeti dan praktik suap Pola pembangunan yg dijalankan Soeharto menciptakan disparitas yg curam antara <i>the haves</i> dan <i>the haves-not</i>. Soeharto memberikan fasilitas pd individu dan kelompok tertentu yg mau tunduk dan mendukung kelanggengan kekuasaannya. Dari situ muncul apa yg disebut kelompok konglomerat, kroni, dan kelompok pebisnis yg memiliki kedekatan politik dan kekerabatan dg Soeharto (<i>politico-business families</i>). (Nasution, 2012: 7-8)</p>		<p>Nepotisme (KKN), sikap represif terhadap rakyat dg pembatasan berbagai kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengekalan terhadap tokoh - tokoh yang vokal, pelarangan pengedaran buku-buku yg dianggap membahayakan pemerintah, pembredelan surat kabar, dan berbagai kebijakan lainnya yg berhubungan dengan pola pengaturan pemerintahan dan tatanan sosial yg dianggap merugikan masyarakat mewarnai Era Orde Baru ini. (A. Lilis, 2009: 102)</p>
Zaman Pasca Reformasi	<p>Praktik ini dlm bentuk formalnya tdk ditemukan, hanya sbg istilah yg digunakan sbg bentuk pemberian yg dianggap ilegal saat ini. Kasusnya terjadi ketika Dahlan Iskan sbg menteri BUMN membuat</p>	<p>Praktik-praktik suap, bnyk terjadi untk mempermudah urusan/ untk mempengaruhi sebuah keputusan, kasus-kasus ini bnyk terjadi di kepolisian, Kejaksaan, dan juga di sektor ekonomi. Dlm praktek sehari-hari tdk jarang kita jumpai</p>	<p>Praktik-praktik gratifikasi dapat dijumpai di beberapa kasus misalkan kasus pembangunan wisma atlet yang melibatkan bendahara dan sekretaris partai</p>

Periodisasi	Upeti	Suap	Gratifikasi
	sebuah pernyataan mengenai anggota dewan yg banyak meminta Upeti, kpd BUMN yg di pimpinya. Dahlan sendiri mengatakan, imbauan kepada para direksi BUMN ini disampaikan karena ada edaran dari Sekretariat Kabinet yg meminta menerbitkan surat edaran nomor 542 tntng upaya mencegah praktik kongkalikong dana APBN. "Surat edaran itu sama kpd seluruh pejabat, termasuk Menteri BUMN dan jajarannya," kata Dipo sebagaimana ditulis (gatra.com. diakses 8 desember 2012)	pegawai negeri/ pejabat/ penyelenggara negara/ pelayan bangsa yg berharap menerima hadiah dari pelayanan yg mereka berikan. Terkadang pelayanan baru diberikan bila ada uang pelicin atau uang jasa. Jangan harap pelayanan publik akan lancar bila tdk menyerahkan uang pelicin (Vincentia Hanny S, Kompas, 1 September 2005), Kamis (24/11) sekitar pukul 11.30 WIB di halaman parkir DPRD kota Semarang. Ketiganya ditangkap krn diduga terlibat praktek suap. KPK menemukan uang di 21 amplop dg total nilai Rp 40 juta di dlm nya. Selain itu, KPK menemukan uang sejumlah Rp 500 juta di ruangan Zaenuri. (detikNews.com. diakses 19 september 2012)	demokrat yaitu Nazarudin dan Engelina Sondakh, serta beberapa kasus yang terjadi di daerah mengenai tindak kejahatan gratifikasi yang berupa pemberian cek, ataupun barang, untuk memperlancar s Hal yang sama dapat dijumpai dalam kasus Anggodo pada tahun 2009 yang menjadi terkenal setelah rekaman pembicaraannya di buka di media massa dan kasus Angelina Sondakh dengan "apel Washington" dan "apel malang" nya. Aturan berupa kosa kata dan eufimisme lisan yang mengindikasikan bahwa pengetahuan komunikasi menjadi sentral dalam praktik korupsi di Indonesia (Wibowo, 2004: 23)

sumber diolah dari Praktik-praktik Pemberian Upeti dan perkembanganya

Dari beberapa contoh konkrit mengenai pelembagaan praktik upeti menjadi suap dan gratifikasi maka dapat di petakan



bentuk pelebagaan upeti dari masa ke masa, sehingga dapat dilihat bentuknya.

Tabel 3.3 bentuk pelebagaan upeti dari masa ke masa

	Pra Kolonial	Orde lama	Orde Baru	Pasca Reformasi
Konsep	Upeti	Suap	Pelicin / sogokan	Suap dan gratifikasi
Konteks	Uang	Uang, Wanita	Uang	Uang Jasa
Motif	Kelancaran dlm bisnis	Memperlancar urusan	Memudahkan urusan	Penuh tendensi dan kepentingan

Sumber diolah dari tentang Praktik - praktik Pemberian Upeti & perkembanganya

2. Pola pelebagaan dari praktik pemberian Upeti Menjadi Pajak, Suap dan Gratifikasi

Pelebagaan dari praktik pemberian Upeti kemudian diasumsikan menjadi pajak, suap dan gratifikasi hal tersebut dapat dijelaskan sebagai efek dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pristiwa tersebut menghubungkan pristiwa-pristiwa sejarah masa lalu dengan peristiwa saat ini, pristiwa-pristiwa sejarah merupakan cerminan kehidupan masyarakat Indonesia ketika itu, dimana pristiwa sejarah merupakan refleksi tentang prilaku dan pandangan hidup manusia, karena terdapat dimensi kebudayaan yang menjadi latarbelakang terjadinya sebuah pristiwa, keterkaitan antara pristiwa masa lalu dengan saat ini, menyebabkan adanya hubungan kausalitas, karena realitas yang terjadi ketika itu berhubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini, karena kondisi tersebut menyangkut kebudayaan masyarakat yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan serta prilaku manusia. Penelusuran secara historis mengenai, kondisi yang terjadi saat ini, bisa dijadikan sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang.

Praktik pemberian upeti merupakan prilaku yang dibangun sebagai sebuah kebiasaan yang dianggap benar,



sehingga praktik-praktik itu berlangsung secara terus menerus dan berkembang secara alamiah, serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya lazim dilakukan oleh masyarakat. Praktik upeti dapat kita lihat sebagai bangunan yang terbentuk dari konsepsi kekuasaan, yang merupakan konstruksi falsafah masyarakat Jawa, untuk memilih seorang raja atau pemimpin, yang merupakan masyarakat terpilih yang berasal dari kelas atas, sehingga wajib ditaati dan dihormati, agar selamat dunia dan akhirat, karena kekuasaan yang diperoleh berasal dari *wahyu* yang diturunkan oleh sang maha pencipta, walaupun tidak dapat kita generalisasikan secara Nasional, akan tetapi hal ini dirasakan sangat kuat mempengaruhi kehidupan di Indonesia, tentang bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dan juga direstui, hal ini berangkat dari konsep *wahyu* yang menjelaskan tentang pelegitimasi kekuasaan dalam masyarakat Jawa, yang terbentuk karena adanya *wahyu*, yang diberikan oleh Tuhan, kepada seorang pemimpin, karena pemimpin tersebut telah dikaruniai kecakapan dan kemampuan untuk memimpin komunitasnya, sehingga restu Tuhan tersebut akan menjadikan seorang raja menjadi wali Tuhan dimuka bumi.

Dalam birokrasi kraton Jawa dikenal istilah *ratu Ratu-binathara* memiliki tiga macam *wahyu*, yaitu *wahyu nubuawah*, *wahyu hukumah*, dan *wahyu wilayah*. Yang dimaksud dengan *wahyu nubuawah* adalah *wahyu* yang mendudukkan raja sebagai wakil Tuhan. *Wahyu hukumah* menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wewenang *murbamisesa*, kedudukannya sebagai Sang Murbawisesa, atau Penguasa Tertinggi ini, mengakibatkan raja memiliki kekuasaan tidak terbatas dan segala keputusannya tidak boleh ditentang, sebab dianggap sebagai kehendak Tuhan. *Wahyu wilayah*, yang melengkapi dua macam *wahyu* yang telah disebutkan di atas, mendudukkan raja sebagai yang berkuasa untuk memberi *pandam pangauban*, artinya memberi penerangan dan perlindungan kepada rakyatnya. Kraton bagi orang Jawa mempunyai makna yang sangat dalam. Orang Jawa menganggap Kraton sebagai pusat kosmos. Mengungkap permasalahan kehidupan kraton tidak dapat dipisahkan dari persoalan sumber legitimasi kekuasaan raja. (Purwanto, 2007: 55-56)

Hal tersebut pernah dikritik oleh Eki Syahrudin, mantan anggota komisi VII DPR RI Tahun, Tanggal 17 Desember 1997, Di Taman Mini Indonesia, yang menyatakan kebudayaan daerah Jawa yang cenderung *Kratonik* itu sudah kurang layak sebagai modal penyongsong abad XXI nanti. Budaya strata itu harus dirombak, diganti dengan budaya demokratik. Pasalnya, budaya *kratonik* itu justru menghambat kemajuan dan kreatifitas bangsa.

Budaya semacam ini sering sekali anti kritik, melainkan lebih kearah ABS (Asal Bapak Senang) atau *Bapakisme*. Implementasi budaya Jawa yang yang kraton *life* dan terlalu *hirarkis* itu, menghendaki bawahan itu harus patuh. Bawahan harus bisa ngapurancang, tutup mulut, *Sendhika Dhawuh*, dan *Inggih-Inggih*, jika dipinjam istilah Darmanta Jatman. Budaya ini akan mematikan prestasi. Kurang memupuk Jiwa untuk berkembang secara wajar. (Suwardi, 2005: 3-4)

Keberadaan seorang raja, sebagai pemimpin dalam konsep masyarakat Jawa, menjelaskan tentang kedudukan serta posisi raja sebagai kalangan yang spesial dan khusus, sehingga kekuasaan yang dimilikinya, tidak dapat dipungkiri keabsahannya, karena hal tersebut merupakan kehendak dari sang pencipta, hal itu ditandai dengan turunya *wahyu* dan *pulung* sebagai sebuah pertanda, yang dipercayai oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk keabsahan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Kepercayaan - kepercayaan ini yang kemudian berkembang luas pada masyarakat, sehingga muncul konsep *Kawula - Gusti*, dimana posisi *gusti* adalah raja dan kerabat kerajaan yang memiliki hubungan darah atau geneologis, sedangkan *kawula* merupakan kelas bawah yang harus menghormati kedudukan kelas-kelas yang berada diatasnya, sehingga terjadilah pengkultusan terhadap raja sebagai kelas atas yaitu golongan yang berisi para kaum bangsawan.

Konsepsi kelas tersebut, banyak ditemui ketika jaman kerajaan, dimana masyarakat terbagi menjadi beberapa kelas, yang memiliki karakteristik, prilaku dan gaya hidup yang berbeda-beda sesuai dengan kelas sosial yang dimilikinya. menggambarkan bahwa masyarakat Surakarta terbagi dalam dua golongan sosial yang besar yaitu golongan atas yang terdiri dari para bangsawan dan *priyayi*, dan golongan bawah yang terdiri dari petani, buruh tani, pedagang, tukang, perajin dan lain-lain. Bangsawan adalah golongan sosial atas yang memiliki hubungan genealogi dengan raja. Mereka merupakan *sentana* atau keluarga raja. *Priyayi* juga termasuk golongan sosial atas dan mereka merupakan pejabat dalam pemerintahan kerajaan atau *narapraja*. (Suhartono, 1999: 22-23)

...kepercayaan pada kelayakan para bangsawan masih ada, malah tetap di essensialkan atau disakralkan. Sebagai contoh, menurut orang Bugis-Makasar kaum bangsawan suku mereka mempunyai sifat-sifat yang mewah: mereka *Maggeteng* (konsisten atau teguh pada pendirian), 2). *Malempu* (jujur), 3). *Sipakatau* (menghargai sesama manusia). Para bangsawan disucikan menjadi *-Superman"*. Contoh lain: Pemimpin toraja adalah 1).



Sugi (Kaya), 2). *Bida* (turun dari langit dan berwawasan luas), 3). *Barani* (Berani), 4). *Manarang* (Pandai, misalnya pandai berdoa dan pandai berbicara), 5). *Kinna* (berbudi) menurut adat Toraja hanya *Parenge'* (Bangsawan) memiliki sifat-sifat itu. (Van Der Van, 2004: 36)

Mengakarnya sistem kelas, berakibat kepada hegemoni yang menciptakan ketertundukan masyarakat bawah atau rakyat jelata kepada kalangan bangsawan, dimana kondisi tersebut terlihat dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga apapun tindakan serta perilaku dari kalangan ningrat, akan tetap didukung oleh masyarakat kelas bawah, sebagai sebuah perintah dan pedoman untuk mengatur kehidupannya, yang diturunkan oleh Tuhan untuk dipercayakan kepada raja atau pemimpin.

Setting sosial kehidupan masyarakat berdasarkan kelas, tereduksi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana adanya perbedaan-perbedaan terhadap eksistensi sebuah kelas dalam kehidupan, Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai bidang, seperti pemerataan pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, hal ini hanya boleh dikuasai oleh para kaum bangsawan. Bentuk-bentuk ketertundukan tersebut merupakan hegemoni kaum bangsawan kepada rakyat jelata, dimana kaum bangsawan merasa eksklusif sebagai golongan kelas atas, hal inilah yang berakibat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran sistem kelas dimasyarakat. Ralitas tersebut yang mengantarkan masyarakat jelata sebagai kelas yang dihegemoni. Ketertundukan masyarakat dalam kehidupan sehari - hari, baik terhadap raja maupun kerajaan, dibarengi dengan pelaksanaan titah - titah raja, dimana kebijakan - kebijakan yang diambil oleh raja harus dilaksanakan oleh masyarakat kelas bawah secara sukarela dan sukacita, walaupun terkadang memberatkan. Perkembangan sistem kelas dalam kehidupan masyarakat, dikokohkan konstruksi oleh kaum bangsawan dan bangsa kolonial Belanda sebagai budaya, yang mewajibkan masyarakatnya untuk memberikan bentuk-bentuk persembahan. Berwujud upeti, yang akan diberikan kepada kerabat kerajaan, hal ini disebabkan karena dahulu sistem pemerintahan kerajaan, menempatkan posisi serta jabatan-jabatan strategis hanya kepada keluarga atau kerabat dekat dari raja. Kondisi tersebut sengaja dipertahankan oleh kaum bangsawan sebagai konstruksi kehidupan sosial masyarakat kerajaan kala itu, untuk melakukan hegemoni atau penguasaan terhadap rakyat, hal ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan raja dan kerabat kerajaan. Bersama dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, golongan kaum

bangsawan itu menduduki strata tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat tradisional Jawa pada jaman kerajaan Mataram Islam.

Semakin dekat hubungan darah seseorang dengan raja, maka semakin tinggi pula status sosialnya. Prinsip keturunan sebagai penentu status ini mengakibatkan sulinya mobilitas sosial dari orang-orang yang bukan keturunan raja. Hal itu diperparah oleh kebiasaan dalam masyarakat tradisional yang memang cenderung untuk mempertahankan status sosial yang sudah mapan sebagai suatu keharmonisan. Sistem status sosial semacam itu lazim disebut dengan istilah *ascribet status*, yaitu status sosial yang diperoleh berdasarkan keturunan atau kelahiran tanpa memandang atau membedakan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. (Supriyono, 2008:3)

Sistem sosial kemasyarakatan berdasarkan kelas, akhirnya membentuk kelas-kelas sosial dalam kehidupan masyarakat, yang didominasi oleh kalangan atas, hal ini tampak pada masyarakat-masyarakat kerajaan kala, masa kolonial Belanda yang mempertahankan kondisi tersebut, untuk melanggengkan dominasinya, demi kepentingan pribadi serta kerabatnya, karena motif-motif kekuasaan dan ekonomi.

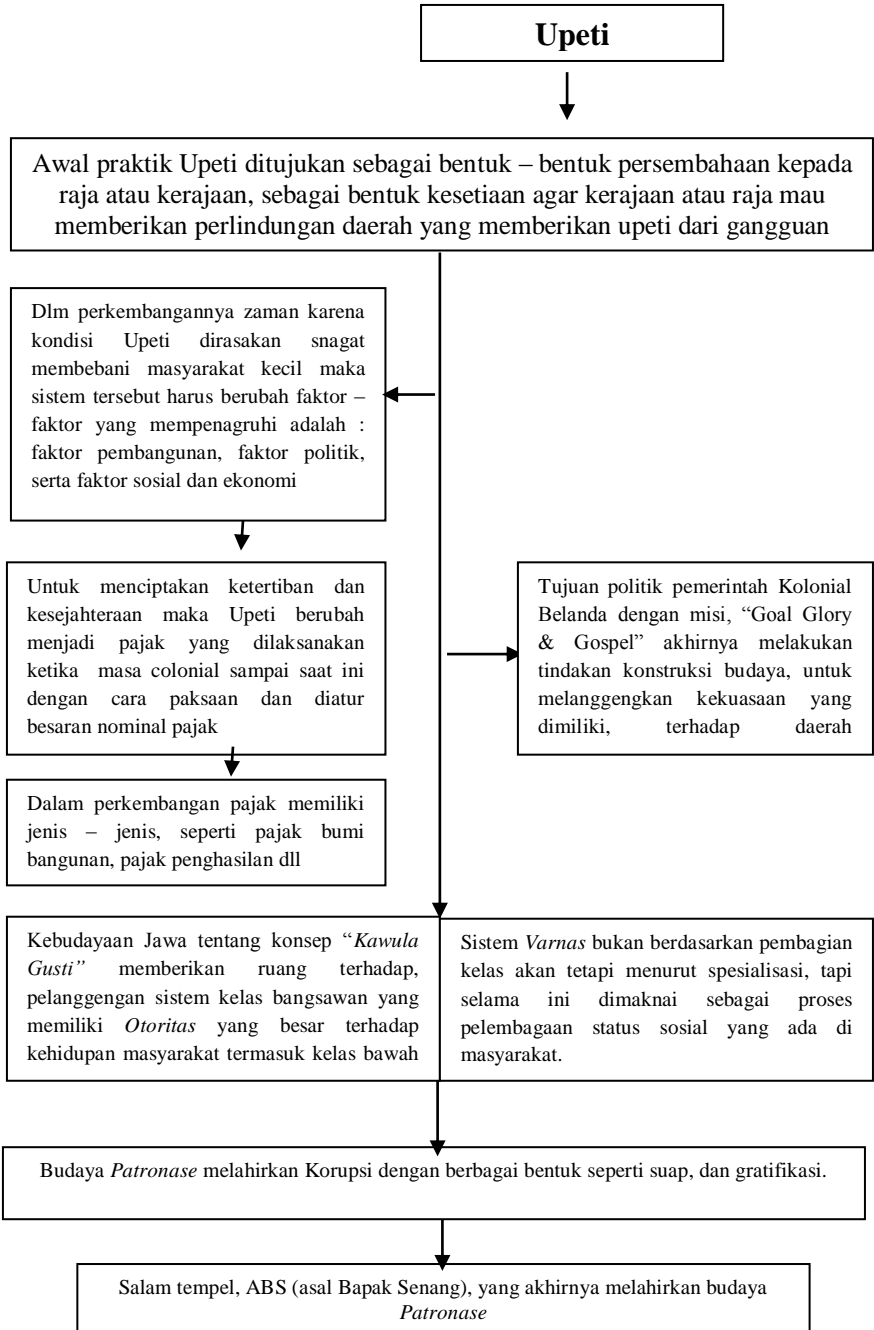
Perjalanan waktu, kemudian memberikan sebuah gambaran tentang sejarah sistem kelas yang tereduksi kedalam nilai-nilai sistem pemerintahan modern berbentuk Negara, dimana pada masa orde baru dan lama, dibawah pimpinan Soeharto, pemerintahan sentralistik dan otoriter, tetap mempertahankan budaya-budaya menyenangkan atasan *patronase*, atas dasar adanya hirarkis struktural maupun kultural, dengan berbagai macam cara. Sistem pemerintahan otoriter ini, menempatkan posisi golongan-golongan militer dan kerabat cendana sebagai trah, kerajaan baru di era modern.

Kekuasaan yang dimiliki oleh presiden Soeharto, berlangsung selama 32 tahun, dimana banyak permasalahan - permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan Negara tidak dapat terungkap, karena banyak sekali praktik-praktik pelanggaran mulai dari penggelapan keuangan, lobi-lobi proyek Negara untuk kalangan cendana, dan masih banyak lagi model - model penyelenggaraan Negara yang menyimpang.



Kondisi tersebut, akhirnya menimbulkan hegemoni yang sangat luar biasa dari rezim soeharto dimana masyarakat tunduk dan patuh kepada penguasa, bahkan tidak berani untuk menentang kebijakan - kebijakan yang salah dan bermasalah, selain itu, ada beberapa cara hegemoni Negara kepada rakyat, untuk mengokohkan kekuasaan presiden Soeharto dengan kekarasaan atau represif maupun secara ideologis. Pristiwa-pristiwa tersebut merupakan strategi presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun. Kondisi tersebut akhirnya membawa kepada ketidakpuasan-ketidakpuasan karena berbagai macam penindasan, pengekakan yang dilakukan oleh rezim militer tersebut, yang akhirnya membawa masyarakat kepada kondisi-kondisi penderitaan yang terakumulasi, sehingga melalui para kaum intelektual yaitu para mahasiswa untuk melancarkan *counter hegemony* ataupun penolakan terhadap penguasaan-penguasaan dari pemerintahan yang lalim, dengan aksi-aksi revolusioner untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto, yang akhirnya lengser. Praktik-praktik curang dalam penyelenggaraan pemerintah, tidak berhenti begitu saja, malah pasca reformasi banyak tindakan-tindakan korupsi banyak yang terungkap dan menghasilkan para koruptor-koruptor yang selama ini berafiliasi dengan keluarga cendana untuk melakukan praktik-praktik curang tersebut. Kondisi pasca reformasi, dengan agenda revolusi besar-besaran ternyata tidak mampu untuk menghapuskan praktik-praktik ilegal, yang selama ini mulai dari jaman kerajaan sampai pada saat ini masih banyak terjadi, berbagai catatan mengenai tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang silih berganti dengan berbagai macam model, sehingga tidak mengherankan, bahwa praktik-praktik tersebut, hingga detik ini banyak terjadi Budaya-budaya untuk menyenangkan atasan, salam tempel atau istilah-istilah lain mengindikasikan penciptaan sistem pemerintahan keluarga atau rekanan, serta klan, kemudian berimbas kepada penyelenggaraan pemerintah yang tidak kunjung membaik. Kondisi tersebut yang kemudian melahirkan pengusaha-pengusaha yang *membekengi* penguasa karena adanya kepentingan dan tujuan tertentu.

Gambar 3.24 Pola pelembagaan Upeti Menjadi Pajak, Suap dan Gratifikasi



Sumber diolah dari data tentang konstruksi budaya terhadap pembentukan praktik-praktik Pajak, Suap dan Gratifikasi.



Faktor – faktor yang mempengaruhi Pelembagaan Upeti menjadi suap dan Gratifikasi.

Praktik pemberian Upeti sudah ada sejak zaman kerajaan, dimana praktik pemberian Upeti biasanya dilakukan di daerah pesisir pantai. Praktik tersebut bisa dilihat pada Kerajaan Sriwijaya yang berjaya di kawasan pesisir pantai karena sektor perdagangannya, proses tersebut berlanjut , hingga tercipta praktik – praktik suap dan gratifikasi, ada beberapa penyebab terjadinya pelembagaan praktik upeti menjadi suap dan gratifikasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemahaman yang salah masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa yang menjadi etnis paling banyak jumlahnya, terkaitt konsep *“Kekuasaan Manunggaling Kawula Gusti”*
- 2) Adanya perpaduan konsep kekuasaan Jawa dengan, konsep *Varnas* atau *Catur warna* pada masyarkaat penganut Hindu, yang juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa karena etnis Jawa juga dahulunya pemeluk kepercayaan Hindu.
- 3) Hegemoni Politik Pemerintah Kolonial Belanda yang menekankan praktik – praktik kekerasan dan juga dominasi budaya pada masyarakat Jawa dan struktur sosial yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.N, Firdaus. (1999). Dosa-dosa politik Orde Lama dan Orde Baru yang tidak boleh berulang lagi di era Reformasi. Jakarta: Al Kautsar.
- Alkostar, (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Arini, Sri Hermawati Dwi.dkk. (2008). *Seni Budaya Jilid 1 SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Atjeh. Aboebakar. (1985). *Sekitar Masuknya Islam Ke Indonesia*. Solo: CV Ramadhani
- Benda, Harry. dan Irikura. (1965), *Japanese Military Administration in Indonesia Selected Documents*, Southeast Asia Studis, Yale University.
- Bocock, Robert. (2007). *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*. Bandung: Jelasutra.
- Cahyadi, Hari. (1992). *"Louis Althusser, Telaah Negara Dan Ideologi" dalam Diskursus Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia.
- Gazalba, Sidi. (1966). *Pengantar Sejarah sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Gie, Kwik Kian. (1999). *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia: Badai Belum Akan Segera Berlalu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hariadi, Langit Kresna. (2006). *Gajah Mada Hamukti Palapa*. Solo: Tiga Serangkai.
- Husein, Atang dkk.(2008). *Ilmu Pengetahuan Sosial I, Untuk SMP/MTS Kelas VII*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2, Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1970). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- KPK. (2006). "*Memahami untuk membasmi*" buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi. Jakarta : Perpustakaan Nasional.
- McCarthy, E. Doyle. (1996). *Knowledge as Culture*. London & New York: Routledge.
- Muhardiansyah, Doni. dkk. (2010). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Munawir, H.S. (1997). *Perpajakan*, Yogyakarta: PT.Liberty.
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Kybernologi sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Negara, Tunggul Anshari Setia. (2008). *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan ke-2. Malang: Bayu Media Publishing
- Patria, Nezar. dan Andi Arief. (1999). *Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwadi. (2007). *Filsafat Jawa Dan Kearifan Lokal* ISBN 978-979-16160-0-3, Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Purwanto.(2008). *Sosiologi untuk pemula*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Rafiq, Ishaq. (2008). *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia sebuah Investigasi 1997-2007 Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Cahaya Instan Suci.



Said, A. Umar. (2004). *Perjalanan Hidup Saya*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Said, Mas'ud. (2010). *Birokrasi Di Negara biokratis*. Malang: UMM Press.

Sindhudarmoko, Muljatno. dkk. (2001). *Ekonomi Korupsi*. Jakarta : Pustaka Quatum.

Suhartono. (1991). *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Suyanto, Bagong. dan Khusna Amal. (2010). *Anatomi dan perkembangan teori social*. Surabaya: Aditya Media Publishing.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahanya*, Bandung: Kencana Predana Media Group.

Soekarno. (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Yayasan Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi,

Syafii'e, Inu Kencana. (2001). *''Pengantar Ilmu Pemerintahan''*. Bandung: Refika Aditama.

Pustaka dari Skripsi, Tesis dan Disertasi

Hadi, M Syamsul. (2009). *Konsep Kasta dalam Bagavad Gita*. Skripsi S1 Jurusan Perbandingan Agama Dipublikasikan, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Law, Darminto. (2010). *Tinjauan Hukum terhadap aspek pajak penghasilan atas situs web yang dimiliki oleh perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia sehubungan dengan transaksi E-commerce yang dilakukan oleh wajib pajak Indonesia*. Tesis S2 Magister Ilmu Hukum dipublikasikan.Universitas Indonesia.

Nugroho. Sutikno Setyo. (2004). *Giri Kedaton Dalam Konstelasi Politik Di Jawa Pada Masa Pemerintahan Sunan Prapen, 1548-1605*. Skripsi S1 Jurusan Sejarah di publikasikan.Fakultas Sastra Universitas Negri Malang.



Sari, Andi Diah Asma. (2011). *Perilaku wartawan dalam menerima suap di Kabupaen Bone*. Skripsi S1 Ilmu Komunikasi dipublikasikan, Universitas Hasanudin Makasar.

Tobing, Ary Anggraito. (2009). *Eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya pemerintahan desa menjadi kelurahan di kota salatiga*. Tesis S2 Jurusan Magister Kenotariatan dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Wildan, Harris Faddilah. (2010). *Perbandingan konstitusional pengaturan Impachment presiden dan wakil presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika serikat dalam mewujudkan demokrasi*. Skripsi S1 Ilmu Hukum dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pustaka dari Internet berupa Disertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal, Makalah, Paper

Aditya, Oka. (2008). Makalah Pemikiran Tokoh “Bung Karno: Berlayar di Tengah Tiga Gelombang. (Makalah) untuk memenuhi syarat mengikuti Pusdiklatpim PBHMI Jakarta, Januari 2008 Diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://okaaditya.files.wordpress.com>

A Lilis, Nenden. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Karya Sastra Yang Mengupas Persoalan Seksualitas Dan Tubuh Dalam Kesusastraan Indonesia Modern Pada Era Reformasi* (Jurnal). Jurnal Studi Gender & Anak Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009 halaman.100-121. Diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://ejournal.stainpurwokerto.ac.id>

Alkostar, Artidjo. (2009). *Korelasi Korupsi politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi politik Dan Penanggulangannya)*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009. Diakses Tanggal 20 Oktober 2012 Dari <http://law.uui.ac.id>

Aman, (tt). Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, *Sejarah Dan Masalah Pendidikan*, diakses 30 Juli 2011 dari ml.scribd.com

Asnawi. (tt). *Upaya Pemahaman Materi Zaman Prasejarah dengan Pemanfaatan Museum Sebagai Media Pembelajaran*. Dosen FKIP



Universitas Langsa Sumatera. Diakses tanggal 14 Oktober 2012 dari <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>

Bahari, Yohanes. (2010). *Karl Max: Sekelumit tentang hidup dan pemikirannya* (Jurnal). Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 1 No. 1 April 2010 hal 1-9. Diakses 26 Juli 2012 dari <http://jurnal.untan.ac.id>

Bem Fisip Ui, (2012). *Kajian Dan Sikap: Kenaikan Harga Bbm* Artikel. Diakses tanggal 20 oktober dari <http://bem.fisip.ui.ac.id>.

Dadtun, Yusana Sasanti. (2011). *Ritus Per Fumus Dalam Performa Visual Gaya Hidup Komunitas Kolonial di Jawa Pada Abad XX* (Jurnal), Diakronik Volume 3 No. VI Februari 2011. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Diakses 26 Juli 2012 dari <http://Fumeryseent.Blogspot.com>

Demartoto, Argyo. (2007), *Perilaku korupsi di era otonomi daerah fakta empiris dan strategi pemberantasan korupsi di indonesia* (Jurnal). Spirit publik ISSN. 1907-0489 volume 3 nomor 2 hal 89-102. sosiologi fisip universitas sebelas maret surakarta. diakses tanggal 9 juli 2012 dari <http://perpustakaan.uns.ac.id>

Eko, Dadot. (2009). *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Diakses 14 Oktober dari <http://24bit.files.wordpress.com>.

Fadhil, Said. (2007). *Efektivitas penanganan korupsi pada masa pemerintahan susilo bambang yudoyono* (jurnal). Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Samarinda. Diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id>

Hasibuan, Jalantua. (2007), *Kajian kritis – Historis 350 tahun penjajahan Belanda Di Indonesia* (Jurnal), Habonaran Do Bona. Edisi 2 juli 2009, diakses tanggal 9 juli 2012 dari <http://issuu.com>.

Hefni, Moh. (2011), *Runtuhnya Hegemoni Negara Dalam Menentukan Kurikulum Pesantren* (Jurnal), Karsa, Vol. Ixi No. 1 April 2011, diakses 30 Juli 2012 dari <http://karsa.stainpamekasan.ac.id>

Hendriatiningsih.S, dkk.(2008). *Masyarakat dan Tanah adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)* (Jurnal). Jurnal Sosioteknologi Edisi 15 Tahun 7 Desember 2008. Diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://www.fsr.itb.ac.id>.



- Ishak, Mohammad. (2003). *Dekarismatisasi Gus Dur (studi tentang kepemimpinan K.H.Abdurrahman Wahid dalam politik praktis)* (Tesis). Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Diakses tanggal 20 Oktober dari <http://lontar.ui.ac.id>
- Kumorotomo, Wahyudi. (2008). *Budaya Upeti, suap dan birokrasi Publik* (Artikel). diakses 9 juli 2012 dari <http://kumoro.staff.ugm.ac.id>
- Kokog, Nengah. (tt). *Kasta menurut Pandangan Hindu*. Diakses tanggal 20 Oktober 2013 dari <http://sulut.kemenag.go.id>
- Mubah, A. Safril. (2011). *Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi* (jurnal).Volume 24, Nomer 4 Hal: 302-308. Diakses tanggal 14 oktober 2012 dari <http://journal.unair.ac.id>
- Mulyani, Santi Vera. (2007). *Ketika Mahasiswa Bergerak Dan Merubah Wajah Politik 1965 (Makalah)*. Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Refleksi Sejarah Indonesia Bertema "Peran Mahasiswa dalam Perubahan Politik 1965 "Dosen Pengampu: Prof. A. Daliman, M.PdDinar Widiyanta, M.Hum
- Nasution, Adnan Buyung. (2012). *Misi Mulia pendidikan tinggi Hukum Indonesia Menciptakan pemimpin yang berilmu dan berintegritas* (artikel). Diakses tanggal 5 November 2012 dari <http://www.jurnalhet.com>
- Nugroho, Sutikno Setyo. (2004). *Giri kedaton dalam konstelasi politik Di Jawa pada masa pemerintahan Sunan prapen, 1548-1605*, diakses 8 Oktober 2012 dari <http://fis.um.ac.id>
- Nurhadi. (2005), *Korps Korupsi di negeri kleptokrasi* (Artikel no 34). dimuat di Jurnal Ekspresi, Jurnal Mahasiswa FBS UNY edisi Desember 2005, diakses 9 juli 2012 dari <http://staff.uny.ac.id>
- Nurhadi. (2009). *Kekerasan di Indonesia dalam karya Sastra* (Artikel). Jurnal Ibda' P3 M Stain Purwokerto, edisi Januari-Juni 2009. Diakses 14 Oktober 2012 dari <http://staff.uny.ac.id>
- Penjajahan Bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia sumber diolah dari <https://insulinda.wordpress.com/2015/09/08/penjajahan-bangsa-portugis-dan-spanyol-di-indonesia/> pada 01 Maret 2017

- Prawiro, Mulyono D. (2009). *Gambaran Pemimpin Sejati* (Jurnal). Jurnal Gemari Edisi 103/Tahun X/Agustus 2009. Diakses tanggal 20 oktober 2012 dari <http://www.gemari.or.id>
- Revida, Erika. (2003). *Korupsi di Indonesia: masalah dan solusinya* (Jurnal), diakses tanggal 9 juli 2012 dari USU digital library <http://repository.usu.ac.id>
- Salim, Agus. (2010), *Tinjauan kriminologis pemberantasan tindak pidana korupsi* (Jurnal). ADIWIDIA edisi Desember 2010, Fakultas Hukum UKI-Paulus Makassar. diakses tanggal 9 juli 2012 dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id>
- Siahaan, Hotman M. (tt). *Paradigma Perpolisian Komunitas: Mengantisipasi Konflik Sosial Pemilihan Kepala Daerah Paradigma Perpolisian* Halaman 1-15 (Penelitian), diakses 9 juli 2012 dari <http://books.google.co.id>
- Sudrajat. (tt). *Membaca masa lalu Indonesia (diktat Prasejarah Indonesia)*. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses 14 Oktober 2012 dari <http://staff.uny.ac.id>
- Sujito, Arie. (2002). *Gerakan Demiliterisasi di era transisi Demokrasi, Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang* (Jurnal). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 6 nomer 1 Juli 2002 hal 121-138. Diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://jurnalsopol.fisipol.ugm.ac.id>
- Sungkowati, Yulitin. (2007). *Lintasan Sejarah Indonesia Dalam Novel-Novel Suparto Brata* (Artikel). Diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://humaniora.uin-malang.ac.id>
- Supriyono. Agust. (2010). *Sistem Pertanahan Jaman Kerajaan Jawa*. (Artikel). Diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://eprints.undip.ac.id>
- Susanto, Edi. (2007). *Kepemimpinan Kharismatik Kyai* (Jurnal), Jurnal Karsa Vol XI No 1 April 2007, diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://karsa.stainpamekasan.ac.id>
- Suwardi, (2005). *Paham Kekuasaan Jawa dalam budaya politik Jawa Orde Baru dan Reformasi* (Makalah). Makalah Seminar



Internasional: pengembangan Bahasa, Sastra dan budaya daerah di ruang siding utama rektorat UNY. 26 September 2005.

Tarjiono. (2010). *Kedatangan Islam Ke Indonesia*. Makalah. Diakses 14 Oktober 2012 dari <http://tarjianto.files.wordpress.com>

Van Der Van, Corrie. (2004). *Kepemimpinan: Melampaui Feodalisme dan Primordialisme* (Jurnal). Jurnal STT Intim Makassar, diakses 20 Oktober 2012 dari <http://www.oaseonline.org>

Wibowo, S Kunto Adi. (2007). *Korupsi: arkeologi komunikasi politik di Indonesia* (artikel). diakses 20 Oktober 2012 dari <http://www.researchgate.net>

Wahid, Eriyantouw. (2001). *Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia Dan Permasalahannya Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998* (Skripsi), Diakses tanggal 30 juli 2012 Dari <http://lontar.ui.ac.id>

Weishaguna, (tt). *Reposisi Istilah Review Sejarah Ruang Kepulauan*. Jurnal PWK Unisba. Diakses 14 Oktober 2012 dari <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal>

Werela, Y. (2008). *Public bureaucracy: ethics and reform* (jurnal), jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik. dialogue. JIAKP, vol. 5, no. 1, januari 2008 : 1-19, diakses 9 juli 2012 dari <http://ejournal.undip.ac.id>

Widyarso. (2009). *Kerajaan Sriwijaya*. Diakses tanggal 14 Oktober 2012 dari <http://awidyarso65.files.wordpress.com>

Widyarso. (2009). *Kerajaan Mataram Kuno/ Mataram Lama*. Diakses tanggal 14 Oktober 2012 dari <http://awidyarso65.files.wordpress.com>

Wiharyanto, A Kardiyat. (2009). *Perlawanan Indonesia Terhadap Belanda Pada Abad XIX*. Diakses tanggal 14 Oktober 2012 dari <http://www.usd.ac.id>

Pustaka berupa artikel dari seminar, Lokakarya atau penataran

Agusta, Ivanovich. (2008). *Landasan diskurusus produksi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan bantuan langsung tunai* (Makalah). Makalah disampaikan pada Roundetable



- Discussion Kemiskinan di Indonesia Pasca kenaikan Harga BBM 6 Juni 2008.
- Ibrahim, Husaini. (2006). *Peninggalan Sejarah Dan Kesadaran Sejarah Di Aceh :Suatu Tantangan Masa Depan*. Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII, di Jakarta.tgl.13-16 November 2006.
- Krismo, Alan. dkk. (2010). *Pengaruh Animisme Terhadap Kebudayaan Melayu*, Pandang panjang: Makalah
- Sutjipto, F.A. (t.t.). *Beberapa Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu*, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM, Seri Bacaan Sejarah Indonesia, No. 11, t.t.), hal. 1-2
- Suwardi. (2005). *Paham kekuasaan jawa dalam budaya politik orde baru dan reformasi*, Makalah Seminar Nasional; Pengembangan Bahasa, Sastra, dan *budaya* Daerah Di ruang Sidang Utama Rektorat UNY, 26 September 2005. Diakses diakses 19 september 2012.dari <http://staff.uny.ac.id>
- Tjandrasasmita, Uka. (2007). *Sejarah perkembangan Islam di Indonesia*. Pengayaan materi pelajaran sejarah Islam di Indonesia.Pengayaan materi pelajaran sejarah Islam Di Indonesia. Di Gedung Serba Guna I. Selasa, 18 September 2007.Pemda Kabupaten Bogor.

Pustaka dari Lembaga

- Kejagung (2011) *Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*. Diakses tanggal 9 juli 2012 dari <http://www.kejaksaan.go.id>

Pustaka dari Kamus

- Departemen pendidikan Nasional. Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (1996). *Kamus Inggris-Indonesia An English - Indonesian Dictionary*. Jakarta : PT Gramedia.

Pustaka dari Surat kabar



- Akbar Tri Kurniawan, 06 Maret 2012-*Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menilai maraknya kasus korupsi pegawai pajak berasal dari sengketa pajak*. diakses 8 oktober 2012 dari <http://tempo.com>
- Bakaruddin, Is. 2011. *Kasus Miranda-Nunun: Aneh Tapi Nyata* (online), diakses tanggal 20 Oktober 2011 dari <http://hukum.kompasiana.com>
- Febrianto, 31 Oktober 2012. BW Dinilai 'Lindungi' Sri Mulyani di Kasus Hambalang, diakses tanggal 20 Oktober 2012 dari actual.co
- Gorontalo, Sabtu, 18 Agustus 2012, *Kabupaten Gorontalo larang pemberian parsel ke pejabat*, diakses 8 oktober 2012 dari m.antaranews.com
- ICW: Rabu, 01 Agustus 2012. *Gratifikasi Seksual untuk Lancarkan Proyek*, diakses 19 september 2012 dari <http://m.okezone.com>.
- Jakarta, Wiji Nurhayat. 04 Agustus 2012, *Pungli Pelabuhan Tanjung Priok Makin Merajalela, Sopir Truk 'Teriak'*. diakses 8 oktober 2012 dari <http://detikFinance>.
- M. Kohar Cahyo Apriono 02-Sep-2010, *Gegeran Sengketa Tanah Bengkok* (diakses 8 oktober 2012 dari <http://kabarIndonesia.com>).
- Yatim, Usman. Pamulang, 29 Oktober 2012. *DPR Versus Dahlan: Upeti BUMN dan Inefisiensi PLN* diakses tanggal 9 Oktober 2012 dari dpr-versus-dahlan-upeti-bumn-dan-inefisiensi-pln.htm
- Diakses dari <http://serbasejarah.blogspot.co.id/2012/03/sekilas-tentang-kerajaan-samudera-pasai.html> pada 20 Januari 2017.
- Diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/07/kondisi-nusantara-setelah-kekuasaan-majapahit-runtuh> pada 20 Januari 2017
- Gambar alat serpih diolah dari <http://www.wacana.co/2013/08/alat-serpih/> pada 23 April 2017.
- Gambar lukisan dinding goa Sumber diolah dari <https://hurahura.wordpress.com/2010/09/11/teknologi-baru-penanggalan-lukisan-batu-kuno/> pada 23 April 2017.



Gambar Dolmen Sumber diolah dari
<http://ipsgampang.blogspot.co.id/2016/10/apa-itu-dolmen.html> pada 22 April 2017.

Gambar Gerabah Sumber diolah dari
<http://www.wacana.co/2009/12/gerabah-prasejarah/> pada 22 April 2017

Gambar Prasasti kerajaan kutai kertanegara Sumber diolah dari
<http://www.zonasiswa.com/2014/05/sejarah-kerajaan-kutai.html> pada 23 April 2017.

Gambar Prasasti Prasasti Ciaruteun Tarumanegara Sumber diolah dari
<http://www.yudhe.com/7-prasasti-peninggalan-kerajaan-tarumanegara/> pada 22 April 2017.

Gambar Prasasti Tukmas kerajaan Kalingga Sumber diolah dari
<http://deaseptianaputri.blogspot.co.id/2012/09/kerajaan-kalingga-holing.html> pada 22 April 2017.

Gambar Prasasti Dinoyo Sumber diolah dari
<http://jawakuno.com/prasasti-dinoyo/> pada 22 April 2017.

Gambar Prasasti Kalasan Kerajaan Mataram Kuno Sumber diolah dari
<http://budisusilo85.blogspot.co.id/2014/02/prasasti-kalasan-yogyakarta.html> pada 22 April 2017.

Gambar Candi Perambanan Sumber diolah dari
<http://www.rantinandrovin.com/wp-content/uploads/2012/11/Prambanan-2010-2-of-2.jpg> pada 22 April 2017.

Gambar Candi Borobudur Sumber diolah dari
<http://soeryonopost.blogspot.co.id/2015/08/candi-borobudur-dibangun-berdasarkan.html> pada 22 April 2017.

Gmabar Prasasti Pager Ukir Ponorogo Sumber diolah dari
<https://pilgrim74.wordpress.com/2013/09/12/situs-bersejarah-pager-ukir/> pada 10 April 2017.

Gambar candi singhasari Sumber diolah dari
<http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/12/peninggalan-kerajaan-singasari-5-candi.html> pada 10 April 2017.



Gambar Prasasti Plas Pasemah Sumber diolah dari <http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/10/9-prasasti-peninggalan-kerajaan-sriwijaya.html> pada 10 April 2017.

Gambar Gapura Bajang Ratu Sumber dilah dari <http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/10/9-candi-peninggalan-kerajaan-majapahit.html> pada 10 April 2017.

Gambar Makam Islam Fatimah Binti Maimun Sumber diolah dari <http://travel.detik.com/dtravelers/stories/u-2963977/makam-ulama-sepanjang-9-meter-di-gresik-seperti-apa/3> pada 22 April 2017.

Gambar Lambang kerajaan samudra pasai Sumber diolah dari <https://kanzunqalam.com/2016/02/20/misteri-lambang-kerajaan-islam-samudra-pasai/> pada 20 April 2017.

Gambar Masjid Raya Baiturohman Peninggalan kerajaan Aceh Sumber diolah dari <http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/12/6-peninggalan-kerajaan-aceh-keterangan.html> pada 10 April 2017.

Gambar Majid Agung Demak peninggalan kerajaan demak Sumber diolah dari <http://jagosejarah.blogspot.co.id/2015/03/bukti-peninggalan-kerajaan-demak-yang.html> pada 10 April 2017.

Gambar Intimidasi Pemerintahan Kolonial belanda Sumber diolah dari <http://www.berdikarionline.com/belanda-minta-maaf-dan-ganti-rugi-korban-pembantaian-westerling/> pada 10 April 2017.

Gambar Jogun Gonfu Kekaisaran Jepang Sumber diolah dari http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/jugun_lanfu pada 10 April 2017.

Gambar Kondisi Reformasi 1998 Sumber diolah dari http://nasional.kompas.com/read/2016/05/18/11192491/18_mei.1998.jakarta.mencekam.tetapi.mahasiswa.bergerak.kuasai.gedung.dpr.mpr pada 10 April 2017.

Gambar kelas bangsawan dan kelas proletar Sumber diolah dari <https://phesolo.wordpress.com/2012/06/28/masyarakat-dan-perubahan-sosial-surakarta-awal-abad-xx/> pada 10 April 2017.

RIWAYAT PENULIS

Yusuf Adam Hilman, Lahir di sebuah desa bernama Segala Mider, pada 08 November 1988, salah satu Desa kecil yang ada di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Provinsi Lampung, kemudian Yusuf melanjutkan Pendidikan tinggi strata S-1 ditempuh di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (2009), dan pendidikan Strata S-2 dilanjutkan di Universitas yang sama, yakni di Program Pascasarjana Magister Sosiologi (2013).

Penulis ketika masih aktif sebagai mahasiswa, merupakan anggota aktif di Organisasi Resimen Mahasiswa Satuan 812, “Macan Kumbang” Universitas Muhammadiyah Malang, Selepas lulus dari program pasca sarjana kemudian menjadi Dosen Tetap di Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo sampai sekarang.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan berupa Jurnal dan juga prosiding, antara lain: 1). Mengurai Benang Kusut Persepakbolaan Tanah Air (Sebuah Kajian Kritis Terhadap Realitas Perebutan Kekuasaan Di Ranah Publik) ARISTO Vol 7, No 2 (2016): Aristo Vol. 7 2016 P.ISSN / 2338 – 5162 E.ISSN / 2527 - 8444. 2).Kajian Kritis tentang inovasi daerah terkait pengembangan dan pengelolaan desa wisata berbasis komunitas. Jurnal Pariwisata Vol. 21 No.1 Maret 2016, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sekolah tinggi Pariwisata Trisakti. 3).Revitalisasi konsep Alun – alun sebagai ruang publik: studi pada pemanfaatan alun – alun Ponorogo. ARISTO Vol. 04 Januari 2015 P.ISSN 2338 – 5162. 4). Regional Development Of Tourism In Ponorogo Regency, East Java Journal Of Indonesian Tourism And Development Studies 4 (Tourism), 91 – 96. 5). Revitalisasi Fungsi Ruang Publik bagi Pedestrian di Wilayah Kabupaten Ponorogo melalui Pendekatan Komunitas. Humaniora Kopertis VII 13 (Humaniora), 188 – 193. 6).Menggagas Kembali Ruang Publik Di Desa (*Analisis terhadap Pemanfaatan Ruang Publik Pedesaan di wilayah Kabupaten Ponorogo*) Reconceptualizing Public Space In The Village (*The analysis of Public Space utilization in the Village of Ponorogo Regency*) Jurnal Massanger

Univerrstas Semarang Vol.9 No. (1), Halaman 26 – 31.2017. 7).Reiventing Fungsi Alun-Alun dalam Rangka Perebutan Ruang Publik (Sebuah Kajian Kritis Tentang Alun-alun di Indonesia) Prosiding Seminar Nasional “Kontribusi Akademisi dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan” Universitas Brawijaya ISBN: 978-602-74352-0-9. 8).Kajian Kritis Terhadap Pemetaan Hasil Evaluasi Pilkada Prosiding Seminar Nasional “Evaluasi Pilkada Serentak : Membangun Kesadaran Politik Dan Komunikasi Partisipatoris Menuju Penguatan Tata Kelola Pemerintahan” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Issn. 2502-7832. 9). Menggagas Konsep Alun – alun ideal (antara ruang publik dan tata ruang kota di Ponorgo) Ponorogo Post No. 730 XV 26 – 01 Mei /2016. 10).Menggagas Konsep Alun – alun ideal (antara kebutuhan dan tuntutan di Ponorgo) Ponorogo Post No. 728 XV 12 – 18 Mei /2016. 11).Menggagas Konsep Alun – alun ideal (antara ruang publik dan tata ruang kota di Ponorgo) Ponorogo Post No. 735 XV 14 – 20 Juli /2016.

Karya ini merupakan buku perdana penulis, besar harapan saya supaya dengan tulisan ini, kita bisa berbagi pengalaman, pandangan tentang suatu bidang ilmu, selain itu juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi, bagi semua pihak.